sosiologi EKONOMI





Wandy Zulkarnaen, SE., SSy., MM., CHRA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, buku "SOSIOLOGI EKONOMI" ini bisa menjadi referensi keilmuan yang sangat penting sebagai salah satu alat dalam memahami realitas dan fenomena perekonomian dengan sudut pandang sosial.

Mudah-mudahan buku "SOSIOLOGI EKONOMI" ini bisa memberikan penjelasan mengenai kajian ekonomi dengan pendekatan sosiologi yang fokus pada pembahasan sisi produksi, distribusi dan konsumsi, juga penjelasan tentang kapital, ekonomi moral dan kepercayaan dalam aspek kehidupan beserta analisis ketimpangan sosial & ekonomi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Bandung, 16 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	1
A. Pengertian Sosiologi	1
B. Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli	. 1
a. David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White	1
b. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt	. 2
C. Pengertian Ekonomi	3
D. Pengertian Sosiologi Ekonomi	. 4
E.Peletak Fondasi Sosiologi Ekonomi	7
1. Karl Marx (1818-1883)	7
2. Max Weber (1864-1920)	7
3. Emile Durkheim (1858-1917)	7
F. Sosiologi Ekonomi Dewasa Ini	8
BAB 2. PENDEKATAN SOSIOLOGIS TENTANG EKONOM	II 10
A. Perbandingan Antara Pendekatan Ekonomi Dan Sosiologi	10
1. Konsep Aktor	. 10
2. Konsep Tindakan Ekonomi	15
3. Hambatan pada Tindakan Ekonomi	16
4. Hubungan Ekonomi dan Masyarakat	17
5. Tujuan Analisa	. 18
6. Penerapan Metode	19
B. Teori Sosiologi Sebagai Pendekatan	20
1. Teori struktural fungsional,	20
♦ Asumsi teori struktural fungsional	. 20
2. Teori Struktural Konflik	20

♦ Asumsi Teori Struktural Konflik	21
3. Teori Interasionisme Simbolis	21
♦ Asumsi Teori Interasionisme Simbolis :	21
4. Teori Pertukaran.	22
♦ Asumsi Teori Pertukaran :	22
BAB 3. PRODUKSI	23
A. Pengertian Produksi	23
1. Produksi dalam Kajian Sosiologi	24
2. Produksi Sepanjang Umat Manusia	25
a. Produksi Pada masyarakat Prakapitalis	25
b. Produksi Pada Masyarakat Kapitalis dan Pascakapitali	27
BAB 4. DISTRIBUSI	29
A. Pengertian Distribusi	29
1 Pandangan Para Pemuka Sosiologi Tentang Distribusi	30
AKarl Marx (1818-1883)	30
BGeorge Simmel (1858-1918)	32
CMax Weber (1864-1920)	34
DKarl Polanyi (1886-1964)	35
E Talcott Parsons (1902-1979) dan Neil J. Smelser	37
2 Fokus Kajian Sosiologi Tentang Distribusi	39
3 Jenis DistribusiI	40
a) Resiporitas	40
b) Redistribusi	44
c) Pertukaran	45

BAB 5. KONSUMSI	50
A. Pengertian Konsumsi	50
B. Pandangan para peneluka tentang konsumsi	50
1.Karl Marx (1818-1883)	50
2. Emile Durkheim (1858-1917)	51
3. Max Weber (1864-1920)	53
4.Thorstein Veblen (1857-1929)	54
C. Fokus Kajian Sosiologi Tentang Konsumsi	55
D. Budaya dan Konsumsi Pada Masyarakat Kapitalis	55
BAB 6. KETERLEKATAN	5 9
A. Pengertian Keterlekatan	59
B. Keterlekatan-Ketidakterlekatan Versus Keterlekatan Lemah-Kuat	61
C. Bentuk Keterlekatan	66
1 Keterlekatan Relasional	66
2 Keterlekatan Struktural	68
D. Keterlekatan dan Pendekatan Lainnya	71
BAB 7. JARINGAN	72
A. Jaringan	72
B. Tingkatan Jaringan	73
1 Jaringan mikro	73
2 Jaringan meso	73
3 Jaringan makro	73
C. Pendekatan Jaringan Sosial	73
1 Pendekatan analisis	73
2 Pendekatan preskriptis	74

D. Bidang Penelitian Jaringan Sosial	74
BAB 8. KEPERCAYAAN	76
A. Pengertian Kepercayaan	76
B. Kepercayaan Sebagai Bagian dari Capital sosial	77
C. Lingkungan Kepercayaan	78
1Masyarakat Pra-Modern	78
2Masyarakat Modern	79
BAB 9. KAPITAL	81
A. Pengertian Kapital	81
B. Kapital (DasKapital)	82
C. Kapital Sosial	84
♦Pengertian Kapital Sosial	84
D. Kontroversi Pemahaman Kapital Sosial.	86
♦Kapital Sosial dan Tipe-tipenya Menurut Portes	88
E., Kapital Budaya	91
F Kapital Simbolis	97
BAB 10. EKONOMI MORAL DAN EKONOMI RASIONAL	100
A. Tindakan Ekonomi	100
B. Ekonomi Moral	101
♦Ekonomi Moral Petani	101
C.Ekonomi Moral Pedagang	109
a Imigrasi Pedagang Minoritas	110
b Pembentukan kelompok-kelompok Etnis atau Religius	111
c Akumulasi Status Kehormatan (Modal Budaya)	111
d Munculnya Perdaganan Kecil dengan Ciri "ada uang ada bara	ıng"
	111

D. Ekomomi Rasional	112
EMasyarakat Indonesia : Ekonomi Moral Atau Ekonomi Rasional	
	114
BAB 11. EKONOMI DAN ASPEK KEHIDUPAN	115
A. Aspek Kehidupan	115
B. Relasi Kekuasaan Ekonomi dan Aspek Kehidupan	119
1. Kekuasaan Ekonomi	119
a) Pengertian Pasar	119
b) Asal Usul Pasar	120
c) Pasar yang Mengatur Dirinya Sendiri	122
d) Kegagalan Pasar	126
2. Kekuasan Negara	132
a. Pengertian Negara	132
1. Perspektif State Centered	132
2. Perspektif Society centered	134
b. Asal Usul Negara	135
1. Teori Fungsionalis	137
2. Teori Marxian	139
3. Teori Ekologis	140
c. Kegagalan Negara	141
1) Pengertian Civil Society	142
2) Asal Usul Civil society	144
3) Bagaimana Fenomena Civil Society di Indonesia	146
4) Gerakan Sosial: Kekuatan Civil Society	147
a. Pengertian gerakan sosial	147
b. Tipologi Gerakan Sosial	148
c. Cara gerakan sosial	153

d. Tahapan gerakan sosial	153
C. Hubungan Tiga Pilar Kekuasaan	155
1. Hubungan antara negara dan pasar	155
2. Hubungan Antara Negara dan Civil Society	157
3. Hubungan Antara Pasar dan civil society	159
4. Sinergisitas Tiga Pilar Kekuasaan	160
a. Negara	163
b. Pasar	163
c. Civil Society	163
BAB 12. KETIMPANGAN SOSIAL DAN EKONOMI	165
A. Ketimpangan social	`165
1. Ketimpangan antara desa dan kota	165
2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia	166
3. Ketimpangan ekonomi antargolongan di masyarakat	167
4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta	168
5. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentra	asi
ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan	168
B. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial	169
C. Bentuk dari ketimpangan sosial	169
D. Dampak dari adanya ketimpangan sosial	170
E. Langkah-langkah mengatasi ketimpangan sosial	170
F. Ketimpangan sosial dan Ekonomi	170
PENUTUP	172
DAFTAR PSTAKA	173

BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

(DEFINITION AND SCOPE)

A. Pengertian Sosiologi

Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama Auguste Comte dalam bukunya Cours de la Philosovie Positive. Orang yang dikenal dengan bapak sosilogi tersebut menyebut sosiolog adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu 'socius' yang berarti teman atau kawan dan 'logos' yang berarti ilmu pengetahuan.

Disebutkan oleh Auguste Comte di atas yang menyatakan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan. Sebuah pengetahuan dikatakan sebagai ilmu apabila mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan pada penelitian yang ilmiah. Sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu sejauh sosiologi mendasarkan penelaahannya pada bukti-bukti ilmiah dan metode-metode ilmiah.

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan secara luas sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat di mana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubugan, jaraingan iteraksi, serta sebagai kompleks lembaga/penata.

B. Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

a. David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White

David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White (1989:4) berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan daan

pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh-kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. Konsep interaksi sosial yang dimaksudkan disini adalah sebagai suatu tindakan timbal-balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Suatu tindakan timbal-balik tidak akan terjadi bila tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bisa disebut sebagai tindakan sosial, yaitu suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (meaning) subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Kontak merupakan tahap awal dari terjadinya interaksi sosial.Interaksi sosial tidak akan terjadi jika hanya ada kontak tanpa diikuti dengan komunikasi. Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyampaian informasi timbal-balik antara dua orang atau lebih. Informasi yang disampaikan dapat berupa kata-kata, gerak tubuh, atau symbol lainnya yang memiliki makna. Menurut Herbert Blumer, makna-makna dari suatu kata, gerak tubuh ataupun symbol lainnya, berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.

Definisi sosiologi dari Brinkerhoft dan White menempatkan manusia sebagai makhluk yang aktif-kreatif. Manusia adalah sebagai pencipta terhadap dunianya sendiri. Proses penciptaan tersebut berlangsung dalam hubungan interpersonal. Oleh sebab itu, sosiologi yang dikembangkan melalui definisi ini adalah sosiologi mikro.

b. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Horton dan Hunt (1987:3) berpendapat bahwa sosiologi merupak ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Horton dan Hunt (1987:59) mendifinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang

mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagaian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Horton dan Hunt (1987:58) mendifinisikan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Definisi ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai insan yang pasif yaitu mempelajari apa yang telah ada, tetapi juga menjadi insan yang aktif yaitu mengalami bersama secara sosial. Definisi tersebut menempatkan sosiologi pada tataran makro objektif-subjekif, yaitu makro yang berada diluar sana (eksternal), juga dapat makro yang berasal dari kesadaran individu (internal).

Keseluruhan hubungan sosial tersebut dikenal dengan masyarakat.di mana hubungan-hubungan tersebut tidak terbentuk secara sembarangan, tetapi sebaliknya hubungan tersebut memiliki semacam keteraturan atau pola.

Menggabungkan dua definisidiatas dengan cara itu, kita memandang sosioogi sebagai studi ilmiah yang berhubungan dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat proses interaksi sosial. Dengan definisi seperti itu, kita akan bisa melihat interaksi interpersonal seperti interaksi anatara individu dan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Dengan kalimat lain, posisi kita berada antara tataran sosiologi mikro dan makro serta anatara relitas objektif (eksternal) dan realitas subjektif (internal).

C. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya masyarakat (rumah tangga dan pebisnis atau perusahaan) yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Atau dengan kata lain, bagaimana

masyarakat (termasuk rumah tangga dan pebisnis atau perusahaan) mengelola sumberdaya yang langka melalui suatu pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaannya.

D. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu:

1.Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi.Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi.Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh-mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntut individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan di mana memproduksinya.

Masyarakat merupakan suatu realitas yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik.

2 Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Dari definisi ini terdapat dua hal yang harus dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena ekonomi.

Adapun dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah konsepkonsep, Variabel-varibel, teori-teori dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan lainnya, merupakan penunjuk pada sesuatu. Apa yang membedakan antara orang kebanyakan dengan sosiolog (ahli sosiologi). Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan.

Orang kebanyakan menggunakan konsep sosial yaitu konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam suatu masyarakat dilakukan dalam kehidupan sehari dan cara sosialisasinya di suatu tempat seperti, kedai, warung, dll. Sedangkan sosiolog menggunakan konsep sosiologis yaitu konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik yang menunjuk pada suatu proses mempelajari nilai, norma, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas perbedaan pengertian anatara orang kebanyakan dengan sosiolog.

Variabel adalah konsep akademik, termasuk sebagai konsep sosiologis, bukan konsep sosial. Variabel merupakan konsep yang memiliki variasi nilai. Stratifikasi sosial, misalnya, dapat dikatakan sebagai Variabel, karena stratifikasi sosial memiliki variasi nilai yaitu tinggi, menengah, dan bawah.

Teori merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial. Teori dalam sosiologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Perkembangan teori terlihat dari teori yang dibangun oleh peneruka utama sosiologi seperti Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Goerg Simmel dan lainnya.

Sedangkan metodelogi sosiologi berkembang dalam pendekatan kualitatif dan kuantitaif yang meliputi metode survei, studi khusus, grounded research, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan fenomena ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka.

Fenomeda ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Yang di maksud disini adalah semua aktifitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa serta barang langka. Berikut adalah beberaoa fenomena-fenomena yang termasuk fenomena ekonomi.

Proses ekonomi	Ekonomi moral
Produktifitas dan inovasi	Ekonomi rasional
tekhnologi	
Pasar	Politik ekonomi
Kontrak	Ekonomi dan budaya
Uang	Ekonomi dan politik
Tabungan	Ekonomi dan pendidikan
Organisasi ekonomi	Ekonomi dan pembangunan
Kelas ekonomi	Ekonomi dan mobilitas sosial
Ekonomi internasional	Ekonomi dan perubahan sosial
Ekonomi dan etnik	Kekuatan Ekonomi
Kekuatan ekonomi	Kehidupan ditempat kerja
Ekonomi dan gender	Ekonomi dan masyarakat luas, dll

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa fenomena ekonomi sangatlah banyak dan beragam. Fenomena tersebut berada tidak hanya pada tatanan mikro seperti tindakan dan perikalu ekonomi tetapi juga tatanan makro seperti budaya ekonomi. Sosiolog memiliki konsep

variabel dan teori sosiologi dalam kerangka pikir. Sedangkan metode merupakan alat untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan mengkaji suatu fenomena ekonomi yang berada di masyarakat luas.

E. Peletak Fondasi Sosiologi Ekonomi

1. Karl Marx (1818-1883)

a.Karya awal Marx tentang The Economic and philosophical Manuscripts of 1844 ([1844] 1964) berjudul:

The Power of Money in Bourgeois Society yang mengembangkan idenya tentang nasib hubungan-hubungan sosial ketika segala sesuatu menjadi komoditas, yaitu dapat dijual dan dibeli.

Tenaga kerja khususnya menekankan distorsi dari proses kerja ketika tenaga kerja menjadi suatu komoditas.

b. A Contribution to The Critique of Political Economy ([1859] 1970:20-21)

Bahwa ekonomi merupakan fondasi dari masyarakat dan diatas fondasi ini dibangun super struktur politik dan hukum.

c. Capital ([1867] 1906:13)

Komoditas diciptakan oleh tenaga kerja; kemudian komoditas tersebut ditukarkan demi memperoleh uang; selanjutnya uang diubah menjadi modal; serta modal menciptakan penindasan dan pertentangan kelas.

2. Max Weber (1864-1920)

Bukunya Economy and Society ([1922] 1978), menetapkan garis pemisah antara ekonomi dan soisologi ekonomi dengan mengajukan tiga unsur:

- a. Tindakan ekonomi adalah sosial;
- b. Tindakan ekonomi selalu melibatkan makna;

c. Tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Bukunya The Division of Labor in Society ([1893] 1984) Menurutnya pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern.

F. Sosiologi Ekonomi Dewasa Ini

Konsekuensi logis dari perkembangan in adalah munculnya pembagian kerja baru antara sosiologi dan ekonomi. Yang pada akhirnya memberi dampak terhadap perkembangan pemikiran yang muncul pada saat ini dalam memahami hubungan antara ekonomi dan masyarakat.

Adapun aliran pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi Pilihan Rasional

Memasukkan konsepsi pilihan rasional dan individualism metodelogis dalam sosiologi.

2. Sosio-Ekonomi

Memperingatkan bahwa pendekatan ekonomi neo-klasik tidak cukup untuk memecahkan masalah ekonomi, yaitu perlu menggunakan perspektif yang lebih luas yang mencakup sosiolgi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu sosial lainnya.

3. PSA-Ekonomi

Ide dasarnya adalah penggunaan penemuan-penemuan dari psikologi, sosiologi, dan antropologi secara langsung kedalam model-model ekonomi, dengan semua ini para ekonom sulit untuk memcahkannya.

4. Biaya Transaksi Ekonomi

Ide dasarnya adalah bahwa masalah-masalah yang terjadi pada titik simpul antara ekonomi, hukum, dan organisasi dapat dipecahkan,

dengan asumsi bahwa institusi-institusi tersebut cenderung kepada kondisi-kondisi yang secara efisien mengurangi biaya transaksi.

5. Sosiologi Ekonomi Baru

Ide dasar aliran pemikiran ini dapat dirujuk kepada tiga proposi utama dari pemikiran Weber dan dikembangkan lebih luas yang diajukan oleh Swedberg dan Granovetter (1992:6-9):

- a. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial,
- b. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial,
- c. Institusi-institusi ekonommi dikonstruksi secara sosial.

Ketiga proposional tersebut berakar dari pemikiran Weber yang dikembangkan secara lebih luas dan tajam oleh Swedberg dan Granovetter.

BAB 2. PENDEKATAN SOSIOLOGIS TENTANG EKONOMI

(A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE ECONOMY)

A. Perbandingan Antara Pendekatan Ekonomi Dan Sosiologi

Untuk menyamakan pemahaman tentang konsep pendekatan maka perlu pembatasan arti konsep tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan adalah cara pandang dalam melihat sesuatu dengan landasan berpikir atau asumsi tertentu. Dengan demikian, dalam buku ini pendekatan berguna dalam melihat ekonomi dengan landasan berpikir atau asumsi dari sisi ekonomi atau sosiologi. Untuk memperbandingan pendekatan antara kedua cabang ilmu tersebut, maka selanjutnya akan dibahas tentang konsep aktor, konsep tindakan ekonomi, hambatan pada tindakan ekonomi, hubungan ekonmi dn masyarakat, tujuan analisa, dan penerapan metode.

1. Konsep Aktor

Studi ekonmi merupakan kajian tentang ekonmi. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagai suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan pengalokasian sumberdaya masyarakat (rumahtangga dan pebisnis/perusahaan) yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan memeprtimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing. Jadi, kegiatan ekonomi merupakan gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa. Cara yang dimaksud disini berkaitan

dengan semua aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran konsumi barang-barang atau pun jasa-jasa langka.

Titik Tolak analisi ekonomi adalah individu. Pendekatan individu dalam analisis ekonomi berakar dari utilitarianisme dan ekonomi politik inggris. Apa maksudnya? Utilitarianisme mengonsumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Sedangkan ekonomi poilitik inggris dibangun diatas prinsip "laissez faire, liassez passer", yaitu "biarkan hal-hal sendiri, biakan hal-hal yang baik masuk". Artinya, biarkan individu mengatur dirinya, karena individu tahu yang dimauinya. Oleh sebab itu jangan ada kontrol negara. Kalaupun ada kontrol negara, itu diperlukan agar kebebasan individu dengan rasionalitasnya untuk mengejar keuntungan pribadinya tetap terjaga. Sebab kesejahteraan masyarakat umumnya dalam jangka panjang akan sangat terjamin apabila individu itu dibiarkan atau malah didorong untuk mengejar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadinya.

Mari kita pahami contoh. Untuk dapat bertahan hidup, setiap individu perlu bekerja. Individu sendirilah yang lebih mengetahui dibandingkan dengan orang lain, dia harus bekerja apa. Hal ini dikarenakan individu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dari isis kemampuan, pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan lainnya yang dimilikinya. Bagi Hasan, misalnya, lebih cocok bekerja sebagai pedagang emas dibandingkan jadi seorang pengacara. Meskipun dia tamat dari fakultas hukum dari suatu universitas ternama, namun berdasarkan berbagai pertimbangan rasionalnya seperti kemampuan finasial,

pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan dukungan keluarga besarnya yang kebanyakan sebagai pedagang emas maka bekerja sebagai pedagang emas adalah pilihan rasioanl dan tepat. Lain bagi dengan Andi berpandangan bahwa kalau dia bertahan sebgai pegawai negeri dengan pangkat III b pada suatu pemerintahan kota maka dia perlu waktu yang lama untuk dia beli rumah dan mobil. Oleh karena latar belakang yang cukup bagus, seperti sebelum jadi pegawai negeri telah lama mendjadi pennggiat LSM sehingga dia punya banyak pengalaman, jaringan, dan kompetensi maka pilihan tersebut rasioanl dan tepat. Pilihan Hasan,Andi dan individu lainnya dalam mengejar kepentingan dan kesenagan pribadi mereka sebagai individu diasumsikan menyumbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Berbeda dengan dalam mnediskusikan individu. sosiologi mengarahkan perhatiannya pada aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu "aktor dalam suatu interaksi" atau "aktor dalam masyarakat". Apa yang dimaksud dengan "aktor dalam suatu interaksi" dan "aktor dalam masyarakat" ? Maksud "aktor dalam suatu interaksi" adalah individu yang terlibat dalam suatu interaksi dengan individu atau beberapa (sekelompok) individu lainnya. Pada tataran ini individu dilihat sebagai aktor yang kreatif dalam menciptakan, mempertahankan, dan merubah dunianya pada saat interaksi berlansung.

Pemahaman anda dirasakan mantap apabila di seratai dengan contoh, bukan? Sekarang kita ambil suatu contoh. Irvan adalah seorang dosen muda yang selalu *jaim* (kependekan dari menjaga image, istilah gaul dari manajemen penampilan). Terutama dalam busana, dalam srtiap kesempatan. Pada suatu ketika pada saat mengikuti program irvan tidak bisa menjawab dengan baik. Sang dosen menyeletuk, "penampilan anda

cukup OK, tapi sayang otak anda kurang OK", Irvan merasa dipermalukan peristiwa tersebut, irvan tidak lagi terlalu memperhatikan penampilan busana seperti sebelumnya. Hal itu ditunjukkannya denga tidak membeli busana setiap bulan, seperti yang biasa dilakukan irvan. Pada waktu sebelum peristiwa tersebut. Dari contoh tersebut, kelihatan betapa pentingnya konteks interaksi dalma merobah perilaku seorang dalam

Selanjutnya anda tentu ingin tahu apa yang dimaksud dengan "aktor dalam masyarakat"? Adapaun yang dimaksud dengan "aktor dalam masyarakat" adalah individu yang indentitas dirinya tidak tampil tetapi bersembunyi dalam suatu kseatuan yang dinamakan masyarakat. Masyarakt merupakan suatu kesatuan yang utuh atau sebagai suatu entias sendiri, yang dikenal sebagai suatu fenomena *sui generis* . berbeda dari individu-individu yang memebentuknya.

Contoh dari penjelasan tersebut. Masih ingatkah konsep masyarakat pada bab sebelumnya, terutama definisi berger tentang masyarakat? Kembali kita pada contoh hubungan persahabatan yang dipandang oleh bergersebagai masyarakat. Ketika hubungan siska dan suci, misalnya. Membentuk suatu hubungan persahabatan, maka hubungan anatar siska dan suci lebih memiliki pola hubungan. Hubungan persahabatan antara siska dan suci jelas berbeda hubungan antara Suci dengan Riri sebagai teman biasa. Sama hal nya juga Siska dengan Dona sebagai teman biasa. Pola hubungan antara siska dan suci disebut dengan sistem interkasi atau dikenal juga sebagai masyarakat, sedangkan hubungan yang disebut dan terkahir dikenal sebagai interaksi sosial biasa. Sistem interaksi atau masyarakat yang dibentuk oleh siska dan suci berbeda dengantau dengan kata lain, siska dan suci bukanlah

persahabatan itu sendiri, karena persahabatan memiliki ensitas sendiri yang tidak sama dengan individu siska dan suci yang membentuknya. Persahabatan sebagai sistem interaksi menjadi rujukan bagi iska dan suci ketika mereka melakukan interaksi sosial anatr sesamanya.

Oleh sebab itu dapat ditagskan bahwa aktor dalam sosiologi tidak bisa dilihat sebagai individu itu sendiri, tetapi individu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan indiviu lainnya, baik individu sebagai perorangan atau dalam kelompok (masyarakat).

Contoh dan perbandingan salam ekonomi, Butet adalah individu yang memiliki rasionalitas dan selalu menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya. Hal yang sama juga dimiliki oleh individu lain di mana dan kapan saja, seperti Nicola dari Jerman, Caterine dari Amerika, Ming-Ming dari jepang atau Zahra dari Mesir. Jadi, Butet tidak berbeda dengan Nicola, Caterine, Ming-Ming, dan Zahra.

Sedangkan sosiologi, misalnya, melihat Butet sebagai individu dalam hubungannya dengan Boanar atau Lindu dalam masyarakat Batak. Butet berbeda dengan Nicola karena situasi dan keadaan interaksi dan masyarakat di mana Butet berada berbeda dengan Nicola, yaitu Butet hidup dalam masyarakat Batak, Indonesia, sedangkan Nicola di Jerman.

Tindakan aktor yang menjadi perhatian sosiologi adalah tindakan aktor yang berkaitan dengan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Mas Weber dalam Economy and society. Tindakan aktor dinyatakan sebagi tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatiakn tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu (Weber[1922]1978:4).

Formulasi Weber tersebuta menegaskan perbedaan antara ekonomi dan sosiologi. Yang pertama mengasumsikan bahwa aktor tidak dihubungkan dengan aktor lain, sedangkan yang disebut terakhir mengamsumsikan bahwa aktor dihubungkan dengan dan dipengahruhi oleh aktor lain.

2. Konsep Tindakan Ekonomi

Di dalam ekonomi, aktor diasumsikan mempunyai seperangkat pilihan dan profesi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan (perusahaan). Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi. Sedangkan sosiologi melihat beberapa kemungkinan tipe tindakan ekonomi. Kembali kepada weber ([1922]1978:63-69). Tindakan ekonomi dapat berupa rasional, dan spektakulatif-irasional.

Contohnya, individu mempertimbankan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. Seorang pria tamatan Sekolah Menegah Pertama (SMP), misalnya, dipandang rasional bila dia melamar di suatu bank tidak sebagai akuntan. Tetapi sebagai office-boy (pesuruh). Atau contoh lain, seorang pedagang melihat disuatu daerah yang sedang berkembang terdapat peluang pendirian toko swalayan. Peluang tersebut dilihat prospektif memiliki masa depan yang baik dengan beberapa alasan: penduduknya banyak, pasar tidak ada, hanya ada beberapa toko kecil. Tindakan pedagang tersebut dipandang rasional. Tindakan ekonomi rasional menjadi perhatian baik ekonomi maupun sosiologi.

Dua tindakan ekonomi lain yang tidak dilihat oleh ekonomi, tetapi menjadi perhatian sosiologi adalah tindakan ekonomi tradisional dan tindakan ekonomi spekulatif-irasional. Tindakan ekonomi tradisional bersumber dari tradisi atau konvensi. Pertukaran hadiah diantara sesama komunitas dalam suatu pearayaan, membawa kado bagi teman yang sedang ulang tahun memberikan sumbangan untuk penyelenggara acara perkawian kerabat, atau memberikan oleh-oleh kepada tetangga ketka pulang dari perjalanan jauh merupakan bentuk pertukaran yang dipandang sebagai suatu tindakan ekonomi.

Tindakan ekonomi spekulatif-irrasioanl merupakan tindakan berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagi sosiologi, tindakan ekonomi dianggap juga sebagai bentuk tindakan sosial, karena dalam tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi terdapat juga hubungan sosial seperti memperhatikan tingkah laku orang lain, saling bertukar pandangan, berbicara, berjabat tangan, mengucap salam atau memberi senyuman. Menurut ekonomi, tindakan ekonomi berkaitan dengan selera, kualitas dan harga barang dan jasa.

Selain itu, ekonomi memberikan sedikit perhatian pada konsep kekuasaan karena tindakan ekonomi dipandang sebagai pertukaran diantara yang sederajat. Sememntara itu, sosiologi cenderung memberikan tempat yang lebih luas dan mendalam kepada dimensi kekuasaan. Merujuk kepada weber yang menegaskan bahwa "adalah penting untuk memasukkan krteria kkuasaan terhadap kontrol dan wewenang mengambil keputusan (verfuegungsgewalt) dalam konsep sosiologis dari tindakan ekonomi.

3. Hambatan pada Tindakan Ekonomi

Dalam pandangan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan ekonmi dibatasi pada selera dan kelangkaan sumberdaya dan teknologi sehingga ada pemaksimalan pemanfaatan dan

keuntungan, secara prinsip dengan mudah memprediksi tingkah laku aktor. Dari sosiologi tidak hanya memperhatikan dari kelangkaan sumberdaya tetapi juga dari pengaruh aktor-aktor lainnya, apakah aktoraktor itu akan mempermudah, memperlancar, menghambat, atau membatasi tindakan ekonomi di dalam dunia pasar. Sebagaimana yang kita ketahui tindakan ekonomi dalam pandangan sosiologi tidak berada pada ruang hampa udara yang di dalamnya tidak ada hubungan sosian antara individu, sebaliknya tindakan ekonomi terjadi dengan adanya hubungan sosial antara individu yang berada di dalamnya.

Dalam suatu tindakan ekonomi yang dilakukan orang biasanya terdapat suatu kerjasama, kepercayaan, dan jaringan. Sebaliknya, kadang kala dalam tindakan ekonomi memunculkan perselisihan, pertengkaran, ketidakpercayaan, bahkan sampai pemutusan hubungan. Contoh, seorang pengrajin benang sutra di Sempangge, Kab. Wajo memiliki hubungan bisnis dengan pedagang sutra. di mana hubungan yang terjalin diantara keduanya bukan hanya hubungan bisnis semata, akan tetapi terdapat juga hubungan sosial. Misalnya, ketika perayaan Idul Fitri keduanya saling mengadakan kunjungan untuk melakukan silatuhrahmi sesama muslim. Atau sebaliknya, dua orang pengusaha melakukan hubungan bisnis namun hubungan ekonomi itu tidak berlangsung lama. Karena salah satunya menghilangkan kepercayaan atau dengan kata lain melakukan penyimpangan yang merugikan pihak yang satunya dan hal itu diketahui oleh pihak tersebut. Pada akhirnya hubungan bisnis antara kedua diputuskan karena adanya kekecewaan salah satu pihak. Perselisihan yang terjadi dalam dunia bisnis karena ketidakmampuan menjaga kepercayaan yang dimiliki antara dua belah pihak. Yang selanjutnya akan mempengaruhi jaringan dan ruang gerak bisnisnya semakin sempit bahkan bisa tertutup.

4. Hubungan Ekonomi dan Masyarakat

Para ekonom memusatkan kajian pada pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi, sementara masyarakat hanya dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar dan sesuatu yang telah ada. Menurut sosiologi, ekonomi dipandang sebagai bagian internal dalam masyarakat. Sosiologi selalu memandang sessuatu secara holistik, melihat suatu kenyataan saling terkait antar berbagai faktor. Sehingga sosiologi ekonomi memusatkan perhatiannya pada:

- a. Analisis sosiologis terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga atau bagaimana terbentuknya kepercayaan dalam tindakan ekonomi bisa juga berbentuk perselisihan.
- b. Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi, atau politik.
- c. Studi tentang perubahan institusi dan para meter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat, contohnya semangat kewirausahaan di kalangan santri, kapital budaya (cultural capital) pada masyarakat nelaya, atau etos kerja di kalangan pekerja tambang.

Pengaruh ekonomi dalam kehidupan sosial sangatlah jelas terlihat yakni bagaimana ekonomi membentuk perilaku atau tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sebagai individu yang berinteraksi menggunakan ekonomi sebagai salah satu alat untuk berinteraksi yang kemudian termanifestasikan dalam proses tukar-

menukar atau jual-beli dengan menggunakan alat tertentu yang biasa kita kenal dengan nama uang.

5. Tujuan Analisa

Ekonomi dan sosiologi memang berbeda dalam memandang suatu kenyataan namun antara keduanya saling terkait dan menimbulkan hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi. Seperti dalam bagian ini, ekonomi dan sosiologi mempunyai perbedaan dalam menganalisa suatu pernyataan, karena keduanya memang memiliki pandangan yang berbeda. Ekonomi mempunyai kecenderungan untuk melakukan prediksi dan eksplanasi, serta sangat sedikit membuat deskripsi. Maksudnya, ekonomi itu selalu cenderung melakukan suatu ramalan mengenai masa depan disertai dengan penjelasan tentang hubungan pengaruh yang akan timbul antara variabel tersebut. Ekonomi melihat bagaimana tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan tersebut biasanya berada pada pola interaksi ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sosiologi justru lebih pada deskripsi dan eksplanasi, sementara prediksi sangat jarang digunakan. Dalam artian bahwa sosiologi memiliki kecenderungan melihat suatu kenyataan/fenomena lebih mendalam, menganalisa jauh kedalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi, ada apa dibalik kenyataan itu, dan melihat tembus terhadap realita yang terjadi. Deskripsi analitik sangat sering digunakan oleh sosiolog untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi.

6. Penerapan Metode

Ekonomi yang cenderung menggunakan prediksi maka metode yang cocok digunakan adalah penerapan hipotesa dan penggunaan modelmodel dalam bentuk matematik. Ekonomi cenderung mencoba menerapkan hipotesis berdasarkan prediksinya. Dengan demkian, ekonomi cenderung menggunakan data resmi atau data sekunder dan tidak mempunyai data sendiri.

Sementara sosiologi menggunakan metode yang berbeda satu sama lain seperti hermeneutik, etnografi, dan fenomenologi termasuk metode historis dan perbandingan. Biasanya para sosiolog melakukan pengumpulan data sendiri di lapangan. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang bebas nilai tidak serta merta memberikan label dan sosiologi melihat bahwa dalam proses ekonomi terdapat interaksi sosial. Sosiologi dalam metodenya menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder

B. Teori Sosiologi Sebagai Pendekatan

Salah satu pendekatan sosiologi adalah teori sosiologi. Teori merupakan alat untuk melakukan analisis. Dalam sosiologi, teori telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pembahasan ini kita hanya membatasi empat teori saja, dua teori mikro (Teori Interasionisme Simbolisdan Teori Pertukaran) dan dua teori makro (Teori struktural fungsional dan Teori Struktural Konflik). Teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori struktural fungsional,

Teori ini menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur seperti persahabatan, organisasi, dan masyarakat akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi.

Asumsi teori struktural fungsional:

- a. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai element yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil
- b. Element-element terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik.
- c. Setiap element dalam struktur memiliki fungsi yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem.
- d. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya.

2. Teori Struktural Konflik

Teori ini menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dan element-element pembentukan struktur. Teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai element yang berbeda, yaitu motif, maksud, kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menimbulkan terjadinya disintegrasi, konflik dan perpecahan.

Asumsi Teori Struktural Konflik:

- a. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terdapat di mana-mana.
- b. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, memperlihatkan pertikaian dan konflik; konflik sosial terdapat di mana-mana.
- c.Setiap element dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
- d. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya dari orang lain.

3. Teori Interasionisme Simbolis

Teori ini memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi oleh berbagai simbol.

Asumsi Teori Interasionisme Simbolis:

Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol,.Penekanan pada struktur oleh dua teori makro yang dibahas sebelumnya, yaitu struktural fungsional dan struktural konflik, telah mengabaikan proses interprelatif di mana individu secara aktif mengkontruksikan tindakan-tindakannnya dan komunikasi simbol (Johson, 1986: 37).

- a. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol.
- b. Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi.
- c. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran (role taking).
- d. Masyarakat terbentuk, bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan menusia untuk berfikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri dan untuk melakukan evaluasi.

4. Teori Pertukaran.

Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang menukar ganjaran atau hadiah, adapun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran.

Asumsi Teori Pertukaran:

- a. Manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi.
- b. Perilaku pertukaran terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain
 - Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan tersebut.

c. Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlbat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.

BAB 3. PRODUKSI (PRODUCTION)

A. Pengertian Produksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil; penghasilan. Secara etimologi, kata produksi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu *Production*. Dalam Buku Sosiologi Ekonomi Damsar dan Indrayani (2016:67) menyebutkan bahwa terdapat dua makna lain dari produksi yaitu hasil dan pembuatan. Produksi mencakup segala kegiatan, termasuk prosesnya, yang dapat menciptakan hasil, penghasilan dan pembuatan.

Definisi kegiatan Produksi sendiri sudah pasti dikaitkan dengan suatu produk. Dalam kata lain, kegiatan produksi adalah suatu produk karena pada hakikatnya kegiatan produksi pada akhirnya akan menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa. Melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Produk didefinisikan sebagai: satu, barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Dua, benda atau yang

bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil kontruksi. Tiga, hasil; hasil kerja.

Dari Definisi Produk yang dilansir dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI), dapat dipahami bahwa produk berkaitan dengan suatu proses yang bernama kerja. Pandangan para peneruka sosiologi tentang produksi seperti Karl Marx dan Emile Durkheim dalam Damsar dan Indrayani (2016:68-67) yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah; kerja. Melalui kerja, manusia menjadi produsen. Emile Durkheim menyetujui dan menambahkan bahwa dalam kerja selalu menggunakan konsep pembagian kerja yang dibagi menjadi 2 tipe, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem produksi itu saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi, baik itu barang/jasa yang dihasilkan seperti produk, dan usaha untuk menghasilkan produk tersebut dengan bekerja untuk menciptakan kegunaan.

1. Produksi dalam Kajian Sosiologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesa (KBBI), Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangna masyarakat; ilmu tentang strukrul sosial, proses sosial, dan perubahannya. Dalam kata lain, sosiologi adalah hubungan antara manusia dengan manusia, untuk menciptakan sebuah proses sosial dalam hal ini kegiatan ekonomi. Dari pengertian diatas, terlihat bahwa sosiologi dan produksi sebagai suatu proses untuk medapatkan barang dan jasa yang pada akhirnya disebut produk itu saling berkaitan.

Seperti yang disebutkan oleh peneruka sosiologi seperti Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber dalam Damsar dan Indrayani (2016:6871) Karl Marx yang menyebutkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain adallah kerja, Emile Durkheim dalam bukunya *The Division Of Labor In Society* menjelaskan tentang perubahan sosial dan mendiskusikan tentang dua tipe masyarakat, mengenai pembagian kerja baik bersifat solidaritas mekanik ataupun organik, dan Max Weber dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (1958/2000) melihat hubungan *elective affinity* yang pada intinya Weber menyebutkan bahwa agar setia terhadap pekerjaan, berprestasi dalam pekerjaan, membatasi konsumsi dan mempunyai gaya hidup yang rasional dan sitematis adalah harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam bekerja.

Melalui pandangan mereka, dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi merupakan proses yang diorganisasi secara sosial di mana barang dan jasa diciptakan. Dalam kaitan tersebut, 3 peneruka sosiologi itu menambahkan bahwa dalam kaitan itu, ada fonomena dan kenyataan yang menjadi fokus kajian sosiologi tentang produksi.

2. Produksi Sepanjang Umat Manusia

Dalam Buku "Pengantar Sosiologi Ekonomi' Damar dan Indrayani (2016:74) menyebutkan bahwa ada tiga bentuk masyarakat manusia dalam kegiatan produksi, yaitu masyarakat prakapitalis, masyarakat kapitalis, dan masyarakat pascakapitalis.

a. Produksi Pada masyarakat Prakapitalis

Melihat dari tinjauan bahasa (etimologi), kapitalis berasal dari kata "capital", yang akar katanya dari kata latin, caput, berrati "kepala" yang artinya dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Sedangkan menurut Berger dalam (1990:21) mengacu pada pemilik "kapital"; suatu kegiatan ekonomi yang ditujukan pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran.

Menurut Polanyi dan kawan-kawan ([1957] 1971:43,68) ekonomi dalam masyarakat prakapitalis melekat dalam institusi sosial, agama, dan politik. Maksudnya adalah fenomena seperti perdagangan, pasar, dan uang diilhami oleh tujuan selain mencari keuntungan atau membuat laba. Pada masyarakat prakapitalis, mekanisme pasar tidak boleh mendominasi kehidupan ekonomi; oleh sebab itu permintaan dan penawaran bukan sebagai pembentuk harga tetapi lebih kepada tradisi atau otoritas politik.

Dalam buku Damar dan Indrayani (2016:75-78), masyarakat prakapitalis dibagi dalam 2 jenis, yaitu antara lain, *1*) Masyarakat yang belum tersentuh revolusi pertanian *2*) Masyarakat yang sudah tersentuh revolusi pertanian. Dikatakan masyarakat prakapitalis dibagi menjadi 2, karena masyarakat prakapitalis bukan lah masyarakat yang homogen dibuktikan dalam penjelasan Polanyi bahwa masyarakat prakapitalis diatur dalam kerumahtanggaan atau (householding).

Masyarakat yang belum tersentuh revolusi pertanian merupakan kelompok kecil yang hidup berpindah-pindah berkelana mencari makanan melalui meramu, menangkap ikan, berburu, berladang pidah, dan beternak. Di indonesia, banyak masyarakat yang belum tersentuh revolusi pertanian seperti, di Pedalaman Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Pedalaman Sumatera, Pedalaman kalimantan, dan di Pedalaman papua.

Sementara masyarakat yang sudah tersentuh oleh revolusi pertanian, merupakan kelompok masyarakat yang hidup dari sistem sosial ekonomi pertanian. Dalam kata lain, masyarakat ini sudah mulai mnegenal pertanian dan bisa disebut sebagai masyarakat agraris. Berbeda dengan masyarakat yg belum tersentuh pertanian, masyarakat ini sudah hidup menetap, membuat pemukiman, dan mengembangkan lahan

pertanian danmengembangkan gaya hidup baru/ meninggalkan gaya hidup seperti masyarakat yang belum tersentuh oleh revolusi pertanian.

Perbedaan antara masyarakat yang sudah tersentuh revolusi pertanian dan belumm cukup jauh perbedaannya. Barang dan jasa yang di produksi nya pun berbeda. Pada masyarakat prakapitalis yang belum tersentuh oleh pertanian mereka meramu hasil ramuan, memperoleh ikan/hewan buruan, memanen hasil ladang dan menghasilkan peralatan kerja seperti tombak, busur, dan anak panah. Berbeda dengan masyarakat yang belum tersentuh revolusi industri mereka memproduksi berbagai hasil pertanian, berbagai kerajinan rumah tangga, anyaman, berbagai tenunan kain untuk keperluan sandang, serta berbagai peralatan kerja tukang (besi) yang relatif canggih dibandingkan yang belum tersentuh revolusi pertanian.

b. Produksi Pada Masyarakat Kapitalis dan Pascakapitali

Pembahasan masyarakat kapitalis dan pascakapitalis tidak dipisah, sebab karena kedua masyarakat tersebut memiliki basis yang sama, yaitu landasan ekonomi industri. Namun keduanya dapat dibedakan berdasarkan sistem fordisme dan pasca-fordisme.

Di pembahsan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa masyarakat kapitalis adalah masyarakat dalam kegiatan ekonominya ditujukan untuk pasar dan untuk menghasilkan laba serta untuk mengakumulasi modal melalui pertukaran. Dalam kata lain, ekonomi ini berfokus pada sikap untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Masyarakat Kapitalis dan Pascakapitalis cukup jauh berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada landasan ekonomi industri yag berdasarkan pada Fordisme atau pasca-Fordisme (post-Fordism.). di mana

masyarakat kapitalis berhubungan dengan sistem fordisme, sedangkan masyarakat pasca kapitalis berkaitan dengan sistem pasca-fordisme.

- A. Menurut George Ritzer dalam Damsar dan Indrayani (2002) serta Ritzer dan Goodman (2003:200-201) menyebutkan bahwa fordisme merupakan gagasan, prinsip, dan sistem yang ditumbuhkembangkan Henry Ford. Adapun ciri ciri dari fordisme meliputi :
 - ✓ Produksi Massal untuk produksi sejenis
 - ✓ Penggunaan teknologi yang tidak fleksibel
 - ✓ Adopsi rutinitas kerja standar
 - ✓ Peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala serta penghapusan skill, intensifikasi, dan homogenitas kerja
 - ✓ Pertumbuhan pasar bagi item produksi massal, yang menimbulkan homogenisasi pola konsumsi
 - ✓ Meningkatnya pekerja massal dan serikat pekerja yang birokratis
 - ✓ Negosiasi serikat pekerja mengenai keseragaman upah berkaitan erat dengan keuntungan dan produktivitas
 - ✓ Kenaikan permintaan atas kenaikan suplainproduk yang diproduksi secara massal berkaitan dengan Unionisasi, menyebabkan kenaikan upah
 - ✓ Pasar untuk produk dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi
 - ✓ Lembaga pendidikan umum menyediakan tenaga kerja massal

B. Pasca Fordisme

Pasca fordisme muncul akibat kemerosotan fordisme pada tahun 1973 dengan diawali krisis minyak bumi dan diikuti dengan penurunan industri mobil Amerika serta berkembangnya industri mobil Jepang sehingga menjadi pesaing potensial bagi produk mobil Amerika. Kemunculan pasca-fordisme ditandai oleh:

- ✓ Minat terhadap produk massal menurun, minat terhadap produk khusus meningkat
- ✓ Produk yang lebih terspesialisasi memerlukan jangka waktu yang lebih pendek
- ✓ Produksi yaang lebih fleksibel menjadi menguntungkan dengan datangnya teknologi baru
- ✓ Teknologi baru memerlukan tenaga kerja yang selanjutnya mempunyai keterampilan yang berbeda dan pendidikan yang lebih baik
- ✓ Produksi harus dikontrol melalui sistem yang lebih fleksibel

BAB 4. DISTRIBUSI (DISTRIBUTION)

A. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa Inggris distribution, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya to distribute, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadily, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mmengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi, berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. di sini tidal ada penegasan bahwa produksi sebagai proses yang menjembatani menuju proses konsumsi.

Bagaimana para ahli memahami konsep distribusi? Para ahli ekonomi klasik menjelaskan distribusi sebagai alokasi nilai-niali langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya

dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga bernilai langka. Dengan kata lain, sesuatu yang memiliki nilai-nilai langka, biasanya dalam bentuk barang dan jasa, memperoleh nilai (sifat) kelangkaan tersebut karena dikaitkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan tenaga kerja, kepital, tanah, atau organisasi.

Misalnya emas sebagai barang langka tidak terdapat pada setiap tempat. Jika emas terdapat di suatu tempat, maka pada umumnya, untuk mendapatkannya perlu aktivtas yang menggunakan tenaga kerja, kapital, tanah, atau organisasi. Karena nilai kelangkaan dari sesuatu tersebut maka ia butuh atau perlu dialokasikan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran tersebut dilakukan melalui pasar.

Bagi sosiolog, proses yang dikatakan ekonomi tersebut terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial interpersonal. Jadi distribusi dapat dimengerti sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga menunjuk suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen atau proses konsumsi. Dengan demikian, distribusi merupakan proses yang mengentarai produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya.

1. Pandangan Para Pemuka Sosiologi Tentang Distribusi

Para tokoh teori sosiologi klasik telah berbicara tentang distribusi. Sudut pandang dan isi teori yang dikembangkan oleh para tokoh teori tersebut beragam. Beberapa pemikiran dari tokoh teori yang akan akan didiskusikan adalah pemikiran dari tokoh teori yang akan didiskusikan adalah Karl Marx, Georg Simmel, Max Weber, dan Karl Polanyi.

A. Karl Marx (1818-1883)

Beberapa karya Karl Marx berhubungan dengan penjelasan tentang aspek-aspek pasar seperti uang, transportasi, dan perdagangan. Dalam Capital: A Critique of Political Economy (1867/1967), Marx menjelaskan sirkulasi komoditi. Ia melihat 3 tipe sirkulasi komoditi yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Sirkulasi komoditi yang sangat sederhana dialami umat manusia adalah tipe K – K yaitu syary komoditi ditukar langsung dengan komoditi lainnya, misalnya seorang pertani menukarkan sesumpit jagung dengan sejerat ikan kepada seorang nelayan. Tipe ini, dikenal juga dengan barter, merupakan bentuk pertukaran komoditi yang pertama dalam sejarah umat manusia. Dalam tipe ini para aktor melakukan interaksi sosial dan mereka dapat saling mengontrol perilaku mereka. Bentuk lanjut dari tipe pertama ini adalah tipe K-U-K yaitu komoditi dikonversikan ke dalam uang, kemudian uang dikonversikan lagi ke dalam komoditi, misalnya nelayan menjual hasil tangkapannya kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memberi beras. Dalam tipe kedua ini, uang digunakan oleh aktor sebagai sarana konversi. Para aktor, seperti juga dalam tipe pertama, dapat mengembangkan jaringan sosial diantara sesamanya secara spontan dan dapat saling mengontrol perilaku di antara mereka. Kedua tipe sirkulasi yang disebut barusan hanya terdapat dalam masyarakat pra-kapitalis.

Dalam masyarakat kapitalis, tipe sirkulasi komoditi berubah menjadi U-K-U yaitu uang digunakan untuk membeli komoditi dijual untuk memperoleh uang. Uang dalam tipe ketiga ini merupakan modal. Ia digunakan untuk membeli sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi. Uang, yang digunakan dalam masyarakat kapitalis, telah membuat komoditi dapat dipertukarkan tanpa kehadiran para aktor pada suatu

tempat dan waktu yang sama. Ini berarti, menurut Marx, komoditi, merupakan hasil dari aktifitas produktif dan sekaligus sebagai aspek kemanusiaan dari para aktor, tidak lagi dapat dikontrol oleh aktor dalam jaringan hubungan sosial. Segala sesuatu dapat dibeli melalui uang, termasuk harkat martabatnya sebagai manusia. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah aktor merasa terasing terhadap diri dan dunia sosialnya.

Bagi Marx, transportasi dan perdagangan, seperti juga aspekaspek lain dari masyarakat muncul dari fondasi produktifnya (1848, 1857-58, 1867). Transportasi merupakan suatu konsekuensi, bukan sebagai suatu sebab dari hubungan produksi. Demikian pula, perdagangan ditentukan oleh sifat dari produksi.

B. George Simmel (1858-1918)

Simmel tidak langsung meletakkan dasar dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan pemikiran sosiologi tentang distribusi, namun ia telah menyentuh salah satu aspek dari distribusi, yaitu uang. *The Philosophy of Money* (1907/1978) merupakan karya monumental sosiologi Simmel dan sebagai buku rujukan utama dalam memahami sejarah perkembangan uang dari sudut sosiologi.

Dalam bukunya tersebut, Simmel mulai dengan diskusi tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Kemudian dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap "inner world" dari aktor dan terhadap budaya secara umum. Dalam tesisnya tentang hubungan antara nilai dan uang, ia menjelaskan bahwa orang membuat nilai dengan menciptakan objek, memisahkan diri mereka sendiri terhadap objek yang diciptakan, dan kemudian mencari jalan keluar terhadap jarak, rintangan dan kesulitan yang muncul dari objek yang diciptakannya

tersebut (Simmel, 1907/1978:66). Kesulitan utama dalam memperoleh suatu objek adalah nilai objek itu sendiri. Menurut Simmel, nilai dari sesuatu berasal dari kemampuan orang menempatkan diri mereka sendiri pada jarak yang tepat terhadap objek. Sesuatu yang sangat dekat, sangat mudah diperoleh bukan sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Sebaliknya, sesuatu yang sangat jauh, sangat sulit, atau hampir tidak mungkin memperolehnya juga bukan sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Sebaliknya, sesuatu yang sangat jauh, sangat sulit, atau hampir tidak mungkin memperolehnya juga bukan sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Dengan demikian, sesuatu yang sangat bernilai bukanlah sesuatu yang sangat jauh atau juga bukan sesuatu yang sangat dekat. Diantara faktor-faktor yang terlibat dalam jarak suatu objek dari seorang aktor adalah kesulitan terlibat di dalamnya, kelangkaannya, dan kebutuhan mengorbankan sesuatu yang lain untuk mencapainya. Orang mencoba menempatkan diri mereka sendiri pada jarak yang tepat dari objek, yang mestinya mampu diperoleh, tetapi tidak begitu mudah mencapainya.

Dalam konteks nilai secara umum, Simmel membicarakan uang. Dalam realitas ekonomi, uang melayani baik untuk menciptakan jarak terhadap objek juga memberikan sarana untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dalam masyarakat modern, nilai uang melekat pada objekobjek. Objek tersebut memiliki jarak dengan kita; kita tidak dapat memperoleh mereka tanpa uang dari milik kita sendiri. Kesukaran dalam memperoleh uang, oleh karenanya, objek menjadi bernilai pada kita. Pada waktu yang sama, sekali kita mendapatkan cukup uang, kita mampu untuk menghilangkan jarak antara diri kita sendiri dan objek.

Dalam proses penciptaan nilai, uang memberikan basis bagi perkembangan pasar, ekonomi modern, dan masyarakat kapitalis. Hubungan-hubungan sosial pada mulanya mempunyai makna kualitatif, dengan proses penciptaan nilai melalui uang, sekarang ia harus dipahami dalam bentuk kuantitatif. Aktor merasakan kehidupan sosialnya sebagai sesuatu yang berada di luar dari dan memaksa dirinya. Dunia sosial dirasakan sebagai suatu problema aritmatika. Di samping uang mereifikasi dunia sosial tetapi juga menciptakan peningkatan dalam rasionalisasi dunia sosial.

Beberapa dampak perkembangan ekonomi uang terhadap individu dan masyarakat adalah munculnya sinisme dan kebosanan. Segala aspek kehidupan dapat diperjual belikan melalui uang. Kita dapat membeli kekuasaan, kecantikan, kepercayaan, atau intelegensi semudah kita dapat membeli pisau, alat kecantikan dan buku. Dalam masyarakat Indonesia, sinisme ini terlihat dalam kata-kata "plesetan" seperti kasih uang habis perkara untuk KUHP atau semua utusan meluruskan uang tunai untuk Sumut. Sedangkan sikap kebosanan muncul dari sesuatu yang sebelumnya merupakan fenomena kualitatif sekarang menjadi fenomena kuantitatif: segala sesuatu dapat diukur secara kuantitatif dengan uang. Dari sisi lain, menurut Simmel, itu berarti pula, uang mereduksi semua nilai kemanuiaan ke dalam istilah moneter (1907/1978: 356)

Ekonomi uang menciptakan peningkatan perbudakan individual. Individu dalam masyarakat modern menjadi terisolasi dan teratominisasi. Ia tidak melekat dalam kelompoknyam individu berdiri sendiri dalam menghadapi peningkatan dan perluasan budaya objektif yang memaksa. Individu dalam masyarakat modern diperbudak oleh

suatu budaya objektif masif. Bagi Simmel, uang selain mengandung instrumen impersonal juga mempunyai aspek pembebasan. Dengan putusnya hubungan-hubungan personal dalam lingkungan tradisional, uang memberikan kepada setiap individu kebebasan memilih kerangka dan kerabat kerja dalam pertukaran ekonomi.

C. Max Weber (1864 – 1920)

Max Weber merupakan sosiolog yang paling banyak mencurahkan perhatiannya dibandingkan peletak dasar lainnya terhadap distribusi dalam bentuk pertukaran di pasar. Menurut Weber, ekonomi (Sozialokonomik) seharusnya merupakan ilmu yang luas. Dalam Economy and Sosiety ([1992]1978:635), Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat kompetisi, meskipun hanya unilateral, bagi kesempatan dari pertukaran di antara suatu keberagaman partai-partai yang potensial. Kumpulan orang secara fisik pada suatu tempat, seperti pada tempat berdagang lokal, pekan raya (pasar jarak jauh), atau pertukaran (pasar perdagangan) hanya merupakan salah satu pembentuk pasar yang utama.

Menurut Weber tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Dalam taha pertama, rekanan yang potensial diarahkan pada tawaran mereka terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas atau pesaing rekaan, dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada tahap ini barter yang lengkap hanya terjadi dengan rekanan yang dekat. Pertukaran menunjukkan "pola dasar dari semua tindakan sosial rasional" dan merupakan, misalnya, "suatu hal yang sangat dibenci pada setiap sistem dari etika fraternal".

Weber juga melihat elemen perebutan atau konflik dalam pasar. Dia menggunakan istilah perebutan pasar (market struggle) ketika ia menjelaskan pertempuran antara seseorang dengan lainnya di pasar. Konsep persaingan digunakannya ketika menjelaskan konflik yang damai sejauh ia merupakan suatu usaha formal yang damai untuk memperoleh pengontrolan terhadap kesempatan dan keuntungan yang diharapkan oleh yang lainnya. Sedangkan pertukaran di sisi ini dilihatnya sebagai suatu kompromi kepentingan dari bagian pada partai-partai, selama barang-barang atau keuntungan yang lain sebagai kompensasi timbal balik ([1922]1978).

D. Karl Polanyi (1886-1964)

Menurut Polanyi dan kawan-kawan (1957-1971:43,68) ekonomi dalam masyarakat pra industri melekat dalam istitusi sosial, politik, dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar diilhami tujuan selain mencari keuntungan. Kehidupan ekononmi dalam masyarakat pra-industri diatur keluarga subsistensi, resiprositas, dan redistribusi. Keluarga adalah suatu sistem di mana barang-baran diproduksi dan disimpan dikalangan anggota kelompok untuk pemakaian mereka sendiri (self-sufficient system). Dalam masyarakat petani tradisional misalnya, hampir seluruh kebutuhan kehidupan diproduksi dan dikonsumsi sendiri (subsistensi). Jika sebagian produksi dijual bukanlah dimaksud untuk sebagai modal atau tambahan bagi pengembangan ekonomi keluarga, tetapi ia digunakan untuk membeli kebutuhan kehidupan lainnya seperti pakaian. Sedangkan resiprositas dan redistribusi akan dijelaskan di bawah.

Sedangkan dalam masyarakat modern, sistem redistribusi yang disebut di atas tidak lagi dominan, ia digantikan oleh ekonmi pasar

yang ditandai dengan "pasar yang mengatur dirinya sendiri". Dalam masyarakat ekonomi pasar ini, barter tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, yang menggantikan fungsinya. Penggunaan uang sebagai alat tukar muncul karena ada kebutuhan benda-benda dapat dihitung untuk tujuan tukar-menukar secara tidak langsung. Selain itu, uang itu sendiri di samping tenaga kerja dan tanah, dipandang sebagai komoditi rekaan (the commodity fiction) yang dapat diperjualbelikan di pasar sebagaimana produk biasa layaknya.

Mekanisme pasar tidak dibolehkan untuk mendominasi kehidupan ekonomi; oleh karena itu permintaan dan penawaran bukan sebagai pembentuk harga tetapi lebih kepada tradisi atau otoritas politik. Sebaliknya dalam masyarakat modern, "pasar yang menetapkan harga" diatur oleh suatu logika baru, yaitu logika yang menyatakan bahwa tindakan ekonomi tidak mesti melekat dalam masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi terstruktur atas dasar pasar yang mengatur dirinya sendiri dan secara radikal melepaskan dirinya dari institusi sosial lainnya untuk berfungsi menurut hukumnya. Jadi ekonomi dalam tipe masyarakat seperti ini, ditegaskan lagi, diatur oleh pasar, yang mana berperilaku dalam suatu cara tertentu untuk mencapai perolehan yang maksimum. Pada bahagian selanjutnya tentang hal ini akan didiskusikan secara lebih dalam.

E. Talcott Parsons (1902-1979) dan Neil J. Smelser

Dalam membahas fenomena ekonomi dan masyarakat, seperti telah disinggung sebelumnya, Parsons dan Smelser (1956) menggunakan skema AGIL, yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pola pemeliharaan laten (L). Adapun yang dimaksud

adaptasi (A) adalah tujuan-tujuan yang melembaga dan sah misalnya, produktifitas ekonomi, peperangan tidak direalisasikan secara otomatis, dan masyarakat harus mengeluarkan sejumlah energi untuk mencapainya cadangan dari sarana-sarana masyarakat. Fungsi adaptasi terstruktur dalam ekonomi.

Pencapaian tujuan (G) merupakan fungsi yang merujuk kepada cara di mana masyarakat menciptakan tujuan khusus yang dilegitimasi oleh nilai-nilai yang dominan dan menggerakan penduduk untuk mencapai tujuan tersebut. Subsistem ini diidentifikasikan sebagai society's polity (politik masyarakat), yang dibentuk sebagian besar tetapi tidak eksklusif oleh lembaga pemerintahan.

Integrasi (I) berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur segala sesuatu agar tidak terjadi pertentangan di antara individu-individu, kelompok, atau subsistem yang ada, sehingga terjadi keseimbangan dalam sistem secara keseluruhan. Fungsi integrasi ini dipenuhi oleh sistem hukum

Pola pemeliharaan laten dan sistem managemen (L) merupakan suatu sistem nilai dan kepercayaan yang beroperasi sebagai rancngan yang melegitimasi dan berkelanjutan bagi institusi utama dan sebagai pola motivasional yang terstruktur bagi anggota-anggotanta. Bagian dari energi yang melembaga dari mayarakat bergerak ke arah pemeliharaan konsistensi dan integritas dari nilai-nilai yang ada dan memberikan jalan keluar bagi ketegangan yang muncul dalam hubngan keselarasan di antara mereka. Institusi khusus yang berfungsi sebagai pemeliharaan laten adalah agama, ilmu pengetahuan, keluarga, dan dan pendidikan.

Parsons dan Smesler melihat uang, salah satu aspek dari pertukaran pasar, memainkan peran penghubung antara produksi dan pertukaran. Mereka menjelaskan hubungan antara keduanya dengan memperhatikan baik pemikiran ekonomi klasik maupun sosiologi. Senada dengan pemikiran ekonomi klasik, uang merupakan generalisasi dari daya beli yang mengontrol keputusan bagi pertukaran barang dan Sedangkan hubungan dengan pemikiran sosiologi, mensimbolkan sikap dan memuat prestise (1956:70-71). Misalnya, keputusan untuk menerima suatu pekerjaan merupakan suatu keputusan keluarga dalam mencapai tujuan dari pemeliharaan laten (LG). Dengan kata lain, ada proses pemilihan pekerjaan mana yang sesuai dengan status dan prestise yang dimiliki. Anggota keluarga bangsawan, misalnya, tidak semudah keluarga "wong cilik" dalam mengambil keputusan untuk bekerja sebagai buruh harian di suatu pabrik. Sedangkan keputusan untuk memberikan pekerjaan merupakan keputusan ekonomi dalam mencapai tujuan adaptasi (AG). Maksudnya, keputusan tersebut berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia bagi kelangsungan dan kesinambungan (suatu lembaga) ekonomi. Melalui upah yang diberikan dalam bentuk uang, suatu lembaga ekonomi memperoleh imbalan layanan tenaga kerja.

Penjelasan Parsons da Smelser tentang pasar terlihat ketika mereka membahas bagaimana pasar dipenuhi bukan hanya oleh kepentingan pemerintah (1956:76-78). Dengan kata lain, pasar tidak hanya dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permitaan tetapi juga oleh campurtangan pemerintah. Sebagai ilustrasi, kebijakan pemerintah Indonesia mengontrol nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kemudain kontrol itu dilepas ketika terjadi krisis mata uang Asia

Tenggara pada 1997 dan ketika nilai rupiah jatuh pada titik yang "menakutkan" pemerintah menarik kembali tali kontrolnya.

2. Fokus Kajian Sosiologi Tentang Distribusi

Banyak fenomena yang terjadi dalam proses antara proses produksi dan konsumi. Fenomena-fenomena distribusi tersebut meliputi seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Fenomena Distribusi

Resistribusi

Resiprositas

Pertukaran

Pasar (aktor, mekanisme, ruang dan waktu)

Transportasi

Perdagangan

Kewirausahaan

Uang

Pemberian

Perusahaan

Ritel

Distributor

Dll.

3. Jenis DistribusiI

Seperti telah dijelaskan di atas, sebelum suatu barang dan jasa sampai ke tangan konsumen atau dikonsumsi setelah diproduksi terdapat proses distribusi. Ada tiga jenis distribusi yang dapat ditemukan dalam aktifitas ekonomi masyarakat, yaitu resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Selanjutnya kita diskusikan satu persatu.

a) Resiporitas

Resiporitas menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak (antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau terdapat tuntutan adat tentang resiprositas yaitu "kaba baik bahimbauan, kaba buruak bahambauan" (kabak baik dihimbaukan, kabar jelek berhamburan) yang bermakna bahwa jika ada berita yang menggembirakan (baik) seperti memanen padi maka petani pemilik sawah harus memberitahu kepada kerabat-kerabatnya tentang waktu dan tempat memanen padi sebelumnya, jika ia ingin dibantu dalam memanen padi. Sebaliknya, kerabat-kerabanya juga melakukan hal yang sama kepadanya apabila mereka akan memanen padi di sawah. Sedangkan berita buruk, misalnya tentang kematian, maka para kerabat dan kenalan datang diminta.

Pada aktifitas tersebut, berbagai pihak yang terlibat resiprositas memiliki posisi sosial yang sama, meskipun di antara mereka memiliki derajat harta kekayaan dan fungsionaris adat yang berbeda-beda. Posisi dan peranan sebagai pengundang, tuan rumah, atau pemberi dan yang

diundang, tamu, atau penerima dalam kegiatan resiprositas terjadi secara bergiliran silih berganti. Dengan kata lain siapa saja individu atau kelompok yang aktifitas atau hajat resiprositas bisa mengambil peranan dan posisi sebagai pengundang, tuan rumah atau pemberi pada suatu waktu, dan pada waktu lain dia atau mereka diposisikan atau diberi peran sebagai yang diundang, tamu atau penerima. Hubungan seperti ini terjadi apabila hubungan berbagai pihak (antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok) bersifat intim dan akrab. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan personal antara individu yang ada, bukan dalam hubungan yang impersonal. Dengan kata lain, mereka, yang terlibat dalam aktifitas resiprositas, saling kenal antara satu sama lain. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

Dari berbagai kepustakaan yang ada tentang resiprositas dapat disimpulkan terdapat dua jenos resiprositas, yaitu resiprositas sebanding (balanced reciprocity) dan resiprositas umum (generalized reciprocity). Resiprositas sebanding merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita secara setara, seringkali, langsung, dan terjadwal. Resiprositas sebanding menekankan pada apa yang diterima dari seseorang atau kelompok pada masa lampau haruslah setara dengan apa yang akan diberikan kepada orang atau kelompok pemberi. Sifat langsung ditunjukkan oleh siapa memberikan apa kepada siapa dan akan menerima apa dari siapa. Sedangkan sifat terjadwal menunjuk pada kepastian

seseorang kapan akan memperoleh pembayaran atau pembalasan atas pemberian atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Mari kita ambil contoh, dalam masyarakat Minangkabau, terutama dari daerah Pariaman, dikenal tradisi badoncek. Tradisi ini merupakan suatu bentuk resiprositas sebanding di mana orang akan menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk suatu acara, misalnya acara perkawinan atau acara mendirikan rumah. Setiap orang pada kegiatan bandocek dalam acara perkawinan, misalnya, akan diminta untuk menyebutkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada tuan rumah. Tuan rumah akan menulis jumlah uang tersebut berserta nama dari pemberinya. Penulisan itu penting dilakukan sebab pada kesempatan lain di mana jika si pemberi mengundang pada suatu acara dan ada kegiatan bandonceknya maka dia harus membayar kembali sejumlah uang yang sama dengan yang diterimanya sebelumnya. Jadi pada tradisi ini terlihat kepastian akan jumlah uang dan jadwal. Resiprositas sebanding masih banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Tradisi sambatan dalam masyarakat Jawa, tradisi julo-julo dalam masyarakat Minangkabau, atau tradisi arisan dalam berbagai masyarakat di Nusantara merupakan contoh dari resiprositas berbanding. Pada masyarakat perkotaan bisa juga ditemukan resiprositas. Pemberian kado atau hadiah pada saat ulang tahun, misalnya, bisa dilihat sebagai resiprositas sebanding jika para pelakunya saling menghadiahkan dan mencatatmya pada saat aktifitas itu berlangsung. Jadi resiprositas sebanding dapat diidentifikasikan dengan kenyataan bahwa individu dengan sengaja dan terbuka mengkalkukasi apa yang mereka berikan kepada orang lain dan secara terbuka dinyatakan sifat pengembalian yang akan diperoleh. Setiap pihak yang berinteraksi mengharapkan keutungan,

tetapi ada harapan yang jelas akan adanya keuntungan timbal-balik, dan jarang ada "ekspoitasi" (Sanderson, 2003:117-118).

Sedangkan resiprositas umum merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran, atau balasan yang setara dan langsung. Berbeda dengan resiprositas berbanding, resiprositas umum tidak menggunakan kesepakatan terbuka atau langsung antara pihak-pihak terlibat. Ada harapan bersifat umum (general) bahwa pengembalian setara atau hutang ini akan tiba pada saatnya, tetapi tidak ada batas waktu tertentu pengembalian, juga tidak ada spesifikasi mengenai bagaimana pengembalian itu dilakukan. Istilah pengembalian dalam resiprositas umum sangat samar (Sanderson, 2003:118). Dalam masyarakat etnik di Indonesia terdapat berbagai kearifan lokal yang mengandung nilai dan norma yang menyuruh orang untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa menegaskan bentuk dan waktu pengembaliannya, misalnya: "berbuat baik pada-padai berbuat buruk jangan sekali","manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang", "nan kurik kundi nan merah saga, nan baik budai nan indah basa", "hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati".

b) Redistribusi

Sahlin (1976) mendefinisikan redistribusi sebagai "pooling", perpindahan barang dan atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat kepada dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan geraan appropriasi ke

arah pusat kemudian dari pusat didistirbusikan kembali. Hal ini terjadi karena adanya komunitas politik terpusat. Dengan kata lain, individu melakukan kegiatan redistribusi karena dia menjadi anggota dalam suatu kelompok dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu, kelompok hadir sebagai organisai yang mengatur hidup individu, termasuk distribusi barang dan jasa. Kelompok sebagai suatu organisasi memiliki kewewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin atau orang yang ditunjuk. Pemimpin atau orang yang diberi amanah memegang kekuasaan inilah yang berperan penting dalam melakukan kegiatan ini. Pemimpin itu sendiri bisa mengambil dua bentuk, yaitu perseorangan dan lembaga. Perseoragan terdiri dari tokoh, pengetua, aktivis, penggiat dan sebagainya. Lembaga meliputi berbagai institusi seperti organisasi komunitas (desa, nagari, dukuh, kampung, dll), organisasi pemerintah, atau lembaga keagamaan dan adat. Misalnya pada kerajaan-kerajaan Jawa tradisional, raja unya hak untuk mengumpulkan upeti dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat akan memperoleh perlindungan keamanan maupun "berkah" dari pusat (raja). Acara sekatenan yang diadakan sekali setahun merupakan suatu contoh redistribusi yang dilakukan oleh pusat.

Apakah dalam masyarakat modern ditemukan redistribusi? Pada institusi modern, pemungutan dalam bentuk pajak, fiskal, retribusi, dan sejenisnya yang dilakukan oleh negara modern merupakan bentuk residtribusi. Pungutan tersebut selanjutnya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan, pelayanan publik (terutama kesehatan dan pendidikan), pembangunan infrastruktur, pemberian santunan, dan lainnya.

Dalam era modern, redistribusi tidak hanya dilakukan oleh negara, institusi ekonomi dan politik lainnya juga melakukan redistribusi. Perusahaan-perusahaan besar melakukan redistribusi dalam bentuk CSR (corporate sosial responsibility), CD (community development), funding bagi berbagai jenis kegiatan seperti beasiswa, penelitian, sponsor berbagai kegiatan, dan sebagainya. Perseorangan juga melakukan redistribusi dalam berbagai bentuk funding. Tokoh-tokoh yang berhasil dalam aktivitas bisnis dan politik, seperti Bill Gate (tokoh ICT) atau B.J. Habibi (poitisi) mengalokasikan harta kekayaan mereka untuk membantu berbagai kegiatan yang nirlaba.

c) Pertukaran

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Sedangkan konsep pasar (market) berakar dari kata Latin "mercatus", yang bermakna sebagai berdagang atau tempat berdagang. Dengan demikiran, terkandung tiga arti yang berbeda di dalam makna tersebut: satu, pasar dalam artian secara fisik; dua, sebagai tempat mengumpulkan; tiga, sebagai hak atas ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu tempat pasar (market place).

Dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan antara pasar sebagai tempat pasar (market place) dan pasar (market). Pasar sebagai tempat pasar merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia membeli barang dan jasa tersebut. Dalam masyarakat pra-kapitalis, menurut Sanderson (2003: 131), tempat pasar adalah tempat fisik yang terdapat di sejumlah tempat yang ditemukan dalam masyarakat. Tetapi dalam kapitalisme modern, tempat pasar adalah "tersebar", yakni, tersebar luas di seluruh masyarakat. Pembedaan tempat pasar antara masyarakat pra-kapitalis dan kapitalis

menurut pandangan Sanderson tersbeut dapat dipahami melalui perbedaan tempat pasar perkotaan modern di Indonesia. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau, tempat pasar dari pasar mingguan seperti Pakan Akaid, Pakan Sinayan, Pakan Salasa, Pakan Rabaa, Pakan Kamih, Pakan Jumat, dan Pakan Sabtu merupakan tempat pasar yang digilirkan menurut hari dalam sepekan, ditetapkan oleh musyawarah dan mufakat antara nagari yang berdekatan. Sedangkan tempat pasar dalam masyarakat perkotaan modern tersebar di berbagai tempat dengan berbagai jenis pasar seperti pasar tradisional, plasa, (mini) swalatan, (super) mall, dan sebagainya sepertin yang terdapat di kota-kota besar Indonesia (Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dll.).

Sedangkan pasar (market) dilhat oleh sosiologi sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktrur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pasar, oleh sebab itu, bisa dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Thompson et al, 1991). Mekanisme ini dipandang oleh Adam Smith sebagai "tangantangan tersembunyi" (invisible hand). Dengan kata lain, seperti kata Levacic (1991), karakteristik yang penting dari pasar, dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suau harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu

pertukaran, aktifitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunnci dalam mekanisme ini. Menurut Levacic, suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produser. Ini pada gilirannya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintan (self-adjusting mechanism of the market). Ketika permintaan naik harga cenderung meingkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan kentungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

Pertukaran dalam bentuk barter, dengan demikiran, belum bisa dikatakan sebagai pasar sepanjang aktifitas tersebut dilakukan tidak diorientasikan untuk mengakumulasikan modal, meraih keuntungan (profit-making) dan menginvestasikan kembali (sebagian) keuntungan dalam produksi untuk meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, pasar ditandai oleh pertukaran yang ditujukan untuk penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan ke dalam produksi serta harga ditetapkan pada prinsip kesimbangan antara permintaan dan penawaran.

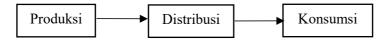
Apakah ada transaksi ekonomi yang didasarkan atas penjualan dan pembelian yang tidak melalui pasar? Dalam masyarakat yang digerakkan selain pasar, transaksi ekonomi yang disebut di atas bisa merupakan bahagian dari suatu ritual keagamaan yang wajib dilaksanakan misalnya munculnya perdagangan musiman kembang pada saat menjelang bulan ramadhan atau bahagian dari aktifitas politik misalnya "pasar kaget"

dalam rangka peringatan ulangtahun raja. Dalam msayarakat seperti ini, produksi bukan ditujukan untuk dipasarkan dan kebutuhan subsistensi mereka tidak dipenuhi melalui aktivitas tempat pasar (market place), tetapi dipenuhi melalui resiprositas dan redistribusi.

Berikut Tabel 4.1 memuat gambaran beberapa jenis distribusi yang bisa terjadi dalam proses ekonomi pada masyarakat :

Tabel 4.1 Beberapa Jenis Proses Ekonomi Distribusi

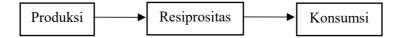
A. Proses Ekonomi Distribusi pada Umumnya



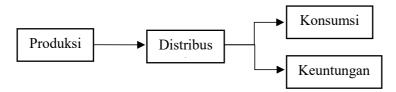
B. Proses Ekonomi Distribusi dalam Bentuk Redistribusi



C. Proses Ekonomi Distribusi dalam Bentuk Resiprositas



D. Proses Ekonomi Distribusi dalam Bentuk Pertukaran



BAB 5. KONSUMSI

(CONSUMPTION)

A. Pengertian Konsumsi

Banyak pengertian yang telah di buat oleh para ahli tentang konsumsi oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin seperti ekonomi, sosiologi, antropologi dan lainnya. Dalam bab ini kita akan merujuk pada pengertian yang di buat oleh para ahli sosiologi, salah seorang sosiolog yang merumuskan adalah Don Slater (1997). Menurut Don Slater konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu yang dapat memuaskan melihat. mereka. seperti dengan cara menonton, menikmati, menghabiskan, mendengar, memperhatikan dan lainnya. Jadi pengertian konsumsi menurut slater tersebut seuai dengan istilah mengkonsumsi seperti yang dikutip featherstone (2001) dari raymond williams, sebagai merusak (to destroy,)memakai (to use up) membuang (to waste), dan menghabiskan (to eaust)

B. Pandangan para peneluka tentang konsumsi

Para tokoh teori sosiologi klasik telah berbicara tentang konsumsi,sudut pandang dan teori yang di kembangkan oleh tokoh teori tersebut beragam.Beberapa pemikiran dari tokoh yang akan di diskusikan adalah karl Marx,Emile Durkheim,Max Weber, dan Thorstein Verben

1.Karl Marx (1818-1883)

Marx, menurut Ritzer (2004), ternyata banyak membahas konsumsi, khususnya dalam karyanya tentang komoditas, Dalam komoditas, Marx membedakan antara alat- alat produksi (*Means of Production*) dan alat-alat Konsumsi (*Means of Consumption*). Oleh sebab

itu Marx mendefinisikan alat-alat produksi merupakan "suatu komoditas yang memiliki bentuk di mana komoditas memasuki konsumsi produktif" (1884/1891:471) sedangkan alat alat konsumsi "komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas

Konsekuensi logis pembagian tersebut di atas adalah pengklasifikasikan jenis konsumsi, yaitu konsumsi subsistensi dan onsumsi mewah. Konsumsi subsistensi merupakan alat-alat konsumsi yang di perlukan (necessary means of consumption) atau "yang memasuki kelas pekerja". Dengan demikian ,seperti alat-alat konsumsi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) di pandang sebagai konsumsi subsitensi.sedangkan konsumsi mewah adalah alat- alat konsumsi mewah (luxury means of consumption), yang hanya memasuki kelas kapitalis, yang dapat di pertukarkan hanya untuk pengeluaran dari nilai surplus. Selain itu pandangan Marx tentang suprastruktur sosial budaya dibangun di atas fundamen atas infrastruktur ekonomi merupakan sumbangan penting lainnya terhadap sosilogi konsumsi. Pandangan ini menyatakan bahwa semua instuisi sosial termasuk agama, didirikan atas dasar infrasuktur ekonomi dan menyesuaikan diri dengan tuntunan dan persyaratan yang dimiliki oleh infrastruktur ekonomi tersebut.

2. Emile Durkheim (1858-1917)

Sumbangan pemikiran sosiologi Durkheim tentang konsumsi juga bisa di telusuri pada bukunya *The Division labor in Society*. Di dalam buku tersebut Durkheim menciba cari jawaban tentang apa yang memperatukan masyarakat? Menurut Durkheim,masyarakat terintegrasi karena adanya kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yaitu totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen–sentimen bersama (1964:79) merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang

memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan-kepercayaan dan pola normatif yang sama pula.

Kesadaran kolektif ternyata tida pada setiap sama masyarakat,tergantung pada tipenya. Durkheim membagi masyarakat atas 2 tipe, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dalam masyarakat berlandasan solidaritas mekanik, kesadaran kolektif meliputi keseluruhan masyarkat beserta anggotanya dan dengan intensitas tinggi seperti keterlibatan komunitas dalam menhukum orang yang menyimpang dengan mengutamakan pengunaan hukum represif. Kesadaran kolektif dalam masyarakat berlandaskan solidaritas mekanik menuntun anggotanya untuk melakukan konsumsiyang tidak berbeda antara satu dengan yang lain,seragam dalam cara dan pola konsumsi seperti pola pangan/makan, sandang /busana dan papan/perumahan.

Berbeda dengan masyarakat berlandaskan solidaritas mekanik,kesadaran kolektif pada masyarakat berlandaskan solidaritas organik telah mengalami transformasi ke dalam suatu solidaritas yang di ikat oleh pembagian kerja sehingga intensitas kesadaran kolektif hanya mencakup kalangan masyarakat terbataas yang berada pada jangkauan ruang kesadaran kolektif itu saja. Pada masyarakat berlandaskan organik karena intensitas kesadaran kolektif yang rendah dan tingginya individualisme, setiap anggota masyrakat memungkinkan tampil beda dalam cara dan bentuk konsumsi seperti perbedaan dalam bentuk arsitektur rumah, cara berbusana, atau menu yang di santap tanpa harus mencedarai kesadaran kolektif.

3. Max Weber (1864-1920)

Weber berbicara tentang konsumsi ketika ia memperlihatkan bagaimana cara konsumsi dan gaya hidup seseorang berkatan dengan etika protestan. Dengan kata lain agama protestan memberikan dorongan motivational untuk menjadi seseorang yang memiliki surau orientasi agama yang bersifat asketik dalam dunia (*inner-worldily asceticism*), yaitu suatu komitmen untuk menolak kesempatan atau sangat membatasi diri untuk menuruti keinginan jasadi atau inderawi,atau kenikmatab bersifat materialistik, termasuk cara konsumsi tertentu,demi meraih suatu tujuan spiritual yang tinggi. Max weber dalam *Economy and Society* menyatakan bahwa tindakan konsumsi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu (Weber, 1978:4).

Sedangkan tindakan sosial itu sendiri menurut weber, terdiri atas : a.zweckranationalitat/instrumentally rational action/tindakan rasioanl instrumental yaitu tindakan yang berdasarkan pertimbangan yang sadar terhaadap tujuan tindakan dan piihan dari alat yang di pergunakan

- b.wertrationalitat/value rational action/ tindakan rasional nilai yaitu suatu tindakan di mana tujuan telah ada hubungannya dengan nilai absolut dan akhir bagi individu
- c.affectual type/tindakan efektif suatu tindakan yang di dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar
- d. traditional action tindakan tradisional yaitu tindakan yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi.

4.Thorstein Veblen (1857-1929)

Pemikiran Veblen tentang sosiologi konsumsi dapat dirunut pada tulisannya *The Theory of the Leisure Class*. Veblen melihat kapitalisme industri berkembang secara barbar, karena properti privat tidak lain merupakan "barang rampasan yang diambil melalui kemenangan perang (1994:27). Sedangkan pencari kekayaan, kemengangan dan barangbarang melalui persaingan dengan tetangga adalah bagian dari "insting predator". Kapitalisme seperti ini memunculkan *abseente owner*, yaitu para pemilik modal yang tida mengerjakan apa-apa tetapi memperoleh hasil yang banyak. Untuk mencapai tujuan,para pemilik modal melakukan praktek monopoli atau oligopoli. Perkembangan ekonomi berjalan dinamis, namun kasar dan ganas karena tidak adanya aturan, keadaan ini menyengsarakan rakyat, teruatama dari kelompok tani kecil dan menengah.

Kalau kita pahami apa yang barusan di jelaskan oleh Veblen tentang *abseente owner* dan perilakunya, ternyata juga terjadi di indonesia,terutama pada paruhan terakhir dari masa pemerintahan orde baru.

Dalam situasi masyarakat seperti di jelaskan di atas tumbuh dan berkembangsuatu lapisan masyrakat yang disebut Veblen sebagai *Leisure Class.Leisure class* tumbuh dari suatu kelas masyrakat atas yang berasal dunia industri dan keuangan. *Leisure Class* ini mengembangkan suatu budaya yang di tandai oleh nafsu untuk mengejar kekayaan berup uang, dikenal dengan *percuniary culture* serta pola "konsumsi yang mencolok", yaitu pengeluaran yang sia sia untuk kesenangan semata dan

hasrat untuk menunjukan suatu posisi atau status sosial yang lebih terpandang di bandingkan dengan kalangan-kalangan yang lain.

C. Fokus Kajian Sosiologi Tentang Konsumsi

Adapun fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena konsumsi adalah seperti yang di sajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Fenomena Konsumsi

Masyarakat Konsumsi

Budaya dan Konsumsi

Perilaku Konsumen

Waktu Luang

Gaya Hidup

Fashion

Pariwara

Belanja: Sandang, Pangan, Minuman, dan Rumah

Turisme

Ideologi Konsumsi (Liberal, Kapitalis, Komunis, Islam)

Politik Konsumsi

Konsumsi dan Mobilitas Sosial

Konsumsi dan Perubahan Sosial

D. Budaya dan Konsumsi Pada Masyarakat Kapitalis

Kembali kepada pendapat Don Slater (1997) di mana konsumsi selalu dan di manapun di pandang seagai suatu proses budaya.Dalam kaitannya dengan pendapat Lury serta Douglas dan Isherwood tersebut, terdapat beberapa pemakna sosial terhadap konsumsi benda-benda dalam kehidupan sosial masyarakat pra kapitalis:

a. Konsumsi sebagai pembeda antara Kehidupan Profan dan Kehidupan Suci

Kita mulai dengan contoh tentang makna ketika bermacam-macam buah tersusun rapi dan menarik dalam keranjang kecil diletakan di atas meja makan dengan ketika buah yang sama beserta keranjang nya diletakan di bawah pohon beringin rindang

b. Konsumsi sebagai Identitas

Identitas dapat dipahami sebagai suatu pertanyaan tentang diri, yaitu siapa aku, berkait dengan ruang dan waktu sosial.Identitas memberikan pengertian seseorang tentang posisi personal (Piliang,1999). Identitas di bentuk melalui proses sosial (Berger dan Luckman,1966). Sekali suatu identitas mengkristal, ia akan di pelihara, dimodifikasi atau bahkan di ubah sama sekali melalui hubungan-hubungan sosial.Jika anda ingin memantapkan pemahaman yang telah dimiliki maka mari kita simak pendapat Jonathan Rutherford tentang hal ini, Rutherford (1990) dalam bukunya *Identity, Community, Culture, Difference* menyatakan bahwa identitas merupakan mata rantai masa lalu dengan hubungan sosial,kultural dan ekonomi di dalam ruang dan waktu suatu masyrakat hidup.Oleh karena itu identitas seseorang berkait dengan aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari kehidupan pada konteks ruang dan waktu.

c. Konsumsi sebagai Stratifikasi Sosial

Dalam glosarium pada buku materi pokok pengantar sosiologi yang ditulis Parwitaningsih, dkk, didefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan individu secara vertikal. Bagaimana konsumsi sebagai stratifikasi pada masyarakat pra-kapitalis? Seperti anda ketahui bahwa stratifikasi sosial berkait dengan perbedaan orang secara bertingkat,

berjenjang atau vertikal. Jika identitas orang-orang atau kelompok, yang di dalamnya terkandung konsep posisi dan status, berbeda secara horizontal maka di kenal hanya sebagai suatu bentuk diferensiasi sosial, tetapi jika ia suatu identitas di bedakan secara bertingkat atau vertikal maka ia telah masuk dalam bentuk stratifikasi sosial.

E. Budaya Konsumen

Untuk memahami konsep budaya konsumen,sebelum nya di perbincangkan perbedaan antara masyarakat kapitalis dan masyarakat pascakapitalis,sebagai bentuk masyarkat modern yang menjadi lokus bagi tumbuh-kembangnya budaya konsumen. Untuk mengerti budaya konsumen sebagai fenomena sosial Slater mengidentifikasikan beberapa karateristik yang dimiliki oleh budaya konsumen yaitu antara lain :

- a. Budaya Konsumen merupakan suatu Budaya dari Konsumsi

 Ide dari budaya konsumen adalah,dalam dunia modern,praktek sosial
 dan nilai budaya inti, ide-ide, aspirasi-aspirasi, dan identitas di
 definisikan dan di orientasikan pada konsumsi dari pada kepada
 dimensi sosial lainnya seperti kerja,kewarganegaraan,kosmologi
 keagamaan,peranan militer dan seterusnya
- b. Budaya Konsumen sebagai Budaya dari Masyarakat Pasar Dalam masyarakat pasar, barang-barang, jasa-jas dan pengalamanpengalaman diproduksi agar dapat di jual di pasar kepada konsumen. Dalam konteks ini, budaya konsumen berkembang sebagai bagian dari sistem kapitalis.
- c. Budaya Konsumen adalah secara Prinsip, Universal dan Impersonal Semua hubungan sosial, kegiatan dan objek secara prinsip dapat di jadikan komoditas.Sebagai komoditas di produksi dan di distribusikan dengan cara impersonal, tanpa melihat orang perorang atau secara

pribadi,di tujukan kepada siapa saja konsumen yang membutuhkan atau dibuat menjadi membutuhkan.

Budaya konsumen sering merujuk pada gagasan konsumsi masa karena ia merujuk generlasisai dari konsumsi komoditas pada seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi massa hanya salah satu bentuk dari prinsip yang lebih fundamental, yaitu gagasan untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar untuk di jual bagi khalayak umum dari pada kepada untuk diri sendiri, bagi kepentingan rumah tangga atau komunitas lokal misalnya. Oleh sebab itu budaya konsumen dilihat bersifat universal dalam masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis.

- d. Budaya Konsumen Merupakan Media Bagi Hak Istimewa dari Identitas dan Status dalam Masyarakat Pasca-tradisional Budaya konsumen bukan di wariskan seperti posisi sosial yang melekat
 - karena kelahiran dalam masyarkat tradisional, tetapi ia dinegosisai dan di konstruksi oleh individu dalam hubungannya dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman dan menonton "Live Show" di televisi jerman, terkesan bahwa melakukan perjalanan adalam rangka liburan
- e. Budaya Konsumen Merepresentasikan Pentingnya Budaya dalam Penggunaan kekuatan Modern

merupakan suatu kewajiban.

- Budaya konsumen mencakup tanda,gambaran,dan publisitas.Oleh sebab itu pula,ia meliputi estetisasi komoditas dan lingkungan seperti pengguanaan iklan, pengepakan, tata letak barang di toko, desain barang,pengguanaan etalase dan seterusnya.
- f. Kebutuhan Konsumen Secara Prinsip Tidak Terbatas dan Tidak Terpuaskan

Dalam budaya konsumen, kebutuhan yang tidak terbatas di pandang tidak hanya suatu hal yang normal tapi juga di perlukan bagi tuntunan dan perkembangan sosial ekonomi.

BAB 6. KETERLEKATAN (ATTACHMENT)

A. 'Pengertian Keterlekatan

Konsep keterlekatan telah disinggung pada Bab Pengertian dan Ruang Lingkup, terutama tentang sejarah kemunculannya. Keterlekatan, menurut Granovetter (1985), merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak hanya terbatas pada tindakan actor individual sendiri tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penetapan harga dan institusi-institusi ekonomi, yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Konsep keterekatan, sebagai review, merupakan alternative konsep dalam memahami pemikiran tentang perlaku ekonomi yang sebalumnya terlah berkembang dalam sosiologi dan ekonomi. Granovetter (1985) menemukan, dalam literature sosiologi dan ekonomi, perdebatan antara kubu *oversosiaoized*, yaitu tindakan ekonomi yang kultural dituntun oleh aturan berupa nilai dan norma yang diinternalisasi dan kubu *undersosialized*, yaitu tindakan ekonomi yang rasional dan berorientasi pada pencapaian keuntungan individual (*self-interst*), dalam menentukan apa yang sebenarnya menuntun orang dalam perilaku ekonomi. Kubu *oversosiaoized*, oleh karena itu, memandang bahwa semua perilaku ekomoni seperti memilih pekerjaan, melakukan profesi, menjual, membeli, menabung, dan lain sebagainya tunduk dan patuh

terhadap segala sesuatu yang diinterlisasi dalam kehidupan sosial seperti niali, norma, adat-kebiasaan, dan tata-kelakuan. Seorang pedagang muslim, sebagai suatu contoh, bekerja dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti juga pedagang lain. Namun bagi pedagang muslim tidak semua barang dan jasa bias diperjualbelikan, karena dia harus mempertimbangkan smua nilai dan norma agama Islam sebagai rujukan. Perilaku pedagang muslim yang menjadikan Islma sebagai rujukan dalam berdagang memperlihatkan bagaimana *oversosiaoized* terjadi dalam tindakan ekonomi.

Berbeda dengan kubu oversosialized, kubu undersosialized melihat kepentingan individu di atas segala-galanya. Kubu ini tidak melihat ada ruang bagi pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial terhadap tindakan ekonomi. Oleh sebab itu, kubu ini memandang setiap tindakan ekonomi merupakan refleksi dari suatu pencapaian perolehan keuntungan pribadi. Persoalan untung rugi merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan (cost - benefit rati). jika keuntungan ada di depan mata, maka seseorang akan meraihnya meski nilai dan norma adat atau agama melarang tindakan ekonomi tersebut. Sebaliknya jika kerugian akan diperoleh bila suatu tindakan dilakukan, maka ia akan menghindari untuk tidak melaksanakan tindakan tersebut. Misalnya, seseorang merasa yakin, berdasarkan pengalamannya selama ini, bahwa apabila ia menginvestasikan dananya kepada pedagang yang tidak dapat dipercaya maka ia akan tidak melakukannya, meskipun pedagang yang tidak bisa dipercayainya adalah keluarga besarnya, yang secara budaya dia memiliki kewajiban moral membantunya.

Secara sederhana untuk memahami pandangan para ahli sosiologi dan ekonomi umumnya tentang tindakan ekonomi maka gambar berikut ini diharapkan dapat membantu pemahaman

Oversosialize		Undersosialized
0		
Nilai dan Norma	Tindakan Ekonomi	Keuntungan Pribadi

Gambar 6.1 Tindakan Ekonomi menurut Ahli Sosiologi dan Ekonomi Umumnya

Granovetter melihat hahwa dikhotomi oversosializedundersosialized bukanlah suatu penggambaran yang tepat terhadap realitas tindakan ekonomi. Sebab dalam kenyataannya, tindakan ekonomi melekat pada setiap jaringan hubungan sosial dan/atau institusi sosial., baik tindakan ekonomi yang termasuk dalam oversosialized maupun yang undersosialized. Orang yang berorientasi pada keuntungan pribadi atau self-interest, dalam kenyataannya, juga mengantisipasi tindakan orang lain. Misalnya seorang pedagang akan mempertimbangkan pengambilan tingkat keuntungan terhadap antara pembeli yang menjadi langganan dan tidak. Apabila pedagang tidak melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan pelanggan. Demikian juga suatu perusahaan yang berorientasi profit tetap akan memperhatikan cooperate sosialresponsibility, misalnya melakukan pemberdayaan lingkungan komunitas di mana perusahaan tersebut berada, agar citra perusahaan tetap tinggi di mata stakeholders.

B. Keterlekatan-Ketidakterlekatan Versus Keterlekatan Lemah-Kuat

Demikian pula dengan dikhotomi keterlekatan-ketidakterlekatan (embedded-disembedded) dari Polanyi tidak disetujui oleh Granovetter dan Swedberg. Polanyi dan kawan-kawan ([1957] 1971:43, 68) melihat bahwa ekonomi dalam masyarakat pra-industri melekat dalam institusiinstitusi sosial, politik, dan agama. Ini bermakna bahwa fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar digerakkan oleh tujuan selain mencari keuntungan. Mekanisme pasar tidak diperbolehkan untuk mendominasi kehidupan ekonomi; oleh sebab itu permintaan-penawaran bukan sebagai mekanisme pembentuk harga, tetapi merupakan suatu bentuk dari tradisi atau otoritas politik. Kehidupan ekonomi dalam masyarakat pra-industri diatur oleh resiprositas dan retribusi. Sedangkan dalam masyarakat modern, "pasar yang menentukan harga" diatur oleh suatu logika baru, yaitu logika yang menegaskan bahwa tindkaan ekonomi tidak melekat dalam masyarakat. Ini berarti bahwa ekonomi terstruktur atas dasar pasar yang mengatur dirinya sendiri (self regulating market) dan secara radikal melepaskandirinya dari institusi sosial lainnya untuk berfungsi menurut hukumnya, di mana tindakan ekonomi dituntun oleh pencapaian perolehan ekonomi yang maksimum. Berikut gambar dikhotomi keterlekatan-ketidakterlekatan dari Polanyi dkk.

Keterlekatan		Ketidakterlekatan
0		
Masyarakat Praindustri	Tindakan Ekonomi	Masyarakat

Gambar 6.2 Keterlekatan-ketidakterlekatan Tindakan Ekonomi dari Polanyi dkk.

Keterlekatan yang dialami masyarakat pra-industri dan ketidakterlekatan yang berkembang pada masyarakat industri/modern, berdasarkan versi Polanyi, dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Keterlekatan dan Ketidakterlekatan Tindakan Ekonomi dalam Masyarakat Menurut Polanyi

Hubungan	Keterlekatan Ekonomi dalam Organisasi	Ketidakterlekatan Ekonomi dalam Organisasi
Ekonomi dan Komunitas	Resiprositas: ekonomi melekat dalam hubungan antar suku yang berpusat pada kewajiban terhadap komunitas. Redistribusi: ekonomi melekat dalam komunitas politik yang terpusat.	Pasar: ekonomi tidak melekat pada komunitas melalui institusi-institusi seperti pasar dan hak milik pribadi.
Ekonomi dan Pemerintah	Resiprositas: ekonomi melekat dalamproses pengaturan suku yang termaktub dalam adat. Redistribusi: ekonomi melekat dalam aparat politik negara yang terpusat dan kerajaan yang terbentuk melalui kontrol politik.	Pasar: ekonomi tidak melekat pada pemerintahan melalui integritas legal dari individu dan perusahaan serta melalui kebebasan pasar dari dominasi politik.
Ekonomi dan Rumah Tangga	Resiprositas: ekonomi maupun rumah tangga melekat dalam komunitas suku. Redistribusi: ekonomidan rumah tangga melekat dalam komunitas politik yang terpusat.	Pasar: ekonomi tidak melekat pada rumah tangga dalam arti pemisahan "kerja" dan "rumah", "pekerjaan" dan "waktu luang".

Ketidaksetujuan Granovetter dan Swedberg berkenaan dengan tingkat atau terajat dari keterlekatan. Mereka menegaskan bahwa tindakan ekonomi dalam masyarakat industri juga melekat dalam jaringan hubungan sosial dan institusi sosial lainnya seperti agama, politik, pendidikan, keluarga, dan lainnya, sebagaimana halnya juga terjadi dalam masyarakat pra-industri. Tindakan ekonomi dalam masyarakat modern seperti perekrutan pegawai di berbagai perusahaan dan lembaga formal dengan memperhatikan referensi, corporate sosial responsibility dan community development oleh perusahaan terhadap komunitas di

lingkungan pabrik atau perusahaan, atau pelayanan eksklusif dari pemegang kartu kredit tertentu dari suatu perbankan merupakan beberapa contoh dari bagaimana keterlekatan terjadi. Oleh karena itu, Granovetter dan Swedberg mengusulkan bahwa tindakan ekonomi berlangsung diantara keterlekatan lemah (under embedded) dan keterlekatan kuat (over embedded). Dengan kata lain, tindakan ekonomi bukan berlangsung dalam kontinum antar kutub keterlekatan dan kutub ketidakterlekatan namun berada dalam garis kontinum kutub keterlekatan kuat dan keterlekatan lemah. Untuk memahami pandangan Granovetter dan Swedberg secara ringkas dalam lihat gambar di bawah ini.



Gambar 6.3 Keterlekatan Lemah dan Keterlekatan Kuat dari suatu Tindakan Ekonomi

Bagaimana memahami pandangan Granovetter dan Swedberg tersebut secara lebih dalam? Tindakan ekonomi nasabah bank, misalnya, dalam menarik uang bisa dilihat dalam derajat yang berbeda dari keterlekatan. Apabila nasabah bank menarik dananya melalui pemotongan saldo dari kartu tabungan lewat kasir di kantor suatu bank maka keterlekatan lebih kuat dibandingkan dengan menarik uang lewat kartu ATM di berbagai anjungan. Kenapa? Karena penarikan uang melalui suatu kantor bank, nasabah melakukan interaksi sosial dengan kasir bank. Antara nasabah dan kasir menjalin komunikasi, paling tidak, kasir mempersilakan nasabah menandatangani slip pengambilan uang. Namun tidak jarang interaksi sosial tersebut diperkuat menjadi hubungan

sosial, misalnya saling mengetahui identitas diri dan saling menanyakan kabar, selain saling tegur sapa.

Sedangkan jika penarikan uang di ATM, nasabah hanya berhubungan dengan mesin, kalaupun ada hubungan, mereka para nasabah, bersama menunggu giliran dalam suatu antrian, yang dalam hal tertentu bisa menjadi pintu masuk bagi terbentuknya suatu interaksi. Atau bisa saja sebelum masuk ke dalam bilik anjungan, seorang nasabah mengeluarkan dompet kartu sambil memperlihatkan untaian berbagai jenis kartu atm yang dimiliki kepada nasabah lain yang sedang antri. Tindakan mempertontonkan berbagai kartu ATM tersebut merupakan satu tindakan sosial di mana sinyal status sosial dipancarkan melalui aktifitas tersebut. Bentuk hubungan yang disebut terakhir ini lebih lemah (melalui ATM) dibandingkan dengan disebut pertama (melalui kasir). untuk sederhananya, dapat dipahami melalui gambar di bawah ini.

Keterlekata Lemah	Keterlekatan Kuat	
Penarikan Uang di ATM		Penarikan Uang di Bank
0		\bigcirc
Tindakan Ekonomi		

Gambar 6.4 Keterlekatan Lemah dan Keterlekatan Kuat dari suatu Tindakan Ekonomi dari Penarikan Uang Nasabah Bank

Mungkin diperlukan contoh lain untuk memahami topik ini lebih dalam. Misalnya, anda sedang berada di luar negeri, katakanlah negara Jerman. Anda ingin merokok. Untuk itu anda harus membelinya. Aktifitas membeli rokok dapat dikategorikan sebagai tindakan ekonomi. Anda bisa membeli melalui mesin penjual (vending machine) atau di Emma Laden

(kios atau warung). jika anda membelinya melalui penjual (vending machine) maka tindakan ekonomi anda mengandung keterlekatan (sangat) lemah, karena anda hampir tidak melakukan interaksi sosial dengan orang lain, kecuali bila setelah anda memasukkan koin atau uang kertas anda tapi rokok tidak keluar, maka anda marah dan merusak mesin tersebut sehingga orang lain melihat anda dan memahami kenapa anda kecewa atau anda menelpon perusahaan dari mesin penjual tersebut untuk mengemukakan kekecewaan anda. Sebaliknya bila anda memebeli rokok di Emma Laden, maka anda berinteraksi dengan penjual di warung tersebut: mengucapkan salam, saling menyapa, bertanya, dan mungkin saling senyum. Oleh karena itu, tindakan ekonominya dipandang sebagai suatu bentuk keterlekatan kuat.

C. Bentuk Keterlekatan

Granovetter (1990) dalam "The Old and the New Economic Sociology" membedakan dua bentuk keterlekatan, yaitu:

1. Keterlekatan Relasional

Keterlekatan tindakan relasional merupakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung antara para aktor. Konsep "disituasikan secara sosial" bermakna tindakan ekonomi, seperti telah dibahas pada Bab 1, terjadi dalam suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan orang lain atau dikaitkan dengan individu lain. Misalnya tindakan ekonomi dalam hubungan pelanggan antara penjual dan pembeli merupakan suatu bentuk keterlekatan relasional. Dalam hubungan pelanggan terjadi hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, agama, dan politik dalam kehidupan mereka berdua. Hubungan pelanggan terjadi karena adanya informasi yang asismetris (ketidakseimbangan informasi) antara penual dan pembeli shingga pembeli perlu melakukan suatu klientitas, yaitu suatu proses resiprokal dalam hubungan yang simetris, egaliter, dan opsisional. Ketika pembeli menghadapi informasi yang bersifat tidak pasti, kompleks, ireguler, dan sulit maka ia berusaha mengatasi persoalan tersebut melalui konstruksi hubungan langganan dengan penjual. Melalui hubungan langganan ini, pembeli bias memutus mata rantai informasi yang asimetris (asymmetrical information) tersebut. Hubungan langganan bermula dari pencarian pembembli terhadap kepastian dan keakuratan informasi terhadap suatu barang atau jasa. Dalam pasar yang tidak sempurna, informasi yang pasti dan akurat ternyata tidak mudah untuk memperolehnya. Oleh sebab itu, pembeli berusaha mencari penjual yang mau berbagi informasi dengannya. Dalam situasi pasar, tidak ada yang gratis, semua diukur dari sisi untung-rugi. Berbagi informasi juga dipahami oleh pihak penjual sebagai berbagi keuntungan, bukan berbagi kerugian. Oleh sebab itu, jika penjual mau berbagi informasi dengan pembeli maka harus ada kepastian bahwa penjual memperoleh keuntungan dari berbagi informasi tersebut dari pihak pembeli. Proses seperti itu berlangsung terus-menerus sampai ada kepastian dan kepercayaan dari kedua belah pihak bahwa berbagi informasi telah terjadi dan telah menguntungkan kedua belah pihak.

Ketika hubungan antara pembeli dan penjual telah sampai pada tahap berbagi informasi yang pasti dan akurat serta melibatkan kepercayaan maka hubungan tersebut mengental pada tahap hubungan pelanggan. Hubungan pembeli dan penjual dalam hubungan pelanggan tidak hanya meliputi tindakan ekonomi, tetapi juga bias meluas kepada aspek sosial, budaya dan politik. Pada saat pesta dipihak pembeli, maka penjual alan

memberikan kado istimewa. Sebaliknya, tidak jarang pembeli juga membawakan makanan atau oleh-oleh berupa hasil pertanian dari ladang pembeli sendiri. Ketika masa kampanye, misalnya, antara pembeli dan penjual bias berbagi informsai politik tentang pemilihan legislatif, kepala daerah atau presiden. Dalam proses berbagi informasi tersebut, bias keduanya saling mempengaruhi sesuai dengan informasi dan argumentasi yang mendukungnya. Dalam realitas politik Indonesia, oleh karena, bias dipahami kenapa para calon menjadikan tempat pasar (*market place*) sebagai salah satu tempat kunci dalam kampanye mereka.

Mungkin anda perlu contoh lain. Andaikan anda seorang wanita sedang makan di sebuah restoran sendirian. Pada saat pesanan anda tiba, anda berusaha tidak menampakan anda sedang dalam keadaan sangat lapar. Anda buka serbet perlahan dan ditempatkan pada bagian yang anda anggap pantas. Kemudian perlahan anda ambil sendok atau sumpit dan menyendok atau menyumpit makanan juga secara perlahan. Ketika mengunyah makanan anda berhati-hati sekali agar tidak bersuara. Mengapa anda melakukan hal tersebut padahal anda sedang sangat lapar? Bila anda sedang berada di rumah, mungkin anda akan makan dengan lahap, bergegas dan berdecak. Jawabannya adalah anda sedang berinteraksi dengan orang lain, meskipun pengunjung restoran tersebut tidak satupun anda kenal. Anda makan sambil mengelola impresi atau kesan anda dihadapan orang lain.

2. Keterlekatan Struktural

Keterlekatan structural adalah keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan hubungan yang luas, bias merupakan institusi atau struktur sosial. Konsep institusi sosial (sosial institution), sosiolog Indonesia lebih suka menerjemahkannya sebagai

konsep lembaga sosial, merupakan struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan (Brinkerhoff dan White: 1989, 49). Dari batasan konsep Brinkerhoff dan White ternyata perlu pahami terlebih dahulu apa dan bagaimana struktur sosial.

Ketika kita menetap sebuah mobil pada saat itu kita sedang memperhatikan struktur mobil tersebut yaitu suatu pola yang terorganisir dari besi, karet, kaca, alumunium, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita memandang sebuah lemari pakaian pada saat yang bersamaan kita melihat bentuk yang terorganisir dari kayu, peku, triplek, cat, dan sebagainya. Jadi, pola dan bentuk yang terorganisir tersebut, baik mobil maupun lemari pakaian, kita pahami sebagai struktur.

Konsep sosial, seperti telah dikemukakan pada Bab 1, menujuk pada makna subyektif yang mempertimbangkan perilaku atau tindakan orang lain yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut.

Dengan demikian struktur sosial adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatun ruang sosial. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), misalnya, merupakan struktur, karena di dalamnya terdapat struktur yang terorganisir seperti ketua, sekertaris dan anggota, anggaran dasar dan rumahtangga, dan sebagainya.

Struktur sosial merupakan tuntunan sosial dalam berinteraksi dan berhubungan dengan individu dan kelompok lai. Struktur sosial menyadarkan kita bahwa hidup ini dicirikan dengan pengorganisasian dan stabil.

Pemahaman tentang struktur sosial seperti yang dikemukakan di atas telah mengandung beberapa pandang atau pengertian yang diberikan oleh berbagai ahli sebagai berikut: satu,Thomas J. Sullivan dan Kenrick S. Thompson (1984) mengemukakan bahwa, "Struktur sosial merupakan pola interkasi yang terorganisir dalam suatu kelompok atau masyarakat"; dua, James W. Vander Zanden (1986) menjelaskan bahwa, "Struktur sosial adalah saling keterkaitan dari interkasi dan hubungan orang-orang dalam pola yang stabil dan terus menerus"; sedangkan David B. Brinkrhoff dan Lynn K. White (1989) berpendapat bahwa "Struktur sosial menunjuk pada suatu jaringan status atau posisi yang mana interaksinya diatur oleh norma sosial."

Penjelasan Thomas J. Sullivan dan Kenrick S. Thompson dengan James W. Zanden relatif sama, dengan redaksi berbeda. Sementara penjelasan Brinkerhoff dan White tampaknya lebih terurai agak rinci dengan menggunakan konsep status atau posisi. Sebenarnya definisi Thomas J. Sullivan dan Kenrick S. Thompson dengan James W. Vander Zanden mengandung secara impilist status atau posisi, sebab pola interaksi atau hubungan antara dua orang atau lebih yang menyandang status atau posisinya masing-masing dalam proses tersebut.

Untuk memahami keterlekatan struktural lebih dalam, kita coba kupas fenomena ekonomi dari pasar swalayan. Pasar swalayan merupakan suatu struktur sosial di mana terdapat pola interaksi antara pengusaha swalayan, karyawan, pemasok dan pembeli. Dalam aktivitas perdagangan terdapat aturan main, misalnya, jika ingin membawa suatu barang ke rumah, maka pembeli harus terlebih dahulu membayarnya di kasir. Atau terdapat aturan main antara pengusaha swalayan dan pemasok serta antara pengusaha swalayan dan karyawan. Dalam hubungan antara pengusaha swalayan dan pemasok terjalin hubungan kepercayaan. Sebab jika tidak ada kepercayaan antar mereka, maka tidak akan mungkin pemasok akan memasukkan barang-barang mereka tanpa pembayaran uang terlebih

dahulu. Demikian pula antara pengusaha swalayan dan karyawan juga terdapat suatu derajat kepercayaan antara mereka, terutama karyawan yang bertugas sebagai kasir. Sedangkan hubungan antara kayawan dengan pembeli, meskipun tidak sampai pada pembentukan kepercayaan, namun interaksi sosial antar mereka, terutama pada swalayan yang berada di lingkungan suatu komunitas, tidak sekedar saling menatap atau bertukar senyum, tetapi juga bisa berlanjut dengan saling bertukar kabar.

Dari penjelasan tentang pasar swalayan di atas telihat bahwa keterlekatan yang terjadi di dalamnya melibatkan suatu jaringan hubungan yang lebih luas: antara pemilik swalayan dan karyawan, pemilik swalayan dan pemasok, serta antara karyawan dan pembeli.

Kalau belum yakin tentang pemahaman anda tentang keterlekatan structural, mari kita ambil contoh lain, yaitu aktivitas badoncek atau barantam dalam masyarakat Minangkabau, khususnya pada komunitas Pariaman. Pada masyarakat Minagkabau di Pariaman dikenal luas suatu tradisi sosial budaya yang disebut badoncek atau barantam. Tradisi ini pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kearifan local dalam kaitannya dengan pengumpulan dana (fund raising) terhadap suatu kegiatan baik pada tingkat komunitas maupun dalam keluarga luas. Pada tingkat komunitas, misalnya, *badoncek* atau *barantam* dilakukan untuk mengumplkan dana bagi pembangunan fasilitas umum seperti masjid, jembatan, balai adat, dan lainnya atau perayaan hari besar seperti mauled nabi, lebaran, peringatan kemerdekaan, dan lainnya. Sedangkan pada tingkat keluarga luas, badoncekatau barantam dilakukan untuk membantu anggota keluarga yang sedang melaksanakan suatu kegiatan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti pesta perkawinan, membangun rumah atau lainnya.

D. Keterlekatan dan Pendekatan Lainnya

Perbadingan pendekatan keterlekatan dengan pendekatan lainnya yang dimaksudkan adalah pendekatan-pendekatan pilihan rasional dan pendekatan ekonomi institusi baru.

- 1. Keterlekatan Versus Pilihan Rasional
- 2. Keterlekatan Versus Ekonomi Institusi Baru

BAB 7. JARINGAN (NETWORK)

A. Jaringan

Pengertian jaringan bisa di jelaskan dengan berbagai cara, seperti pengertian kamus atau ditelusuri melalui etimologis. Jaringan menurut Robert m.z. lawang (2004:50-54). Jaringan merupakan terjemahan dari *network*, yang berasal dari dua suku kata yaitu *net* dan work yang berarti net itu jaringan, yaitu tenunan yang seperti jala, terdiri dari berbagai ikatan yang saling terhubung, dan work itu kerja, gabungan kata network yang penekananya terletak pada kerja bukan pada jaringan, berdasarkan pemikiran seperti itu maka (network) menurut lawang (2004;50-51) dimengerti sebagai;

- 1. Ada ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang di hubungkan dengan media (hubungan sosial) hubungan sosial ini dikaitkan dengan kepercayaan, kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- 2. Ada kerja antara dua simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerja sama, bukan kerja bersama.

- 3. Seperti halnya sebuah jaringan (yang tidak putus) kerja yang terjalin antara simpul itu kuat menahan beban bersama.
- 4. Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri, semua simpul menjadi satu kesatuan dalam ikatan yang kuat.
- 5. Media (benang atau kawat) dan, simpul tidak dapat di pisahkan, Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagai mana ikatan dan media nya itu dipelihara dan dipertahankan.

B. Tingkatan Jaringan

Bahwa jaringan dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu;

1. Jaringan mikro

Sebagai makhuk sosial, manusia hidup bersama Penelitia dalam berbagai bidang telah memperlihatkan dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya seorang anak manusia, (individu) selalu ingin melakukan iteraksi sosial dengan individu lainya.

2. Jaringan meso

Dalalm berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan dalam kontek sosial, biasanya dalam suatu kelompok.

Hubungan yang dibangun para aktor dengan dan atau di dalam kelompok.

3. Jaringan makro

Jaringan makro merupakan ikatan yang terbentuk karena terjalinya simpul-simpul dari beberapa kelompok, dengan demikian ikatan jaringan makro terdiri dari dua ikatan atau lebih, kelompok dalam konteks ini biasanya dalam bentuk organisasi, intitusi bahkan biasanya negara.

C. Pendekatan Jaringan Sosial

Berdasarkan literatur yang berkembang, powell dan smith-doer (1991) mengajukan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami jaringan yaitu;

1. Pendekatan analisis

Pendekatan analisis atau abstrak menekan kan pada;

- a. Pola informal dalam organisasi, dan hubungan organisasi dibangun dalam hubungan yang rumit dari otoritas
- b. Jaringan juga memperhatikan tentang bagai mana lingkungan didalam organisasi kontruksi
- c. Sebagai suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuasaan dan otonomi, area ini terdiri dari setruktur sosial sebagai pola unitunit yang terkait.

2. Pendekatan preskriptis

Pendekatan preskitip memandang jaringan sosial sebagai penrgatu logika atau sebagai suatu cara mengerakan hubungan-hubungan di antara aktor ekonomi.

D. Bidang Penelitian Jaringan Sosial

Dalam melakukan penelitian tentang jaringan sosial, terdapat empat bidang

1. Jaringan informal dari akses dan kesempatan, pada pengunaan jaringan sosial dalam pekerjaan (mencari kerja dan migrasi), penelitian yang dilakukan gerenovetter (1973; 1974; 1983) memperlihatkan bahwa suatu ikatan apapun bentuknya, lemah atau kuat memberikan kemudahan dalam mejalankan kehidupan, suatu ikatan jaringan yang kuat memberi basis motivasi.

Jaringan sosial memudahkan mobilitas sumberdaya untuk mempertahankan seseorang memegang suatu jabatan atau membangun suatu bisnis.

Jaringan komunikasi memainkan peran penting dalam penyebaran model, struktur, praktek dan budaya bisnis.

2. Jaringan formal pengaruh dan kekuasaan

Bagian ini menggunakan pendekatan analisis untuk menjelaskan kekuasaaan aktor-aktor ekonomi (mintz dan swartz, 1985; burt, 1992; mizruci 1992) kubu pemikiran ini mempercayai bahwa "kekuasaan melekat situasional. Ia bersifat dinamis dan tidak setabil secara potensial"

Perfektif ketergantungan sumberdaya biasanya membahas tentang posisi suatu perusahaan dalam suatu jaringan

Perfektif kelas sosial dalam analisis jaringan sosial berlandaskan suatu argumentasi bahwa hubungan ekonomin, politik, sosial antara kelompok elit menciptakan suatu kekuasaan.

3. Organisasi sebagai jaringan sosial dan perjanjian

Kita selalu hidup dalam suatu kelompok, di rumaah kita memiliki keluarga. Di tempat kerja kita bernaung di bawah perusahaan atau kantor. Di lingkungan kita mempunyai kelompok sebaya (per grup) kesemua kelompok itu terorganisir, dengan kata lain setiap kelompok memiliki ciri organisasi.

Sebagai logika ganda dari jaringan sosial, organisasi terlibat dalam suatu kecampuran yang rumit dari kerja sama

BAB 8. KEPERCAYAAN (TRUST)

A. Pengertian Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan merupakan anggapan, harapan, keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata (akan terjadi). Dalam terminologi sosiologi, konsep kepercayaan lebih dikenal dengan istilah *trust*. Definisi *trust* sendiri oleh beberapa teoritis seringkali dikaitkan dengan resiko. Salah satu teoritis yang menggunakan konsep ini antara lain Torsvik (2000:458) dalam Damar dan Indriyani (2016:185), menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya.

Di sisi lain, terdapat pula teoritis yang mengkritisi keterkaitan pengertian kepercayaan terhadap resiko seperti yang diungkapkan oleh Torsvik. Salah satu dari pengkritik konsep ini adalah Anthony Giddens. Menurut Giddens (2005:45) dalam Damar dan Indriyani (2016:186) Kepercayaan merupakan keyakinan akan reabilitas seseoarang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis).

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan harapan atau keinginan dalam hubungan sosial yang di dasari oleh keyakinan bahwa pihak lain akan melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Atau dengan kata lain, harapan dan keinginan yang kita harapkan kemungkinan besar akan terwujud.

B. Kepercayaan Sebagai Bagian dari Capital sosial

Capital sosial, atau Modal Sosial, dalam perspektif ekonomi merupakan modal yang harus dimiliki, atau setidaknya harus dibangun oleh pelaku ekonomi guna memudahkan seluruh kegiatan ekonomi baik itu dalam konteks produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Bourdie (1986) dalam Syamni (2010), mendefinisikan sosial Capital sebagai keseluruhan sumber konsep aktual atau potensial, yang dihubungkan dengan kepemilikan dari suatu jaringan yang tahan lama atau lebih kurang hubungan timbal balik antar institusi yang dikenalnya. Dari berbagai poin bisnis yang penting, sosial capital sama dengan sumber informasi. sosial Capital ini dapat berupa gagasan, dukungan emosional, goodwill, ataupun kepercayaan. Dalam konsep sosial capital, kepercayaan memegang peranan penting sebagai bagian dari instrumen yang membuat kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai keinginan.

Di era disrupsi seperti sekarang ini, transaksi ekonomi tidak lagi harus melalui interaksi sosial secara langsung, atau tidak lagi harus bertemu secara *face to face* (tradisional), melainkan bisa menggunakan media seperti gawai, internet, ataupun media sosial. Tidak bertemunya antara pernjual dan pembeli tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan rasa percaya (*trust*) pembeli terhadap penjual yang kemudian akan mempengaruhi keputusan membeli.

Oleh karena itu, di era disrupsi ini, utamanya bagi pelaku produksi dan umunya bagi seluruh pelaku ekonomi, pembangunan rasa percaya (*trust*) haruslah dibangun secara baik mengingat pertimbangan atau intrumen penilaiannya juga semakin kompleks karena tidak adanya interaksi secara langsung/fisik (bertemu). Di samping itu, ketika kepercayaan ini telah berhasil dibangun, maka biaya serta kompleksitas kegiatan ekonomi akan secara otomatis berkurang.

C. Lingkungan Kepercayaan

Anthoni Giddens berpendapat bahwa kepercayaan memiliki suatu lingkungan, di mana lingkungan ini dapat mempengaruhi tingkat tumbuh-kembangnya kepercayaan itu sendiri. Giddens membagi setting lingkungan ini ke dalam dua lingkungan, yaitu masyarakat pra-modern dan masyarakat modern.

1. Masyarakat Pra-Modern

Dalam masyarakat pra-modern, Giddens menemukan 4 lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepercayaan. Antara lain: 1) hubungan kekeluargaan, 2) komunitas masyarakat lokal, 3) Kosmologi religius, dan 4) tradisi.

Hubungan kekeluargaan dapat menjadi asal permulaan suatu kepercayaan muncul. Hubungan kekeluargaan dapat menciptakan suatu mata rantai hubungan sosial yang secara tidak langsung dapat menjadi media tempat bertumbuh kembangnya kepercayaan. Misalnya seseorang dari kampung pergi merantau ke kota, lalu dia mendatangi kerabatnya

yang sudah terlebih dahulu berada di kota tersebut untuk meminta pekerjaan. Dengan mendatangi kerabatnya yang ada di kota, secara tidak langsung mengartikan bahwa seseorang dari kampung tersebut percaya bahwa kemungkinan besar kerbatnya tersebut akan menolongnya. Di sisi lain, kerabatnya yang berada di kota tersebut juga kemungkinan besar akan menolongnya mengingat dia merupakan bagian dari keluarga si kerabat.

Komunitas masyarakat lokal. Komunitas ini dapat memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya kepercayaan pada masyarakat pra-modern. Giddens tidak mengaitkan komunitas masyarakat lokal ini dengan sebuah romantisme budaya, tetapi lebih kepada arti penting relasi lokal yang diatur oleh konteks tempat yang belum di transformasikan oleh relasi ruang-waktu. Misalnya kembali kepada contoh seseorang dari kampung dan kerabatnya yang berada di kota, konstruk kepercayaan dalam konteks komunitas masyarakat lokal tidak dibatasi atas hubungan kekerabatan, tetapi secara cangkupannya lebih luas, antara lain satu suku,satu kota, satu provinsi, dst.

Kosmologi religius merupakan bentuk lingkungan yang menyediakan interpretasi *providential* atas kehidupan dan alam. Dalam kosmologi religius, kepercayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat *ukhrowi*. Misalnya dalam agama islam, seorang muslim menyadari bahwa menjaga kepercayaan merupakan salah satu nilai yang diajarakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tradisi juga dapat menjadi lingkungan tempat tumbuhkembangnya kepercayaan masyarakat. Tradisi merupakan media untuk menyambungkan masa kini dengan masa depan dengan mengaitkannya kepada masa lalu. Tradisi seringkali disebut sebagai kebiasaan atau rutinitas. Giddens berpendapat bahwa tradisi bukan hanya merupakan rutinitas kosong, lebih jauh dari itu tradisi merupakan kebiasaan yang mempunyai nilai intrinsik. Dalam tradisi Minangkabau contohnya, menjaga kepercayaan satu dengan yang lain merupakan tradisi dan nilai yang harus dipegang teguh oleh Masyarakat Minangkabau.

2. Masyarakat Modern

Perbedaan bentuk dan lingkungan kepercayaan antara masyarakat modern dan pra-modern terletak pada penjarakan antara ruang dan waktu. Berbeda dengan masyarakat pra-modern yang memiliki 4 lingkungan, pada masyarakat modern lingkungan yang memungkinkan tumbuh kembangnya kepercayaan terbagi menjadi 3 lingkungan. Antara lain, *1*) Sistem Abstrak, *2*) Relasi Personal, dan *3*) Orientasi Masa Depan.

Sistem Abstrak merupakan mekanisme intitusional yang mencabut hubungan-hubungan sosial dari konteks lokal dan perubahan hubungan-hubungan tersebut menuju rentan ruang dan waktu yang tidak terbatas melalu "alat simbolis" dan "sistem ahli". Alat simbolis ini dapat berupa uang, sedangkan sistem kecakapan teknis yang mengatur wiyalah atau lingkungan tempat kita saat ini. Misalnya ketika kita menaiki angkutan umum kita percaya bahwa angkutan tersebut beserta supirnya merupakan sebuah sistem yang ahli yang bisa mengantarkan kita sampai pada tujuan.

Relasi Personal dalam masyarakat modern sangat mungkin untuk menjadi lingkungan tempat tumbuh kembangnya kepercayaan. Pada masyarakat modern yang notebene sudah tidak terhalang oleh dimensi ruang dan waktu, hubungan sosial tidak lagi dibatasi oleh faktor-faktor seperti pertemuan fisik (bertemu), teman sekampung, sekota, dsb. Sehingga hubungan antar individu tidak lagi dibatasi oleh stigma "orang asing". Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan di antara individu tanpa

memandang latar belakang tempat maupun waktu, atau dapat dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Orientasi Masa Depan merupakan sebuah bentuk pemikiran kontrafaktual sebagai bentuk keterkaitan antara masa lalu dan masa kini yang dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, masih menutu Giddens bahwa orientasi masa dapan dapat menjadi lingkungan tempat tumbuh kembangnya kepercayaan di masyarakat.

BAB 9. KAPITAL (CAPITAL)

A. Pengertian Kapital

Secara etimologis, kapital berasal dari kata "capital", yang akar katanya dari kata Latin, caput, berarti "kepala". Sedangkan artinya dipahami, pada abad ke-12 dan ke-13, adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman (Berger, 1990:20).

Dalam tulisan ini, "capital" tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh Lawang (2004:3), yaitu: pertama, capital (Inggris) memang berarti modal, boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang kapital fisik (physical capital goods) yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Dalam pengertian ini nampaknya tidak ada keberatan berarti yang menyangkut pengertian kapital. Kedua, dalam bahasa Indonesia orang sering menggunakan "modal dengkul", artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang capital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri, bisa dalam artian tenaga fisik yang memiliki keterampilan, tetapi

keduanya tidak identik. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keterampilan itu hanya dapat diwujudkan dengan menggunakan tenaga fisik dalam ukuran penggunaan kalori besar atau kecil. Tetapi tidak semua penggunaan tenaga fisik digabungkan dengan keterampilan. Contohnya jalan kaki membutuhkan tenaga fisik, tetapi jalan kaki (apalagi jalan-jalan) bukanlah suatu keterampilan sebagai suatu bentuk kapital manusia (human capital). Karena alasan inilah maka konsep capital tidak diterjemahkan dengan modal. Ketiga, merupakan alasan penulis sendiri, konsep capital berkait dengan suatu investasi. Oleh karena itu, capital berhubung dengan suatu proses yang cukup panjang, yang tidak bisa langsung digunakan seperti hal nya "dengkul" yang ada didepan mata dan siap digunakan.

B. Kapital (DasKapital)

Melalui karya monumentalnya "Das Kapital", Karl Max dapat dinyatakan sebagai tokoh peneruka utama dalam memperbincangkan tentang capital. Bila ditelusuri gagasan Karl Max, capital dilihatnya sebagai bagian dari nilai surplus (surplus value/mehrwert) yang diperoleh kapitalis atau borjuis, yang mengontrol cara-cara produksi, dalam sirkulasi komoditas dan uang antara proses produksi dan konsumsi (Brewer, 1984; Lin, 2001).

Nilai guna sebuah barang adalah nilai kebergunaan suatu barang atau keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika ia digunakan. Sedangkan, nilai tukar, yaitu nilai suatu barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut ditukarkan dengan benda lain. Johnson (1986:155) tentang hal ini: "seseorang yang mengendarai sebuah mobil tua yang harganya hanya sebagian kecil dari harga dari sebuah mobil baru di pasar (nilai tukar), tetapi yang melayani pemiliknya sebagai satu alat

transportasi terpercaya (nilai guna) yang tidak dapat diganti dengan uang pembelian dalam jumlah besar melebihi nilai pasar yang selayaknya untuk mobil tua itu".

Dalam masyarakat kapitalisme, buruh dapat dilihat sebagai sumber nilai guna dan juga nilai tukar. Sebagai sumber nilai guna, buruh menjadi sumber kegiatan yang digunakan untuk produksi suatu barang tertentu untuk dipakai. Sedangkan sebagau sumber nilai ttukar, buruh dipandang sebagai masukan umum untuk proses produksi komuditaskomuditas yang dihasilkan tidak untuk pemakaian pribadi buruh itu sendiri ataupun untuk pemakaian majikan, melainkan untuk dijual dalam system pasar yang bersifat impersonal, untuk ditukarkan dengan uang. Jadi, dalam system kapitalis, buruh dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan dalam pasar impersonal, seperti komoditas lainnya. Namun, buruh mampu memproduksi niali tukar lebih besar daripada yang diminta untuk mempertahankan nilai tukarnya itu. Dengan kata lain, seorang buruh mampu memproduksi jumlah komoditas dengan nilai tukar jauh lebih banyak daripada nilai tukar makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya untuk mempertahankan hidup dan untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Tambahan atau kelebihan dari persyaratan kelangsungan hidup buruh dan pemulihan tenaga kerjanya kembali disebut sebagai nilai surplus (Johnson, 1986:155-156).

Untuk memahami nilai surplus diambil contoh sebagai berikut. Semua kebutuhan hidup buruh seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya agar sang buruh mampu mempertahankan hidup dan memulihkan tenaga kerjanya dapat dihasikan rata-rata dalam 6 jam kerja dan nilainya sama dengan Rp 60.000 per hari dari majikannya. Itu dipandang adil karena memang nilai tenaga kerjanya tidak lebih dari jumlah tersebut.

Namun dalam kenyataannya, karena alasan kapasitas produksi pabrik dan lain sebagainya, kapitalis tidak memperkerjakan buruh selama 6 jam, melainkan 10 jam sehari. Keadaan ini menimbulkan nilai baru sebanyak 4 jam kerja lebih lama dari yang diperlukan sang buruh untuk mempertahankan hidup dan memulihkan tenaga kerjanya. Nilai baru tersebut tidak diberikan kepada buruh, tetapi diambil oleh kapitalis, karena kapitalis tetap membayar upah buruh sebanyak Rp 60.000 perhari, sedangkan 4 jam tenaga kerja yang besarnya sebanyak Rp 40.000 dipandang sebagai nilai surplus, diambil oleh kapitalis. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa capital dilihatnya sebagai bagian dari nilai surplus (surplus value/mehrwert) yang diperoleh kapitalis.

Fenomena di atas ditegaskan oleh Marx (1976: 987) dengan pernyataan berikut:

"jika waktu kerja buruh harus menciptakan nilai menurut proporsi durasi kerjanya, maka ini adalah waktu kerja yang diperlukan secara sosial. Dengan kata lain, pekerja harus melakukan kuantitas kerja yang secara normal pada waktu tertentu. Dengan demikian kapitalis memaksanya bekerja di atas angka intensitas rata-rata yang normal secara sosial. Dia akan berusaha sekeras mungkin untuk meningkatkan outputnya diatas batas minimum ini dan meringkas sebanyak mungkin kerja pada waktu itu. Setiap intensifikasi kerja di atas angka rata-rata menciptakkan nilai surplus baginya. Terlebih lagi, dia akan mencoba mengekstensifkan proses kerjanya seluas mungkin sampai di luar batas yang harus dikerjakan untuk memperbaiki nilai capital Variabel yang diinvestasikan yaitu upah kerja".

Selain itu, capital juga dipandang oleh Marx sebagai suatu bentuk investasi yang diharapkan akan meraup keuntungan dalam pasar. Dengan

kata lain, nilai surplus yang diperoleh kapitalis diinvestasikannya kembali kedalam suatu proses produksi dan sirkulasi komoditas agar dia bisa meraih keuntungan yang lebih besar lagi lewat nilai surplus.

C. Kapital Sosial

Konsep capital sosial (sosial capital) telah menjadi perhatian oleh banyak ilmuan ilmu ekonomi, ilmu politik dan sosiologi (Arrow, 1999). Konsep sosial akan dipahami melalui pandangan beberapa ilmuan yang dikenal menaruh perhatian tentang hal ini. Selain itu juga diperbincangkan beberapa kontroversi yang berkaitan dengan konsep capital sosial.

♦ Pengertian Kapital Sosial

Piere Bourdieu (1986) mendefinisikan capital sosial sebagai "sumberdaya actual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif".

James Coleman (1990: 300), seorang sosiolog, memberi batasan capital sosial sebagai "seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak". Coleman menambahkan bahwa capital sosial merupakan "aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial".

Alejandro Portes (1995:12-13), juga seseorang sosiolog, membatasi capital sosial sebagai "kemampuan individu-individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas". Sumber-sumber langka

tersebut dapat bersifat nyata secara ekonomi seperti potongan harga dan utang bebas bunga, atau tidak nyata seperti informasi tentang kondisi bisnis.

Sedangkan seorang ilmuan politik Robert Putnam (1999) memberi definisi capital sosial sebagai "jaringan-jaringan, nilai-nilai, dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota perkumpulan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama".

Definisi seorang sosiolog lain bernama Jonathan H. Turner (Dasgupta, 2000: 95) berpendapat bahwa capital sosial menunjuk pada kekuatan-kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat dengan menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial.

Seorang sosiolog Indonesia yang serius membahas konsep capital sosial, Robert M.Z. Lawang, (2004) mendefinisikan capital sosial sebagai semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan kelompok secara efisien dan efektif dengan capital lainnya.

Sedangkan Nan Lin (2001:17) membatasi pengertian capital sosial sebagai suatu investasi dalam hubungan sosial oleh individu-individu melalui mana mereka memperoleh akses terhadap sumber-sumber terlekat (embedded resources) untuk meningkatkan hasil yang diharapkan dari tindakan-tindakan yang ekspresif atau instrumental.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa capital sosial merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan capital lainnya.

D. Kontroversi Pemahaman Kapital Sosial

Menurut Coleman (1990) kapital sosial memiliki berbagai bentuk, yaitu antara lain: kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, dan organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat. Sedangkan Pratikno, dkk (2001) menemukan, berdasarkan studi literature, tiga level bentuk kapital sosial, yaitu nilai, institusi dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas dan pengakuan timbal balik. Sementara itu, institusi mencakup keterlibatan umum sebagai warganegara (civic engagement) asosiasi, dan jaringan. Sedangkan, mekanisme meliputi kerjasama dan sinergi antar kelompok.

Konsep kapital sosial merujuk pada kemampuan individu untuk memobilisasi sumber-sumber langka terhadap permintaan. Sumber langka tersebut memiliki karakteristik sebagai "hadiah", sebab sumber tersebut tidak diharapkan untuk dibayar dalam sejumlah uang atau nilai lainnya pada periode masa tersebut. Sumber yang diperoleh lewat kapital sosial tersebut sering mengandung harapan resiprositas pada bentuk yang sama di masa datang. Portes mengajukan 4 sumber kapital sosial yaitu nilai, solidaritas, resiprositas, dan kepercayaan. Mendidik anak sampai "berhasil" sesuai dengan kemampuan, misalnya merupakan suatu nilai yang hamper ditemukan pada semua suku bangsa di dunia. Mendidik anak itu sendiri bukan merupakan kapital sosial, tetapi sumber dari kapital yang berlandaskan nilai yang diterima umum dalam masyarakat. Sedangkan kapital sosial adalah kemampuan seseorang untuk mendidik anak sehingga "berhasil". Keberhasilan tersebut pada akhirnya membuat

orang tersebut pada masa datang menerima "sesuatu" dari anak, misalnya perlakuan sosial yang baik dimasa tua.

Definisi kapital sosial yang dirumuskan penulis yaitu "investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya". Dari rumusan tersebut, secara sederhana dipahami bahwa kapital sosial adalah investasi sosial dalam struktur hubungan sosial untuk meraih tujuan yang diharapkan. Rumusan ini mirip dari rumusan sederhana Nan Lin (2001:6) yang mendefinisikan kapital sosial sebagai "investasi dalam hubungan sosial dengan hasil yang diharapkan".

♦ Kapital Sosial dan Tipe-tipenya Menurut Portes

SUMBER	MOTIVASI DONOR	ALASAN	CONTOH
Nilai	Altruistik	Moral umum yang imperativ	Pemberian orang tua pada anak
Solidaritas	Altruistik	Identifikasi dengan kebutuhan dan tujuan kelompok dalam	Pemberian oada orang sekampung
Resiprositas	Instrumental	Harapan kembalian yang sepadan di masa datang	Informasi bisnis
Kepercayaan	Instrumental	Harapan status komunitas yang lebih tinggi dan kembalian yang sepadan di masa datang yang tunduk pada sanksi kolektif	Jaminan utang pada orang sekampung atau sedaerah

Sumber: A. Portes (1995:15)

Investasi sosial yang dimaksud adalah sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan.

Kapital sebagai investasi sosial, oleh karena itu, memiliki aspek statis dan dinamis. Dengan kata lain, aspek statis dan dinamis dari kapital sosial bagaikan dua sisi yang berbeda dari koin mata uang yang sama. Aspek statis dari dinasmisnya adalah sumber daya sosial, sedangkan aspek dinamisnya adalah kekuatan menggerakkan. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma merupakan kapital yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Investasi bisa terjadi jika actor memiliki sumber tersebut. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan suatu sebagai simpul dan ikatan. Simpul dilihat melalui actor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para actor tersebut. Jaringan dikatakan sebagai sumber daya dari kapital sosial karena dengan kepemilikan "hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan" maka para actor memiliki sesuatu kapital yang mampu diinvestasikan dalam suatu struktur hubungan sosial.

Kepercayaan merupakan keyakinan akan reliabilitas seseorang atau system, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (faith) terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis).

Sedangkan, nilai dipahami sebagai gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Gagasan seperti ini dikenal sebagai nilai. Oleh karena itu pula, nilai berkait dengan ide yang dimiliki secara bersama tentang sesuatu itu baik dan buruk, diharapkan atau tidak diharapkan (William, 1970;27). Misalnya, tidak ada persoalan apakah music dangdut itu benar atau salah secara moral. Namun bagi orang tertentu mendengar alunan seruling

dangdut dengan tembang "Begadang" merupakan pengalaman yang berharga, sedangkan bagi orang lain bisa saja sesuatu yang memuakkan dan dipandang cengeng.

Nilai-nilai dapat menjadi sumber kapital sosial banyak. Namun dari sekian banyak sumber kapital sosial yang relevan dengan studi sosiologi ekonomi adalah kepercayaan, resiproitas, dan rasa tanggung jawab. Resiprositas, merujuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak memiliki posisi dan peranan yang relative sama dalam suatu proses pertukaran.

Sedangkan nilai tanggung jawab merupakan salah satu nilai yang diagungkan dalam banyak masyarakat dunia. Dalam dunia Melayu dikenal pepatah, "tangan mencencang, bahu memikul". Pepatah ini bermakna bahwa siapa yang melakukan sesuatu perbuatan atau aktivitas, dia harus mempertanggungjawabkannya. Dalam aktifitas bisnis, semua memiliki resiko. Ketika suatu keputusan dibuat, berarti seseorang telah siap dengan segala konsekuensi yang akan mengikutinya, baik positif maupun negative. Nilai tanggungjawab dalam aktifitas bisnis, berkaitan dengan nilai kepercayaan. Pertanggungjawaban seseorang terhadap segala konsekuensi dari suatu tindakan bisnis yang dilakukannya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

Norma sebagai sumber daya sosial terakhir dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan kita suatu cara di mana kita mengorientasikan diri kita

terhadap orang lain. Norma menuntun kita dalam melakukan definisi situasi. Norma, oleh karena itu menjadi kompas dalam menemukan jalan-jalandi belantara kehidupan sosial. Sullivan dan Thompson (1984: 39-41) membagi norma atas tiga macam; kebiasaan (folksways), tata kelakuan (mores), dan hokum (law). Kebiasaan adalah cara-cara yang lazim, wajar, dan berulang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sesuatu.

Dalam konteks pembahasan kapital sosial, norma tidak bisa dilepaskan dengan jaringan, kepercayaan dan nilai. Dengan menggunakan pendekatan pertukaran, karena manusia adalah mahluk yang rasional, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi baik dalam dimensi intrinsic maupun ekstrinsik, jika suatu pertukaran mendapatkan suatu keuntungan maka akan muncul pertukaran selanjutnya, yang diharapkan mendapatkan keuntungan pula.

Apabila pertukaran tersebut berlangsung terus menerus dan lama maka ia akan mengkristalkan suatu jaringan hubungan sosial yang di dalamnya mengandung suatu kepercayaan bahawa para pihak yang terlibat pertukaran akan memperoleh keuntungan yang merata. Hal itulah yang memunculkan norma keadilan. Jika ia dilanggar akan memperoleh sanksi atau hukuman yang berat pula.

Sedangkan kekuatan menggerakkan sebagai aspek dinamis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa kapital sosial sebagai investasi dapat membesar, mengecil, tetap atau bahkan menghilang dalam suatu struktur hubungan sosial. Kemampuan individu untuk memobilisasi sumber-sumber langka menurut Portes tersebut dapat dipahami dengan penggunaan "kekuatan menggerakkan" oleh actor dalam aktivitas investasi sosial pada suatu struktur hubungan sosial. Kekuatan menggerakkan tampak pada saat kapital sosial tersebut digunakan dalam

suatu struktur hubungan sosial. Penampakkannya terlihat dari sejauh mana investasi sosial yang telah ditanam mampu mencapai tujuan individual dan kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya.

E. Kapital Budaya

Dalam kajian sosiologi tentang kapital, Pierre Bourd dikenal sebagai tokoh peneruka dalam studi tentang kapital budaya. Meskipun pandangan Bourdieu sukar untuk dijelaskan, namun ada beberapa pandangannya bisa dirangkaikan menjadi suatu pemahaman keseluruhan tentang kapital budaya. Dalam suatu sisi, Bourdieu mendefinisikan kapital budaya, seperti dikutip Mahar dkk (2005: 16), sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi.

Kapital budaya, oleh karena itu, lanjut Mahar dkk, mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Di sisi lain, Bourdieu, menurut Ritzer dan Goodman (2004:525). menjelaskan batasan kapital budaya sebagai berbagai pengetahuan yang sah. Definisi seperti itu sama dengan pemahaman yang dimiliki oleh Jenkins (2004:125). Berbeda dengan pemahaman Mahar dkk, Ritzer dan Goodman serta Jenkins, Lury (1998) melihat Bourdieu membatasi kapital budaya sebagai kapital pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai seperti misalnya apakah suatu karya termasuk "seni" atau "bukan seni.

Penjelasan detil batasan Bourdieu tentang kapital budaya ditulis oleh Lee (2006:58), kapital budaya didefinisikan sebagai kepemilikan kompetensi kultural tertentu, atau seperangkat pengetahuan kultural yang menyediakan bentuk konsumsi kultural yang dibedakan secara khusus dan klasifikasi rumit dari barang-barang kultural dan simbolis.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu, yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Berdasarkan batasan seperti ini maka reproduksi sosial, yaitu pemeliharan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi ke generasi berikutnya, "dipertahankan" melalui sistem join pendidikan:

Sistem pendidikan, suatu pengkelasan terlembaga yang dirinya sendiri, merupakan sebuah sistem klasifikasi yang terobjektifikasi yang hirarki dunia sosial. mereproduksi dalam bentuk yang tertransformasi. ...mentransformasi klasifikasi sosial menjadi klasifikasi klasifikasi akademis dengan segala tampilan netralitasnya, memapankan hirarki yang tidak dialami sebagai hirarki yang semata-mata teknis dan karenanya bersifat memihak dan berat sebelah namun sebagai hirarki mutlak, yang tertanam dalam alam, sehingga nilai sosial lalu diidentifikasi dengan nilai 'personal', martabat sekolah dengan martabat manusiawi

Budaya yang diasumsikan terjamin oleh kualifikasi pendidikan itu merupakan salah satu komponen dasar dalam kebanyakan definisi mengenai manusia unggul, sehingga tiadanya hal dasar tersebut dipersepsi sebagai rintangan hakiki, yang menghilangkan identitas seseorang dan martabat manusiawi, yang menghukumnya untuk bungkam dalam setiap situasi resmi, ketika ia harus 'muncul di publik', mempresentasikan dirinya di hadapan yang lain dengan tubuh, sikap dan bahasanya.

Kesalahan pengenalan terhadap berbagai penentu sosial karir pendidikan dan karenanya terhadap trajektori sosial yang ditentukan karir tersebut-memberikan nilai hak kepada jazah pendidikan, dan menjadikan sistem pendidikan sebagai salah satu agensi fundamental yang mempertankan tatanan sosial (Bourdieu: 1984: 387). Menurut Lawang (2004:16-18), Bourdieu menjelaskan kapital budaya dalam tiga dimensi: yaitu dimensi manusia yang wujudnya adalah badan, dimensi objek dalam bentuk apa saja yang pernah dihasilkan oleh manusia, dan dimensi institusional, khususnya menunjuk pada

Dimensi manusia dari kapital budaya adalah embodied state yaitu keadaan yang membadan, atau keadaan yang terwujud dalam badan manusia, atau yang menyatu seluruhnya dengan manusia sebagai satu kesatuan. Sementara dimensi objek dari kapital budaya, dikenal sebagai objectified state, yaitu suatu keadaan yang sudah dibendakan atau dijadikan objek oleh manusia. Sedangkan dimensi institusional dari kapital budaya merupakan suatu keadaan di mana benda - benda itu sudah menunjukkan entitas yang sama sekali terpisah dan mandiri, yang diperlihatkan dengan sistem pendidikan. Dengan demikian, kapital budaya menunjuk pada keadaan yang berwujud potensial, bagi seseorang yang dapat diuangkan atau dipertukarkan dengan kapital - kapital lainnya.

Mungkin masih belum terlalu paham tentang kapital budaya dari pandangan Bourdieu tersebut? Untuk memantapkan pemahaman, perlu kiranya dijelaskan dengan mengaitkan konsep kapital budaya dengan beberapa konsep lain dari Bourdieu seperti ranah (field) dan habitus. Ranah adalah jaringan antar posisi objektif. Posisi berbagai agen (individu atau kolektif) dalam ranah berkait dengan jumlah kapital yang dipunyai, terutama kapital ekonomi dan kapital budaya. Kapital ekonomi berupa harta kekayaan material, sedangkan kapital budaya berupa modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai, terutama berasal dari pendidikan.

Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin elit institusi pendidikan yang di ikuti maka semakin besar simpanan.

Berdasarkan perbedaan kapital tersebut maka seseorang dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kelompok sosial: (1) tinggi baik pada ekonomi maupun kapital budaya; (2) tinggi dalam kapital ekonomi, rendah dalam kapital budaya; (3) rendah dalam kapital ekonomi, tinggi dalam kapital budaya; (4) rendah baik pada kapital ekonomi maupun kapital budaya. Sedangkan habitus merupakan "struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk mengarungi kehidupan sosial, la sebagai suatu sistem disposisi, sebuah sistem yang mengatur kapasitas individu untuk bertindak. Bourdieu menulis (1984: 170): "habitus adalah keniscayaan yang diinternalisasikan dan dialihkan ke dalam disposisi yang melahirkan praktik bermakna dan persepsi yang memberikan makna; habitus adalah disposisi umum dan dapat digerakkan yang mengandung aplikasi universal dan sistematis di luar batas hal-hal yang telah dipelajari secara langsung terhadap keniscayaan yang inheren dalam kondisi-kondisi belajar".

Pengertian habitus dari buku Distinction, mungkin agak sukar dipahami. Untuk itu berikut ini ditampilkan batasan habitus dari buku Outline of'a Theory of Practice (1977:83), yaitu: "sebuah sistem disposisi yang kekal dan berpindah - pindah, yang mengintegrasikan pengalaman-pengalaman masa lalu, berfungsi pada setiap kesempatan sebagai sebuah matriks persepsi, apresiasi dan tindakan-tindakan dan memungkinkan pencapaian berbagai tugas yang tidak terhingga berkat jasa transformasi skema-skema analogis yang memungkinkan solusi masalah yang nyaris serupa".

Jadi, agen membuat persepsi, menyatakan apresiasi dan tindakan dengan mempertimbangkan matriks yang disediakan oleh habitus. Habitus tidak sekadar merujuk pada pengetahuan, atau kompetensi atau rasa gaya, tetapi juga dijelmakan secara harfiah.

Artinya, hal tersebut di tanamkan dalam diri individu, dalam ukuran tubuh, bentuk, postur, cara berjalan, cara duduk, ekspresi wajah, rasa bebas terhadap diri sendiri, cara makan, minum, keluasaan ruang sosial dan waktu yang dirasakan seseorang sebagai haknya; bahkan naik turun tekanan suara, aksen, dan kompleksitas pola pidato merupakan bagian dari habitus individu (Lury, 1998). Bagi Bourdieu, selera dibentuk habitus yang berlangsung lama: bukan dibentuk oleh opini dangkal dan retorika. Habitus membentuk preferensi agen terhadap makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi etis lainnya.

Jadi, habitus ada dalam pikiran aktor, sedangkan ranah ada di luar pikiran mereka. Hubungan antara keduanya bersifat pengaruh timbal balik yang dialektik. Seperti yang dikatakan Bourdieu (1984: 94): "habitus yang mantap hanya terbentuk, hanya berfungsi dan hanya sah dalam sebuah ranah, dalam hubungannya dengan suatu ranah. habitus itu sendiri adalah "ranah dari kekuatan yang ada", sebuah situasi dinamis di mana kekuatan hanya terjelma dalam hubungan dengan kecenderungan tertentu. Inilah yang menyebabkan habitus yang sama mendapat makna dan nilai yang berlawanan dalam ranah yang berbeda, dalam konfigurasi yang berbeda atau dalam sektor yang berlawanan dari ranah yang sama".

Bagi Bourdicu, selera membantu seorang individu untuk memahami posisinya di antara orang lain. Dengan demikian, seorang individu bisa menemukan dirinya dalam persamaan atau perbedaan dengan orang lain dalam selera. Apakah Anda sudah paham pandangan Bourdieu tentang selera? Anda perlu contoh yang lain, bukan! Selera Anda terhadap makanan, misalnya, mencerminkan Anda di antara orangorang lain. Pada saat Anda akan membeli makanan tentu Anda merencanakannya akan membeli sesuatu. Dasar pertimbangan terhadap rencana membeli sesuatu tersebut berhubungan dengan ranah dan habitus yang dimiliki. Apakah sama keputusan Anda, Jika sebagai seorang buruh dibandingkan bila Anda adalah seorang profesional? Jelas, beda! Selera seorang buruh berawal dari kondisi pengalaman kerja dan beban kebutuhan hidup mereka.

Seorang buruh bekerja keras secara manual dan memiliki kapital ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan hidup (kondisi ini dapat disebut sebagai ranah). Ranah tersebut mempengaruhi hasrat mereka yang cenderung pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisikal seperti jumlah makanan yang dapat dibeli untuk dikonsumsi. Kondisi objektif ini mengkristal menjadi pengetahuan yang di dalamnya terdapat matriks persepsi, apresiasi, dan tindakan - tindakan. Matriks tersebut memfungsikan habitus sebagai rujukan untuk mengekspresikan hasrat dalam selera.

Sedangkan seorang profesional tumbuh dan kembang dalam pendidikan yang memberikan kemampuan abstraksi dan sikap mental edukatif (masih ingatkan, ini disebut sebagai kapital budaya). Selain itu, sebagai seorang profesional karena kondisi pekerjaannya dan kapital budaya yang dimiliki, dia memiliki kapital ekonomi yang relatif baik. Kondisi objekif ini, juga dikenal sebagai ranah, memengaruhi hasrat mereka yang cenderung pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat abstrak seperti kualitas dan citra dari apa yang mereka konsumsi. Kondisi objektif

ini dibatinkan melalui habitus sebagai hasrat yang dieskpresikan dalam selera.

F. Kapital Simbolis

Seperti halnya kapital budaya, Bourdieu dipandang sebagai peneruka dalam studi tentang kapital simbolik. Oleh sebab itu, pandangan Bourdieu tentang kapital simbol memperoleh kehormatan untuk dibahas pertama dalam bagian ini. Apa itu kapital simbolik menurut Bourd? Dalam pandangan Bourdieu (1977:183), kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan, karenanya, telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk bentuk kapital 'material' yang adalah, pada hakikatnya, sumber efekefeknya juga. Mahar dkk (2005:16) memahami prestise, status dan otoritas sebagai kapital simbolik dari Bourdieu.

Sementara, pemahaman Jenkins (2004:125) serta Ritzer dan Goodman (2004:526), kapital simbolik terwujud dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan (gengsi) sosial. Sedangkan, Lee memahami kapital simbolik dari Bourdieu sebagai kuantitas metaforis status dan prestise, yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial. Dari berbagai pemahaman para sosiolog tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kapital simbolik merupakan kapital yang terwujud dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan (gengsi) sosial, yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial.

Definisi kapital simbolik dari Bourdieu yang dijelaskan di atas memang agak sukar dipahami, jika tidak mengaitkannya dengan jenis kapital lainnya. Oleh sebab itu, Turner misalnya, melihat kapital simbolik sebagai penggunaan simbol-simbol untuk melegitimasi pemilikan sebagai tingkat dan konfigurasi ketiga bentuk kapital lainnya (yaitu kapital ekonomi, kapital sosial, dan kapital budaya)'. Sedangkan Lee (2006:58) mencoba melukiskan hubungan antara simbolik dengan kapital lainnya melalui proposisi berikut:

"Semakin besar kepemilikan dan investasi modal pendidikan dan kultural, semakin artikulatif dan khas bentuk konsumsi kultural yang dilakukan, dan dengan demikian semakin besar pula modal simbolis yang dapat diperoleh". Untuk memperluas pemahaman, mari kita coba menjelaskan kapital simbolik dengan contoh. Katakanlah seseorang yang barusan mendapatkan undian sebanyak Rp. 500 Milyar akan masuk ke dalam golongan ekonomi atas.

Namun orang tersebut tentu memiliki kapital budaya dan kapital simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya, melalui sosialisasi atau reproduksi sosial, memperoleh jenis pendidikan, gaya, rasa dan selera tertentu tentang sesuatu. Pembedaan orang dalam pendidikan, gaya, rasa dan selera tertentu tentang sesuatu (makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi etis lainnya), pada gilirannya, memberi dampak terhadap perbedaan orang dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan (gengsi) sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta merta atau segera diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi, karena keterampilan tersebut diperoleh melalui proses yang panjang melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Bagaimana hubungan antara kapital ekonomik, kapital sosial, kapital budaya dan kapital simbolik dalam dapat dilihat secara ringkas melalui tabel di bawah ini.

Tabel 9.2. Hubungan antara Kapital Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Simbolis Menurut Bourdieu

Jenis Kapital	Perbedaan	Persamaan
Ekonomi	Langsung menjadi uang	Uang
Sosial	Tidak langsung menjadi uang. Perlu kondisi tertentu. Kewajiban sosial, koneksi.	Menjadi uang melalui pembentukkan kapital ekonomi.
Budaya	Tidak langsung menjadi uang. Perlu kondisi tertentu. Ijazah, sertifikat lainnya.	Menjadi uang melalui pembentukkan kapital ekonomi.
Simbolis	Tidak langsung menjadi uang. Perlu kondisi tertentu. Keterampilan mengatur symbol.	Menjadi uang melalui pembentukan kapital ekonomi.

BAB 10. EKONOMI MORAL DAN EKONOMI RASIONAL

(MORAL ECONOMY AND RATIONAL ECONOMY)

A. Tindakan Ekonomi

Konsep tindakan ekonomi telah diperbincangkan pada bab sebelumnya. Tidak dipungkir bahwa salah satu diskusi utama dalam sosiologi ekonom adalah tindakan-tindakan ekonomi. Meskipun antara para ekonom dan

sosiolog berbeda pendapat tentang prngertian tindakan ekonomi, namun menurut portes (1995: 3), para sosiolog dan ekonom sepakat bahwa tindakan ekonomi merujuk pada kemampuan dalam dan pengguanaan sarana-sarana yang langka. Semua aktivitas yang diperlukn produksi, distribusi, dan konsumsi dari barag-barang dan jasa-jasa langka., secara konvensional, dipandang sebagai ekonomi. Aktor dalam ekonomi, seperti telah didiskusikan, diasumsikan memiliki seperangkat pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan ak tor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan (perusahaan). Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi. Adapun aktor dalam sosiologi dipandang memiliki beberapa kemungkinan tipe tindakan ekonomi, yaitu tindakan ekonomi rasional, tradisional, dan spekulatifirasional (Weber, [1922] 1978: 63-69). Sementara para ekonom (neo)klasik tidak memberikan tempat bagi yang oleh sosiolog dinamakan tindakan ekonomi tradisional. Para sosiolog melihat tindakan ekonomi dapat sebagai suatu bentuk dari tindakan sosial. Untuk mengerti hal ini, maa terlebih dahulu didiskusikan tentang tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna (meaning) subjektif bagi dirina dan dikaitkan dengan orang lain. Untuk memahami Batasan konsep tindakan sosial ada baiknya kita ambil satu contoh. Katakanlah Anda seorang pria, biasa dipandang tidak pesolek. Ketika gaya rambut anda berubah, dari sisiran kesamping, dikenal sebagai beatle, menjadi belah tengah, membuat para sahabat anda memberikan bermacam komentar. Jawaban Anda adalah "cari suasana baru saja!", maka aktivitas mengubah gaya rambut, apapun alasannya, dapat dipandang sebagai tindakan sosial. Kenapa demikia? Apapun alasan anda, tetap akan berujung pada keberadaan kaaitan dengan orang lain atau dikenal dengan konsep sosial. Oleh sebab itu, tindakan Anda yang memilki makna subjektif, seperti "cari suasana baru saja!", berkait dengn sebelumnya dalam kaitannya dengan orang lain. Inilah dimensi sosial dari suatu tindakan subjektif. Oleh sebab itu, tindakan ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Sebab tindakan ekonomi, pada umumnya, tidak berada di ruang hampa sosial. Namun sebaliknya, ia dibangun, diprtahankan, dan dibubarkan pada ruang sosial. Tindakan ekonomi yang diorientasikan secara sosial pada masyarakat yang sering pula diperbincangkan dalam dunia akademik adalah ekonomi moral dan ekonomi rasional.

B. Ekonomi Moral

Tindakan ekonomi dalam masyarakat yang berhubungan dengan ekonom moral, tidak hanya dihadapi oleh komunitas petani, tetpi juga oleh komunitas pedagang. Dalam bagian ini, kedua komunitas ini akan dibahas.

♦ Ekonomi Moral Petani

Dalam *The Making of the English Working Class*, E.P. Thompson memperkenalkan konsep ekonomi moral (moral economy) dalam dunia akademik. Konsep ini digunakan oleh James C. Scott untuk mnjelaskan tindakan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Asia Tenggara. Dalam bukunya, *The Moral Ekonomy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Scott melihat tindakan ekonomi perdesaan di Asia Tenggara berbeda dari tindakan ekonomi yang ada pada masyarakat Barat.

Scott mendefinisikan ekonomi moral sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonom dan definisi kerja mereka tentang eksploitasipandangan mereka tentang pungutan-pungutan terhadap hasil produksi mereka mana yang dapat ditoleransi mana yang tidak dapat. Menurut Scott, petani akan memperhatikan etika subsitensi dan norma resiprositas yang berlaku dalam masyarakat mereka.

Etika subsisteni merupakan perspektif di mana petani yang tipikal memandang tuntutan yang tidak apat dielakan atau sumber daya yang dimilikinya dari pihak sesame warga desa, tuan tana, atau pejabat. Tuntutan ini dinilai, pertama bukanlah dari segi tingkat absolutnya, misalnya apakah pungutan atau sewa itu besarnya 15 persen atau 35 persen dari hasil panen, tetapi atas dasar bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan tersebut dapat mempersulit atau meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh petani untuk tetap berada diatas tingkat krisis substensi, misalnya jika pada musim jelek tingkat sewa 15 persen dari hasil panen yang dikenakan pada petani akan menimbulkan amarah perlawanan yang lebih hebat eksplosif dibandingkan dengan penarikan sewa pada musim baik, meskipun tingkat absulutnya jauh lebih tinggi misalnya 35 persen atau bahkan mungkin 45 persen. Ini berarti bahwa kriteria petani tentang etika subsistensi adalah apa yang tersisa ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan bukannya tingkat tuntutantuntutan itu sendiri.

Etika substebsi tersebut, berdasarkan pandangan scott, muncul dari kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan dan merupakan konsekuensi dari satu kehidupan yang begitu dekat dengan garis bats dari krisis subsistensi. Suatu panen yang gagal berarti bukan hanya kekurangan makanan tetapi juga bermakna pengorbanan rasa harga diri karena menjadi beban orang lain atau menjual sepersekian keeping (tumpak) sawah dari luas tanah yang memang dimilikinya sedikit atau menjual satu-satunya ternak sebagai pembajak sawahnya atau apa saja yang dapat dijual.

Oleh karena kebanyakan ruamah tangga petani hiduo begitu dekat dengan batas-batas subsetesnsi dan menjadi sasaran-sasaran permainan alam serta tuntutan-tuntutan dari pihak luar, maka mereka meletakan etika substensi atas dasar pertimbangan prinsip safety first (dahulukan selamat). Hal ini ditunjukan oleh banyak pengaturan teknis, sosial, dan moral dalam masyarakat ini dilatarbelakangi oleh prisip dahulukan selamat. Dalam bercocok tanam, misalnya, mereka berusaha menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupan mereka dan bukan berusaha memperoleh keuntugan besar dengan mengambil resiko. Pleh sebab itu, dalam memilih jenis bibit dan cara-cara bertanam mereka lebih suka meminimumkan kemungkinan terjadinya suatu bencana daripada memaksimumkan penghasilan rata-ratanya. Dengan demikian, strategi ini menyampingkan pilihan-pilihan yang mengandung risiko kerugian yang sangat besar yang membahayakan substensinya, meskipun pilihan memberikan harapan akan mendatangkan hasil bersih rata-rata yang lebih tinggi. Ini berarti pula bahwa persoalan-persoalan seperti keuntungan yang diperoleh dari investasi, hasil tiap unit lahan, produktivitas tenaga kerja, pada hakikatnya merupakan persoalan nomor dua. Kenyataan dari prinsip dahulukan selamat untuk mencapai terjaminnya substensi diperlihatkan dalam keberagaaman pilihan dalam proses produksi memilih tanaman yang menumpang---misalnya tanaman kacangkacangan---sebelum tanaman yang ditumpang ata utama (padi) dapat dipanen, kecenderungan menggunakan beberapa jenis bibit untuk memencarkan risiko, memilih jenis-jenis bibit yang hasilnya manta meskipun tidak banyak karena telah teruji dari pengalaman mereka bertahun-tahun dan dipetik dari pengetahuan pertanian tradisi.

Dari susdut pandang ekonomi morsl petani, substensi itu sendiri merupakan hak; oleh sebab itu ia sebagai tuntutan moral. Maksudnya adalah petani merupakan kaum yang miskin mempunai hak sosial atas substensi. Oleh karena itu, setiap tuntutan terhadap petani dari pihak tuan tanah sebagai elit desa atau nengara tidaklah adil apabila melanggar kebutuhan substensi. Pandangan moral ini mengandung makna bahwa kaum elit tidak boleh melanggar cadangan substensi kaum miskin pada musim baik dan memenuhi kewajiban moralnya yang positif untuk menyediakan kebutuhan hidup pada musim jelek.

Norma resiprositas merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antar individu: antara petani dan sesame warga desa, petani dan tuan tanah, petani dan negara. Prinsip moral ini berdasarkan gagasan bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantu atau paling tidak jangan merugikannya. Lebih khususnya, lamjut scott (1976), prinsip itu mengandung arti bahwa suatu hadiah atau jasa dengan timbal balik untuk membalas satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas satu hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari. Ini berarti bahwa kewajiban untuk membalas budi merupakan suatu prisip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik pihak-pihak sederajat maupun pihak-pihak yang tidak sederajat. Hubungan sederajat di sini dimaksudkan anatara petani dengan sesame warga desa. Misalnya dalam mengadakan upacara selamatan kelahira anak di jawa, para warga sedesa akan dating membantu dalam pelaksanaan serta mengahdiri acara tersebut. Yang punya helat pada kesempatan ini di mana warga sedesa yang melakukan upacara seremonial atau ritual, dia berkewajiban menolong pelaksaan dala bentuk tenaga terutama dan menhgadiri acara

tersebut. Hubungan tidak sederajat dicintohkan dengan hubungan petani penggarap dengan tuan tanah yang membentuk hubungan patron klien. Mengambil contoh upacara selamatan tersebut, tuan tanah berkewajiban secara moral untuk membantu terlaksananya upacara dengan memberi sejumlah uang kepada petani yang menggarap sawahnya yang mengadakan perhelatan. Konekuensina adalah petani penggrap tersebut punya kewajiban moral pula untuk menunjukan loyalitasnya kepada sang tuan tanah, ,misalna memberikan dukungan kepada sang tuan tanah untuk diangkat menjadi kepala desa, dengan suaranya kepada patron.

Bagaimana hubungan antara keamanan subsistensi dan pilihan dan tata nilai petani? James Scott (1976) telah meletakan dasar stratifikasi sosial masyarakat petani atas tingkat keamanan subsistensi mereka. Karena penghasilan sangat rawan terhadap guncangan krisis subsistensi. Scott meletakan petani pemilik lahan pada lapisan atas karena mereka memiliki sarana subsistensi, meski kecil, yang karenanya subsistensi mereka dapat terjamin. Pada lapisan kedua adalah petani penyewa. Keamanan subsistensi mereka terjamin oleh tuan tanah yang menjadi patron mereka. Adapun lapisan terbawahnya yaitu buruh. Meskipun penghasilan mereka mungkin lebih tinggi dari petani pemilik lahan kecil dan petani penyewa, tetapi mereka lebih rawan terguncang krisis subsistensi. Ini disebabkan tingkat jaminan subsistensi paling jelek: mereka tidak puya lahan pertanian dan tidak punya patron pelindung subsitensi.

Berdasarkan prinsip etika subsistensi yaitu semua keluarga dalam desa dijamin subsistensi minimalnya selama sumber-sumber daya yang dikuasai oleh warga desa memungkinkannya, maka dengan demikian berarti bahwa setiap warga menpunyai asuransi risiko terhadap krisi

subsistensi. Jaminan subsistensi tersebut merupakan pengejawatahan dari control-kontrol sosial yang informal norma resiprositas. Warga desa yang berupaya mempunyai kewajiban moral untuk menyumbangkan dana untuk orang yang mendapat kemalangan atau mempunyai lebih banyak pembantu rumah tangga dari warga lainnya, misalnya. Konsekuensinya adalah orang berpunya tersebut mendapatkan gengsi yang tinggi dibandingkan warga lain dan dikelilingi oleh banyak klien yang patuh setiap saat untuk diperintah, jika tidak dermawan maka reputasinya akan jatuh dan kedudukan moralnya rendah di masyarakat.

Dalam kaitan keaamanan subsistensi dengan pilihan terhadap risiko, petani lebih memilih sitem bagi hasil daripada system sewa. Karena system sewa mempunyai risiko subsistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagi hasil. Karena keadaan hasil panen, baik atau tidak, tidak punya pengaruh terhadap pembayaran sewa. Adapun pada system bagi hasil, jumlah panennya dibagi dua antara tuan tanah dan petani. Di samping itu, jika masih buruk, tuan tanah akan menjamin kebutuhan subsitensi petani.

Hubungan dengan nilai dan pilihan risiko, konsepsi petani dengan negara yang baik dari dunia nyata ini adalah negara yang hanya memungut pajak atas surplus dalam musim yang baik dan membantunya dalam musim sulit. Pajak yang disukai adalah pajak proposional daripada pajak tetap. Artinya penetapan pajak berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh petani dan tidak menghadapkan petani kepada krisis subsitensi.

Gambaran yang disajikan di atas merupakan keadaaan masyarakat petani yang belum mengalami perubahan. Pertumbuhan negara colonial dan komersialisasi pertanian yang membawa masyarakat petani ke dalam ekonomi dunia telah memperumit dilemma keterjaminan subsistensi kaum petani. Hal ini disebabkan sekuranf-kurangnya oleh lima cara:

a. Ketidakstabilan yang Bersumber dari Pasar

Ekonomi pasar yang diperknalkan ke dalam masyaralat petani tidak hanya berlingkup pasar setempat (lokal) tetapi juga pasar dunia. Pada pasar dunia hubungan antara hasil panen setempat dan harga terputus. Dengan kata lain, naik turunnya harga terlepas dari permintanpenawaran setempat.

b. Perlindungan Desa yang Semakin Lemah

Terjadi erosi dalam pemberian perlindungan dan pemikul risiko oleh kelompok kerabat dan pada nilai desa, karena terjadi perubahan structural seperti berkurangnya sumber daya yang dimiliki kelompok kerabat mauoun desa secara Bersama (komunal) dan diperkenalkannya hokum positif colonial sebagai pengganti hokum-hukum yang diwarisi secara turun-temurun.

c. Hilangnya Sumber Daya Subsistensi Sekunder

Tanah milik desa di mana para warga menggembalakan ternak dan hutan milik desa di mana petani mengambil kayu bakar bukan lagi milik komunal masyarakat desa, ia sudah menjadi suatu yang komersial dan seseorang yang memanfaatkanya harus bayar pajak. Di samping itu, kerajinan -kerajnan yang dilakukan pada waktu luang sudah berarti lagi dalam membantu subsistensi mereka karena harganya jatu---seperti periukbelanga. Hal ini disebabkan oleh kehadiran produk komersial---panci alumunium---yang lebih murah dan tahan lama.

d. Buruknya Hubungan Kelas Agraris

Ditandai dengan perubahan sifat peran tuan tanah dari peternalistik dan pelindung menjadi impersoanal dan kontraktual. Tuan tanahh bukan

lagi pemikul risiko di masa sult tetapin menjadi tukang pungut uang sewa tetap, bukanhanya dilakukan pada musimbaik tetapi juga pada musim buruk.

e. Negara Kolonial yang Semakin Ekstensif dan Intensif dalam Memungut Pajak

Bukan hanya pajak kepala dan tanah, yang pernah dipungut oleh pemerintah tradisional prakolonial, tetapi juga diperluas kepada aktivitas yang berkaitan dengan subsistensi seperti pajak perahu, pajak garam, dan seterusnya. Selain itu juga keamampuan birokrasi yang rapi---baik melaluikertas maupun melalui senapan---membuat petani tidak berdaya untuk menolak membayar pajak, seperti ketika masa prakolonial mereka bisa menolak dengan melarikan diri kedaerah lain dengan meminta perlindungan kepada raja di mana tempat melarikan diri tersebut dilakukan.

Ketidakbrdayaan kaum tani untuk mempertahankan subsistensinya diperburuk oleh depresi pada tahun 1930. Depresi meyebabkan harga beras jatuh telak sampai separuh bahkan sampai seperempat dari harga sebelumnya, tarif upah merosot tajam, dan volume lapangan kerja menyusut. Disisi lain, kaum tani (petani pemilik lahan kecil, penyewa, dan buruh tani) menghadaoi pengeluaran penting yang tidak ditawar lagi berupa pajak kepala, pajak tanah, utang-utang, dan sewa tanah yang besarnya tidak berubah atau sedikit berkurang. Masalah yang paling dominan dari semua bentuk pengeluaran adalah pajak yang dipungut oleh negara. Negara beserta aparatnya dengan mudah menyita segala apa ynag tersisa dari milik kaum tani sebagai ganti pembayaran pajak. Bagi petani ini merupakan peningkatan ketidakpastian terhadap jaminan subsistensi mereka. Beban pajak yang terlalu berat bekombinasi dengan tekanan

demografis dan demostrasi terhadap pengurangan pajak di kalangan petani. Pada titik kulminasinya protes-protes dan demonstransi tersebut berubah menjadi pemberontakan.

C. Ekonomi Moral Pedagang

Pandangan James C. Scott tersebut memberiksn inspirasi bagi Hans-Dieter Evers dan kawan-kawan untuk menulis ekonomi moral pedagang. Evers dan kawan-kawan dalam buku mereka, *The Moral Ekonomy of Trade: Ethnicity and Developing Market (1994: 7)* menyetujui pendapat James Scott (1976: 176) bahwa masyarakat petani umumnya dicirikan dengan tingkat solidaritasnya yang tinggi dan dengan suatu system nilai yang menekankan tolong menolong, pemilikan Bersama submerdaya dan keamanan subsistensi. Dengan system nilai yang menekankan tolong-menolong, pemilikan bersama sumber daya dan keamanan substensi. Terdapat bukti kuat bahwa, Bersama-sama dengan resiprositas, hak terhadap subsitensi merupakan suatu prinsip moral yang aktif dalam tradisi desa kecil.

Dalam kondisi seperti ini pedagang menghadapi dilema yaitu memilih antara memenuhi kewajiban moral kepada kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga untuk menikmati bersama pendapatan yang diperolehnya sendiri di satu pihak dan untuk mengakumulasikan modal dalam wujud barang dan uang dipihak lain. Lebih jelasnya Evers (1994) mengemukakan:

Para pedagang dalam masyarakat petani dihadapkan dengan sejumlah masalah pokok. Pedagang mungkin harus membeli berbagai komoditas dari petani-petani yang masuk anggota dari komunitas mereka sendiri, tetapi menjual komoditas tersebut kepada pihakpihak lain di luar desa mereka. Di luar desa para pedagang

dihadapkan dengan tuntutan anonym yang bersifat anarkis dan berasal dari pasar terbuka dengan fluktuasi harga yang liar. Mengingat bahwa para pedagang diharapkan membayar harga wajar pada penghasil dari produk pertanian, mereka hars menjual dengan harga pasar setempat, harga pasar nasional, dan bahkan pasar dunia.

Evers (1994:8) memberikan suatu kasus menarik tentang bagaimana seorang wanita, pada sebuah komunitas desa kecil, yang mendirikan sebuah warung menghadapi dilema tersebut. Jika dia menetapkan harga tertinggi yang diperkiraka terjangkau oleh sesama warga desa, maka dia akan diasingkan karena dianggap rakus.

Menghadapi dilema seperti itu, para pedagang dalam masyrakat petani telah mencoba mengatasinya dengan cara-cara sendiri. Evers (1994: 10) telah menemukan solusi atau jalan keluar yang berbeda yang dilakukan oleh para pedagang menghadapi dilema tersebut yaitu:

a. Imigrasi Pedagang Minoritas

Kelompok minoritas baru dapat diciptakam melalui migrasi atau dengan etnogenesis, yaitu munculnya identitas etnis baru. Cintoh yang menarik dari pemikiran ini adalah "pedagang kredit" yang sebagian berasal dari suku Batak dan beragama Kristen yang melakukan aktifitas dagangnya di Sumatera Barat. Dengan kata lain, orang di desa dapat membeli barang dengn pembayaran cicilan, dengan catatan barang yang dibeli tersebut telah diterima ketika pembayaran cicilan pertama. Mereka berhasil mendominasi beberapa pusat pembelanjaan di Jakarta misalnya Tanah Abang, Blok A, Cipulir, dan lain-lain. Dengan mengikuti jala pikiran Evers, jawaban atas pertanyaan di atas dapat diberi, yaitu jika orang Minangkabau sendiri melakukan perdagangan kredit, seperti suku Batak, di kampung halaman tempat asalnya maka dia akan dihadapkan

kepada dilema yaitu antara mencari keuntungan untuk mengakumulasi modal dan kewajiban moral untuk menikmati Bersama orang sekampung atas penghasilannya.

b. Pembentukan kelompok-kelompok Etnis atau Religius

Munculnya dua Komunitas moral yang menekannan pentingnya kerja sama tetapi tidak keluar dari batas-batas moral. Menurut Evers (1994: 8-9) ada beberapa cara yang dilakukan agar hal ini dapat berlangsung. Satu kemungkinan, misalnya menerima suatu agama baru atau menganut agama sebagaimana yang digariskan oleh aturan-aturan yang telah ditentukan dengan memperlihatkan kegairahan dalam menjalankan aturan-aturan tersenut. Ini berarti terdapat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat pedesaan Sumatera Barat dan "pedagang kredit" yang masng-masing memiliki komunitas moral sendiri, yaitu agama Islam dan agama Kristen.

c. Akumulasi Status Kehormatan (Modal Budaya)

Kembali kepada studi Geerzt (1963), kedermawanan, keterlibatan dalam urusan masyarakat, berziarah, menunaikan ibadah haji yang dilakukan oleh santri membri dampak kepada akumulasi modal budaya yang dimiliki. Dengan kata lain, peningkatan akumulasi modal budaya berarti peningatan derajat kepercayaan masyarakat sehingga memudahkan pedagang untuk melakukan aktifitasnya.

d. Munculnya Perdaganan Kecil dengan Ciri "ada uang ada barang"

Dengan mengambil fenomena pedagang bakul di Jawa, Evers melihat bahwa para pedagang bakul kurang ditundukan oleh tekanan solidaritas desa bila dibandingkan dengan pedagang yang lebh besar dan lebih kaya serta suka pamer. Menurut Evers (1994:9) perdagangan kecil yang diperlihatkan di atas merupakan ciri-ciri standar pada semuaa masyarakat petani. Dengan ciri-ciri ini yang dimiliki oleh pedagang kecil tersebut memungkinkanpedagan untuk menghidari dilema yang biasanya dihadapi pedagang dalam masyarakat petani.

e. Depersonalisasi (Ketidaklekatan) Hubungan- hubungan Ekonomi

Jika ekonomi pasar berkembang dan hubungan ekonomi relative tidak terdferensiasi, maka pedagnag ditransfomasikan kedalam dilema sosial semua pasar ekonomi kapitalis. Dari kelima solusi terhadap dilema pedagang yang diajukam tersebut bahwa perdagangan mensyaratkan adanya jarak sosial dan budaya terhadap pelanggan.

D. Ekonomi Rasional

Gambaran desa petani (peasant villages) pada ekonomi moral dari James Scott tersebut, kata Samuel L. Popkin (1986), merupakan idealisasi masyarakat desa yang tertutup, desa yang belum memiliki kontak dan terbuka terhadap masyarakat lain. Desa-desa yang memiliki kontak dan terbuka terhadap masyarakat lain. Desa-desa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak secara kolektif sebagai tanggung jawab desa.
- b. Adanya batas tegas antara dea dengan dunia luar.
- c. Terdapatnya larangan penguasaan tanah sebagai hal milik pribadi.
- d. Konsep kewargaan desa yang jelas.
- e. Tanah adalah hak ulayat desa.

Sementara desa petani tertutup (closed villages) tersebut, lanju Popkin (1986), sebagian besar telah mengalami transformasinya menjadi desa terbuka (open village). Sehingga ciri-cirinya berubah menjadi:

- a. Pembayaran pajak merupakan tanggungjawab individual.
- b. Batas desa dengan dunia luar kabur.
- c. Tidak ada atau sedikit larangan pemilikan taah bagi orang luar desa.
- d. Konsep kewargaan desa kabur.
- e. Terjadinya privativasi kepemilikan tanah.

Idealisasi desa petani tertutup tidak bisa dipahami jika didekati melalui ekonomi rasional, sebab petani dipandang sebagai makhluk yang rasional. Dia mepertimbangkan berbagai macam alternative yang ada, yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteran mereka atau paling tidak dapat mempertahankan apa yang sedang dinikmati, baik bagi dirimu maupun bagi keluarganya.

Selanjutnya ekonomi moral melihat bahwa pasar merupakan ancaman terhadap tatanan desa yang harmonis dan komunal seta yang memberikan jaminan subsitensi. Oleh sebab itu, menurut ekonomi moral, jika petani masuk ke dalam pasar dengan menjual produk petanian mereka atau tenaga kerja mereka karena ada sesuatu yang mekasa dari suatu kekuatan yang berada diluar mereka. Penjelasan tersebut, menurut ekonomi rasional, mengabaikan kenyataan kenyataan bahwa pasar memberikan konstribusi positif bagi masyarakat. Pasar menyebabkan petani menghadapi keridakpastian yang baru dan berbeda-beda, namun pasar menyediakan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh Lembaga lain sepeti harga yang stabil dan pasokan makanan yang lebih banyak (Popkin, 1986: 59).

Ekonomi moral melihat pemberontakan terjadi adanya gangguan terhadap subsistensi petani ang disebabkan oleh adnya kolonialisme dan pasar yang kapitalistik. Suatu pemberontakan dilakukan tidak secara membabi buta, sebaliknya dilaksanakan dengan perhitungan yang matang

bahwa mereka yakin memperoleh manfaat yang menguntungkan di masa yang akan datang.

E. Masyarakat Indonesia: Ekonomi Moral Atau Ekonomi Rasional

Perbedaan pendekatan antara ekonomi moral dan ekonomi rasional merupakan perdebatan yang susah untuk didamaikan pada komunitas antorpologi. Sementara, dalam sosiologi, perdebatan tersebut telah diakhiri dengan penjelasan Max Weber tentang tindakan sosial dalam aktivitas ekonomi di mana tindakan tersebut tidak hanya bersifat tindakan rasional, tetapi juga bisa tindakan rasional, dan tindakan spekulatifirrasional. Adapun di Indonesia, salah seorang ilmuan yang menjembatani kedua pendekatan tersebut adalah Destha T. Raharjana. Dalam penelitian tesis Raharjana, seperti disunting oleh Ahimsa-Putra (2003: 61-138), tentant siasat kaum santri dalam usaha konfeksi mengguakan baik strategi moral maunpun strategi rasional dalam melakukan usaha konfeksi mereka. Strategi moral yang digunakan para pengusaha santri dala menggerakan usaha mereka berupa mendidik orang menjadi pengusaha, melibatkan santri berbagai tenaga, dan membentuk hubungan langganan. Pengusaha konfeksi yang dipandang berhasil merasa memiliki kewajiban untuk membantu pihak yang mebutuhkan, terutama para kerabat atau tetangga yang berkeinginan jadi pengusaha pula. Hubungan antara pengusaha dan para santri ini membentuk suatu hubungan patro klien yang dipandang saling menguntungkan. Selanjutnya hubungan kepercayaan antara dua belah pigak dalam meminjam barang dagangan untuk dijual di pasar, denganpara pedagang yang ada di pasar.

Sementara strategi rasional yang dilakukan oleh para pengusaha adalah berupa tindakan ekonomi yang dilatarbelakangi untuk mendapatkan keuntungan, meliputi menyerahkan pekerjaan kepada pihak lai, mengerjakan produk yang sedang laku, dan mempermainkan harga.

BAB 11. EKONOMI DAN ASPEK KEHIDUPAN (ECONOMY AND ASPECTS OF LIFE)

A. Aspek Kehidupan

Kehidupan umat manusia memiliki beragam aspek. Ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan manusia. Perbincangan buku ini difokuskan pada aspek ekonomi dari kehidupan umat manusia. Pada beberapa bab awal telah didiskusikan sebagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut menjadi tema sentral dari semua aktivitas kehidupan umat manusia.

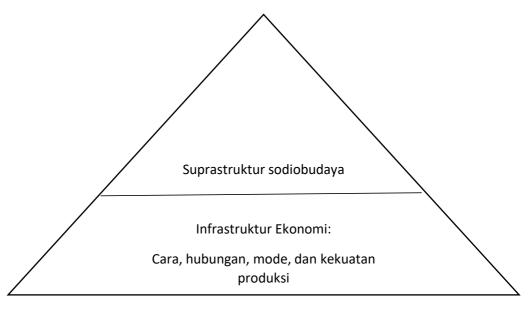
Kehidupan umat manusia tidak hanya berkisar pada pusaran ekonomi saja, tetapi ada dimensi lain seperti aspek politik dan aspek sosiobudaya dari kehidupan. Hubungan dari berbagai aspek kehidupan umat manusia tersebut telah didiskusikan oleh berbagai para sosiolog antara lain Karl Marx dan Max Weber.

Menurut pandangan Marx "keberadaan menentukan kesadaran". Artinya, kondisi-kondisi kehidupan material menentukan kesadaran normatif atau kesadaran sosiologi seseorang. Bagaimana kita memahami hal ini? bahwa cara berfikir,merasa,bertindak dan berperilaku tentang pemerintahan,partai gaya,hidup,pertemanan atau ideologi seseorang dipengaruhi oleh kondisi material (infrastruktur ekonomi) yang dimiliki. Mari kita ambil suatu ilustrasi. Katakanlah anda melakukan suatu penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta. Dalam perjalan tersebut anda dipastikan akan duduk bersama dengan penumpang lain pada baris kursi yang sama. Apa saja pertanyaan pembuka yang diajukan dalam percakapan awal jika memang ada percakapan dengan penumpang lain

yang bersebelahan? Biasanya pembicaraan pembuka berkisar tentang apa tujuan perjalanan,tinggal di mana dan apa pekerjaan yang dimiliki. Ketiga pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan keberadaan kondisi mateial seseorang. Berdasarkan pengetahuan tentang kondisi material tersebut,orang menentukan sikap,cara perilaku,dan tindakan terhadap orang lain. Inilah yang dimaksud dengan keberadaan (kondisi material yang dimiliki) memengaruhi keadaan (sikap,cara,perilaku dan tindakan) seseorang.

Marx juga menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada infrastruktur ekonomi, yang di dalamnya terkandung cara produksi, hubungan produksi, mode produksi dan kekuatan produksi, akan menyebabkan perubahan pula pada suprastruktur sosiobudaya, terdapat di dalamnya aspek-aspek politik, sosio budaya, dan ideologi dari kehidupan. Itu artinya bahwa bangunan infrastruktur ekonomi merupakan landasan di mana diatasnya dibangun suprastruktur sosiobudaya. Untuk menajamkan pemahaman tentang topik ini, gambar berikut diharapkan akan membantu pemahaman.

Bagaimana pandangan Max Weber tentang hal ini? Dalam *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Weber menyatakan bahwa ketelitian yang khusus, perhitungan dan kerja keras dari bisnis Barat didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke-16 dan digerakan oleh *doktrin Calvinisme*, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan.



Gambar 11.1. Bangunan Suprastruktur Sosiobudaya di Atas Infrastuktur Ekonomi

Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah seorang yang dipilih. Dalam kondisi seperti ini menurut Weber, pemeluk calvinisme mengalami "panik terhadap keselamatan" cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berfikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkahi tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan. Untuk mencapai keberhasilan, seseorang harus melakukan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan politik, yang dilandasi oleh disiplin dan bersahaja, menjauhi kehidupan bersenang-senang, yang didorong oleh ajaran keagamaan. Aktivitas kehidupan itu sendiri, dalam bahasa Jerman dikenal dengan *Beruf*, memiliki dua makna. Pertama *Beruf* bermakna pekerjaan, yaitu suatu aktivitas untuk dapat bertahan dalam kehidupan. Kedua *Beruf* memiliki arti sebagai panggilan (*calling*), yaitu suatu panggilan illahiah,suatu

panggilan suci dari sang maha kuasa. Dalam perspektif ini,oleh karena itu, orang melakukan pekerjaannya dengan sesungguhnya, semaksimal yang mungkin dapat dia lakukan dalam berbagai dimensi (efektivitas, efesien, rasional, dan bertanggung jawab menggunakan waktu, ruang, dan sumber daya). Menurut Weber etika kerja dari Calvinisme yang berkombinasi dengan semangat kapitalisme membawa masyarakat barat kepada perkembangan masyarat kapitalis modern. Jadi, doktrin Calvinisme tentang takdir memberikan daya dorong psikologis bagi rasionalisasi dan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap pembentukkannya.

Hubungan antara semangat kapitalisme dan etika protestan, oleh karena itu, memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal baik. Hubungan semacam itu disebut sebagai elective affinity. Hubungan tersebut mengantarkan kapitalisme mentransformasi diri dalam bentuk modern, yang bercirikan: tata buku/akuntansi rasional, hukum rasional, teknik rasional (mekanisasi) dan massa buruh menerima upah di pasar bebas karena mereka perlu untuk memperoleh penghasilan.

Jadi, terdapat perbedaan pandangan antara Marx dan Weber dalam menjelaskan hubungan antara ekonomi dan aspek kehidupan lainnya seperti politik dan sosiobudaya. Marx secara tegas memprlihatkan bahwa ekonomi yang mempengaruhi aspek politik dan sosiobudaya dari kehidupan. Sedangkan Weber menunjuk konsep elective affinity, yaitu memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik antar ekonomi dengan aspek politik dan sosio-ekonomi.

B. Relasi Kekuasaan Ekonomi dan Aspek Kehidupan

Sebelum didiskusikan relasi kekuasaan, terlebih dahulu perlu di pahami tentang keberadaan kekuasaan dari setiap aspek kehidupan (ekonomi, politik, dan sosiobudaya). Realitas keberadaan kekuasaan ekonomi terletak di pasar. Selanjutnya kenyatan keberadaan kekuasaan politik berada pada negara. Sedangkan kenyatannya keberadaan kekuasaan dari sosiobudaya diemban oleh civil society.

1. Kekuasaan Ekonomi

a) Pengertian Pasar

Dalam bahasa latin, pasar dapat ditelesuri melalui akar dari kata *mercatu*, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Terdapat tiga makna yang berbeda di dalam pengertian tersebut: satu, pasar dalam artian secara fisik; dua, dimaksudkan sebagai tempat mengumpulkan; tiga, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu market place. Pada abad ke-16, pengertian pasar, menurut Swedberg seperti yang dikutip Zusmelia (2007:10), menemukan arti baru, yaitu "membeli dan menjual secara umum" dan "penjualan (Interaksi pertukaran) yang di kontrol oleh demand dan supply". Kelihatannya definisi yang disebut terakhir inilah yang dirujuk oleh ilmu ekonomi sampai saat sekarang ini.

Dalam bukunya Penjaja dan Raja, Clifford Geertz (1973:30-31) mencoba menelusuri pengertian pasar sebagi kata serapan dari bahasa Parsi, yaitu bazar, lewat bahasa Arab bermakna suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat, dan suatu dunia sosial-pandangan yang lengkap dalam sendirinya. Jadi dalam pandangan Geertz, merupakan gejala alami dan gejala kebudayaan, di mana keseluruhan dari kehidupan masyarakat pendukungnya di bentuk oleh pasar

Dalam ekonomi klasik, seperti pandangan adam smith,melihat pasar sinonim dalam baik tempat jualan (market place) maupun sebagai suatu daerah geografis. Sedangkan ekonomi yang datang kemudian, seperti alfred Marshal melihat pasar sebagai suatu mekanisme dalam penciptaan harga.

Sedangkan sosiologi memandang pasar sebagai fenomena sosial yang kompleks dendan berbagai macam perangkatnya. Pasar dapat di pandang dari sudut yang beragam misalny pasar merupakan suatu struktur yang padat dengan jaringan sosial atau yang penuh dengan konplik dan persaingan.

b). Asal Usul Pasar

dalam bukunya the great transformation pada bab rise dan fall of market economy, karl polanyi menjelaskan bagaimana muncul ekonomi pasar dalam masyarakat. Penjelasan polanyi tentang munculnya ekonomi pasar berangkat dari pendapat Thurnwald dari bukunya economic in primitive communities, pasar tidak di temukan di mana mana. Ketiadaanya,menunjukan adanya isolasi tertentu dan kecendrungan ke arah isolasi, tidak lagi di kaitkan dengan suatu perkembangan khusus sebagaimana halnya yang dapat di simpulkan dari kehadirannya. Untuk menunjang kutipan tersebut, polanyi mengutip pendapat penulis lain,

''fakta bahwa suatu suku menggunakan uang, sedikit sekali membedakanya dari suku suku lain yang secara ekonomis tidak menggunakannya pada tingkat budaya yang sama''

Berdasarkan kutipan tersembunyi polanyi mnengaskan bahwa ada atau tidaknya pasar atau uang tidak perlu memengaruhi sistem ekonomi suatu masyarakat primitif. Ini membuktikan ketidak benaran mitos abad ke-19 bahwa uang adalah sebuah penemuan yang kemunculan mau tidak

mau mengubah suatu masyarakat dengan menciptakan pasar, mempercepat pembagian kerja,dan menyalurkan kecendrungan alami manusia untuk melakukan tukar menukar. Karena pasar dalam masyarakat primitif cendrung ke arah isolasi.

Ekonomi klasik berlandaskan pandangan yang berlebihan tentng pentingnya pasar. Mereka memandang bahwa pribadi untuk melakukan barter akan mengarah perlunya pasar lokal dan pembagian kerja yang akhirnya memunculkan perdagangan. Lanjutan perkembanganya adalah munculnya perdagangan luar negeri yang akhirya akan meluas memjadi perdangan jarak jauh argumen ekonomi klsaik tersebut, menurut polanyi, tidak bersua dalam kenyataan. Oleh karena itu, polanyi (1957:58) membalikan rangkayan argumen tersebut :titik tolak yang betul adalah perdangan jarak jauh, suatu akibat logis dari lokasi barang —barang yang bersifat geografis, serta "pembagian kerja"yang d akibatkan oleh lokasi tersebut. Perdangan jarak jauh melahirkan pasar, yakni sebuah pranata yang melibatkan tindakan barter, serta pembelian dan penjualan, jika uang di gunakan dan dengan demikian akhirnya benar-benar di perlukan, untuk menawarkan kepada beberapa individu suatu kesempatan memenuhi kecenderungan mereka melakukan tawar menawar.

Disini terlihat bahwa polanyi menekankan asal mula perdagangan dalam sebuah lingkungan eksternal yang tidak mempunyai kaitannya dengan ekonomi internal.dengan kata lain perdagangan muncul dari usaha untuk mencari barang diluar batas wilayah,adanya suatu jarak.jika suatu komunitas manusia tidak pernah melakukan perdagangan eksternal sama sekali, maka tidak perlu (tidak muncul) pasar.

Berdasarkan data sejarah, polanyi melihat ketidakmungkinan pasar lokal berkembang dari tindakan barter yang bersifat individual. Karena awal dari pasar lokal masih kabur. Polanyi melihat bahwa perantai ini diselimuti oleh penjagaan organisasi ekonomi masyarakat,misalnya melalui tabu, sehingga ia terlindungi dari dari kegiatan pasar perdagangan internal juga dibaluti oleh lembaga sosial politik, seperti monopoli, yang menghambat munculnya pasar.

c). Pasar yang Mengatur Dirinya Sendiri

Konsep pasar yang menagatur dirinya sendiri (self regulating market) merupakan pemikiran ekonomi yang dipengaruhi oleh utilitarianisme dan ekonomi politik Inggris. Apa maksudnya? Utilitarianisme mengasumsi individu adalah makhluq yang rasional, senantiasa menghitung dan membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya sedangkan ekonomi politik Inggris dibangun di atas prinsip laissez faire, laissez passer, yaitu "biarkan hal-hal sendiri, biarkan hal-hal yang baik masuk".artinya, biarkan individu mengatur dirinya, karena individu tahu yang dimauinya. Oleh sebab itu jangan ada kontrol atau intervensi negara. Kalaupun ada kontrol atau intervensi negara, itu diperlukan agar kebebasan individu dengan rasionalitasnya untuk mengejar keuntungan pribadinya tetap terjaga. Sebab kesejahteraan masyarakat umumnya dalam jangka panjang akan sangat terjamin apabila individu itu dibiarkan atau malah didorong untuk mengejar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadinya.

Mari kita pahami dengan contoh. Untuk dapat bertahan hidup,setiap individu perlu bekerja. Individu sendirilah yang lebih mengetahui dibandinkan dengan orang lain,dia harus bekerja apa.Hal ini dikarenakan individu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dari sisi kemampuan, pengetahuan keterampilan, jaringan, dan lainnya yang

dimilikinya.Bagi Hasan, misalnya, lebih cocok bekerja sebagai pedagang emas dbandingkan jadi seorang pengacara. Meskipun dia tamat dari fakultas hukum dari suatu universitas ternama, namun berdasarkan berbagai pertimbangan rasinalnya seperti kemampuan finansial, pengetahuan,keterampilan jaringan,dan dukungan keluarga besarnya yang kebanyakan sebagai pedagang emas maka bekerja sebagai pedagang emas adalah pilihan rasional dan tepat. Lain lagi dengan Andi, dia meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri karena dpandang tidak punya masa depan yang baik dan pindah sebagai penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Andi berpandangan bahwa kalau dia bertahan sebagai pegawai negeri dengan pangkat IIIb pada suatu pemerintahan kota maka dia perlu waktu yang lama untuk bisa beli rumah dan mobil. Oleh karena latar belakang yang cukup bagus,seperti sebelum jadi pegawai negeri telah lama menjadi penggiat LSM sehingga dia punya banyak pengalaman, jaringan,dan konpetensi maka pilihan tersebut rasional dan tepat. Pilihan Hasan, Andi,dan individu lainnya dalam mengejar kepentingan dan kesenangan pribadi mereka sebagai individu diasumsikan menyumbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Menurut Polanyi (1957: 68), ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur dan diarahkan oleh oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi dan distribusi barang dipercayakan kepada mekanisme mengatur diri sendiri (self-regulating mechanism). Ekonomi jenis ini berasal dari suatu harapan bahwa umat manusia akan mengambil sikap sedemikian rupa untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi inimenganggap pasar tempat persedianaan barang, termasuk jasa, dengan harga tertentu yang berdasarkan harga tadi akan

memenuhi permintaan. Juga ini mengandaikan bahwa uang, berfungsi sebagai daya beli, berada ditangan pemiliknya. Disini produksi di kontrol oleh harga, karena keuntungan dari pihak yang menjalankan produksi akan tergantung padanya. Distribusi barang juga akan tergantung pada harga, karena membuat pendapatan dan melalui bantuan inilah barang yang di produksi didistribusikan diantara anggota masyarakat. Berlandaskan permisalan ini, peraturan dalam produksi dan distribusi barang hanya dijamin oleh harga.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Thompson et al.,19910). Dengan kata lain, menurut Caporaso dan Levine (2008:82) memenuhi kebutuhan pribadi adalah sama dengan memenuhi kebutuhan publik.

Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu—individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas,maka penjual mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai pembeli dan penjual, kata Caporaso dan Levine (2008:83-84), maka uang dan komoditas akan mengalami sirkulasi (perputaran) di dalam pasar. Pasar berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah nekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Maka pasar merupakan mekanisme yang pasik karena tidak memengaruhi properti

apa atau mana yang akan dipertukarkan dan kebutuhan yang hendak dipuaskan lewat pertukaran properti itu. Tidap orang bekerja sendiri-sendiri dengan nembeli dan menjual sehingga sekaligus bekerja demi kelancaran pekerjaan orang lain.

Mekanisme yang disebut diatas di pandang oleh Adan Smith sebagai "tangan-tangan tersembunyi" (*invisible hand*). "Tangan-tangan tersembunyi" dapat dipahami melalui kutipan yang sering dipetik oleh para ahli dari bukunya *the wealth of Nations* (1965: 14, 423) sebagai berikut:

"Kita mendapatkan makan malam kita bukan dari kemurahan hati tukang daging, pembuat minuman, atau pembuat roti, tetapi dari penghargaan mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Kita tidak memerhatikan terhadap kemanusiaan mereka, tetapi cinta diri mereka ... setiap individu (yang) ... menggunakan kapital ... dan ... tenaga kerja ... tidak bermaksud untuk mempromosikan kepentingan publik, dan tidak tahu seberapa besar ia mempromosikannya ... dia ... dibimbing oleh tangan-tangan tersembunyi untuk mempromosikan kepentingan masyarakat [tanpa disadarinya]."

"Tangan-tangan tersembunyi", dengan kata lain, seperti kata Levacis (1991), merupakan karakteristrik yang penting dari pasar. Ia dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktivitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan sutu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. menurut Levacic, suatu harga yang relatif tinngi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti

merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian dari produser. Ini pada gilirannya akan membuat indrusti tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi,harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (self-adjusting mechanism of the market). ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

d). Kegagalan Pasar

Bagi penganut ekonomi klasik, seperti J.B. Say dan David Richardo, mempercayai bahwa kegagalan pasar merupakan hal yang mustahil terjadi. Kenapa demikian? Jika memang ada penderitaan yang ditimbulkan oleh pasar maka penderitaan tersebut terjadi secara individual saja. Dengan kata lain, pendapatan dan kesejahteraan dari seseorang penjual tertentu dapat saja menurun oleh kondisi pasar, tetapi pendapatan dan kesejahteraan dari semua penjual sebagai satu kesatuan tidak mungkin bisa mengalami kerugian. David Richardo (1951: 290), oleh karena itu, memberikan argumen: "orang memproduksi selalu dengan tujuan agar ia bisa menjual dan mengonsumsi dan begitu juga orang menjual selalu dengan tujuan agar bisa membeli komoditas lain, yang bisa berguna secara langsung baginya atau bisa berguna bagi kegiatan produksinya di masa depan. Maka ketika seseorang melakukan produksi, ia dapat sekaligus menjadi konsumen bagi barangnya sendiri atau dapat menjadi pembeli dan konsumen dari barang orang lain. Bisa jadi dia tidak tahu apa komoditas yang paling menguntugkan untuk ia produksi, tetapi ketidaktahuan itu tidak mungkin berlangsung lama,

sehimgga ia pasti akan selalu bisa mencapai tujuannya, yaitu memiliki barang-barang lain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa orang tidak mungkin akan terus-menurus memproduksi sebuah komoditas yang tidak diinginkan orang lain".

Argumen tidak mungkin terjadi kegagalan pasar sebagai keseluruhan, yang mungkin hanyalah kegagalan individual yang tidak mampu menemukan pembeli, ditegaskan dalam penjelasannya sebagai berikut:

Bisa jadi ada satu komoditas tertentu yang di produksi dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga pasar menjadi jenuh dan produser dari barang itu tidak berhasil mendapatkan kembali kapital yang sudah ia keluarkan untuk memproduksi barang-barang itu. Tetapi hal semacam itu tidak mungkin terjadi pada semua komoditas. Misalnya, permintaan terhadap jagng akan dibatasi oleh jumlah orang yang mau mengonsumsinya, atau permintaan terhadap sepatu dan mantel akan dibatasi oleh jumlah orang yang mau mengenakannya. Tetapi biarpun ada masyarakat tertentu yang bisa memiliki jagung sebanyak mungkin sehingga ia bisa makan jagung sepuasnya, atau memiliki mantel dan sepatu sebanyak mungkin sehingga bisa mengenakannya sepuas-puasnya, hal semacam itu tidak mungkin terjadi pada semua komoditas dalam masyarakat, baik dalam komoditas yang dibuat dalam kemampuan manusia maupun komoditas yang disediakan alam(1951: 292).

Jadi, jika pasar bertahan dan berkembang adanya mekanisme pasar yang mengtur dirinya sendiri. Alferd Marshal dalam *Principle of Economics* menyatakan bahwa permintaan dan penawaran secara simultan akan menciptakan suatu harga. Dengan kata lain, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran memiliki kontribusi dalam

menciptakan harga bagaikan sebuah gunting yang memiliki dua sisi yang berbeda yang memotong secarik kertas. Kertas bisa terpotong karena keseimbangan kedua sisi gunting dalam.

Bagi penganut ekonomi klasik melihat bahwa apabila pasar yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum permintaan dan penawaran berjalan dengan sepurna, maka tidak dimungkinkan terjadinya kegagalan pasar. Kalau demikian, apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar menurut pengan. ekonomi klasik? Kegagalan pasar dari sudut pandang ekonomi klasik disebabkan karena faktor-faktor di luar pasar itu sendiri.

Berbeda dengan penganut ekonomi klasik, menurut Caporaso dan Levine (2008: 198), para penganut ekonomi neoklasik melihat bahwa sebagai kemungkinan pasar institusi yang memberikan terbentuknyapeluang yang mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki penawaran sedemikian rupa, sehingga kebutuhan semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada. Pasar juga dilihat sebagi institusi yang memungkinkan terciptanya peluang yang semaksimal mungkin bagi pertukaran secara bebas sehingga memungkinkan terwujudnya efisensi yang seluas-luasnya. Pasar memberikan kemungkinan bagi individu untuk mengganti sumber daya atau komoditas yang hendak ia gunakan agar bisa memenuhi keinginannya. Jika dipandang dari perspektif konsumen, lanjut Caporaso dan Levine, situasi semacam ini tercipta jika ada banyak jenis barang konsumen di pasar yang bisa ia pilih. Sedangkan dari perspektif produsen, situasi tercipta ketika ada kesempatan untuk mengkombinasikan faktofaktor produksi dengan banyak cara yang berbeda. Tanah, tenaga kerja dan kapital yang semuanya mempunyai banyak lagi subkategori di dalamnya, bisa di gabungkan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk menghasilkan barang-barang yang dapat di jual di pasar.

Apakah para penganut ekonomi neoklasik melihat kemungkinan terjadinya kegagalan pasar? Menurut caporaso dan levine (2008:203-227) terdapat tiga kegagalan pasar dalam pandangan para ekonomi neoklasik, yaitu kegagalan yang disebabkan karena adanya ekternalitas, kegagalan yang berkenaan dengan barang publik (public good), dan kegagalan yang dikarenakan terjadinya monopoli.

Untuk memahami kegagalan pasar yang dikarenakan oleh eksternalitas tentu terlebih dahulu perlu mengerti tenteng apa yang dimaksudkan dengan konsep eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu transaksi yang menimpa pihak yang bukan bagian dari transaksi tersebut. Ia merupakan dampak terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam teransaksi yang tidak melewati sistem harga dan hadir sebagai efek samping yang tidak di sengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Pada pasar yang berfungsi ideal, semua transaksi bersifat pribadi. Apabila suatu transaksi melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut biasanya di berikan imbalan atau di kenakan biaya. Dengan demikian, biaya yang di tanggung semua produsen adalah sama dengan biaya yang d pikul oleh masyarakat. Sedangkan keuntungan yang di raih oleh masyarakat akan sama dengan keuntungan yang di peroleh oleh produsen. Namun dalam kenyataan, perimbangan antara biaya dan keuntungan pribadi dengan biaya dan keuntungan sosial tidak selalu sama.

Oleh karena itu, munculah masalah eksternalitas, karena ada orang lain yang memperoleh keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan-urusanyang muncul bukan atas kemauan mereka sendiri. Dengan kata lain, terdapat pihak ketiga yang tidak terlibat transaksi memperoleh keuntungan atau mendapatkan kerugian karena alasan –alasan yang tidak ada kaitannya dengan pilihan yang mereka ciptakan. Untuk memahami konsep ini coba kita pahami pepatah berikut "orang yang makan nangka, kita kena getahnya". Pepatah ini sangat di kenal oleh masyarakat indonesia, yang bermakna suatu akibat yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita, misalnya polusi, banjir, atau asap yang di timbulkan oleh kegiatan berbagai perusahaan sehingga membuat masyarakat menderita karenanya. Ini merupakan bentuk eksternalitas negatif. Apapun bentuk eksternalitas, positif atau negatif, merupakan sesuatu yang memnggangu aspek keadilan dan efisiensi dari operasi dalam perekonomian.

Kegagalan pasar berikutnya adalah kegagalan yang berkenaan dengan barang publik (public good). Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita pahami dahulu konsep barang publik(puklic good). Konsep barang publik merujuk pada barang-barangyang tidak dapat di bagi-bagi atau harus tersebar secara luas sehingga sulit untuk dimiliki oleh satu orang atau satu pihak saja. Ketika barang-barang tersebut selesai di produksi,ia langsung masuk dalam wilayah publik. Oleh karena itu, barang publik mengandung sifat non eksklusif dan non rival. Sifat noneksklusif dari suatu barang menunjukan ketiadaan cara untuk menyalurkan keuntungan dari barang itu hanya kepada mereka yang sudah membayar saja, sehingga di mungkinkan terjadinya pembonceng (free rider) yang menikmati barang publik meskipun tidak menanggung biaya untuk itu (caporaso dan levine,2008:220).

Sedangkan sifat nonrival dari suatu barang memperlihatkan keaadaan di mana ketika seseorang mengomsumsi suatu barang publik,

orang lain tetap bisa sama-sama mengonsumsi barang publik yang sama.barang –barang publik seperti udara bersih, keamanan berlalu lintas, pertahanan negara,atau pengendalian wabah penyakit merupakan barang publik yang di butuhkan oleh individu. Bagi individu yang ingin memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pribadinya namun dia tidak bisa memperolehnya melalui pasar.jadi keberadaan barang-barang publik mencerminkan kegagalan pasar.

Terakhir, kegagalan pasar yang bersumber dari keberadaan monopoli dan oligopoli monopoli di pahami sebagai hanya ada satu perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk suatu sektor tertentu. Sedang oligopolidi tunjukan terdapat hanya tergelintir perusahaan yang mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk suatu sektor tertentu jika pasar mengalami monopolistik atau oligopolistik maka pasar dengan persaingan sempurna tidak terjadi. Dengan kata lain, twerdapat (beberapa) perusahaan yang mampu mengendalikan harga. Dengan demikian, pasar seperi itu tidak efisiensi dan adil sehingga tidak mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pribadi. Keadaan seperti ini menunjukkan kegagalan pasar.

Kritik dari penganut Keynesian, menurut Caporaso dan levine (2008:237), mengatakan bahwa kegagalan menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistemis yang ada kaitannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata kata lain,pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan,

sehingga tidak berhasil memanfaatkan keseluruhan kapasitas produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kegagalan pada permintaan

Agregat ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan permintaan individu. Jika pasar secara sistematis gagal untuk menemukan permintaan agregat, maka akan berdampak pada kemampun pasar sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan.

Kritik lain tentang terjadinya kegagalan pasar yang sering dikemukakan adalah asumi yang dimiliki dari pasar itu sendiri yang dibangun oleh penganut ekonomi klasik dan ekonomi neoklasik. Zusmelia (2007:17) merangkum beberapa kritik tersebut dengan baik. Kegagalan pasar menurut Zusmelia sebenarnya terjadinya karena asumi untuk terjadinya pasar persaingan sempurna, tidak dapat terpenuhi, yakni diantaranya masing-masing pihak (Aktor yang melakukan pertukaran harus mempunyai informasi yang sama (sym metric information)terhadap kualitas dan harga barang dan jasa yang akan ditransaksikan tersebut, sehingga dalam pertukaran secara adil dapat dilakukan. Dengan kata lain,para aktor ekonomi akan menentukan harga yang wajar (just price), yaiyu harga pasar mencerminkan tingkat kelangkaan sumber daya yang dipertukarkan, demikian sebaliknya.

Jika negara mengalami kegagalan negara dan pasar menghadapi kegagalan pasar, apa kekuatan lain yang bisa menggerakan kehidupan manusia? Jawabannya adalah *civil society*.

2. Kekuasan Negara

a. Pengertian Negara

Pengertian tentang negara tidak dapat dipisahkan dari perspektif yang dimiliki oleh para ahli. Karena keragaman perspektif maka definisi tentang negara juga beragam. Untuk itu mari kita pahami berbagai keragaman definisi berikut:

1. Perspektif State Centered

Salah seorang ahli yang menganut perspektif *State centered* adalah Stephen Krasner. Menurut Krasner (1978:10) merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Krasner tidak sependapat dengan ahli yang menyebut tujuan dari negara sebagai kumpulan dari keinginan-keinginan individu-individu atau kelompok-kelompok, sebab tujuan negara sebenarnya adalah merujuk pada kegunaan (utility) dari masyarakat dan dapat disebut sebagai kepentingan umum masyarakat atau kepentingan nasional.

Dalam perspektif *State centered* juga tumbuh rumusan yang berbeda dari pendapat Stephen Krasner, yaitu Theda Skocpol. Adapun batasan tentang negara menurut Skocpol (1995:28):

Disatu sisi, negara dapat dilihat sebagai organisasi melalui mana aparat kolektif mengejar tujuan tertentu dan secara epektif merealisasikannya dengan sedikit banyak menggunakan sumber negara yang tersedia dalam hubungannya dengan setting sosial (kapasitas negara). Disisi lain, negara dapat dilihat secara lebih makroskopis sebagai konfigurasi dari organisasi dan tindakan yang memengaruhi arti dan metode politik dari semua kelompok dan kelas dalam masyarakat (otonomi Negara).

Meskipun definisi antara krasner dan skocpol berbeda secara formulatif, namun secara esensial mereaka berdua memiliki pandangan yang sama tentang otonomi negara. Dalam pandangan mereka, otonomi

negara dilihat dari agenda kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan –kepentingan pribadi dari individu dalam masyarakat. Dengan demikian, negaralah yang menjadi Aktor tunggal dalam kehidupan politik, karena negaralah yang memounyai dan membuat tujuan serta mencapai tujuan itu sendiri.

2. Perspektif Society centered

Berbeda dengan perspektif *state centered*, perspektif *society centerred* melihat bahwa negara merupakan agenda kepentingan pribadi, baik sebagai kepentingan individu maupun kepentingan kelas. Perspektif *society centered* mempunyai pemikiran yang berbeda, yaitu:

1. Pendekatan utilitarian melihat negara sebagai refleksi dari kepentingan pribadi-pribadi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang eksponen pendekatan ini, yaitu Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11) melihat negara sebagai semau individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa negara terdiri dari beberapa individu yang memegang jabatan,yang memililki konstituen untuk dipertimbangkannya pilihan-pilihan mereka dalam bentuk imflementasi kebijakan publik. Otonomi negara, dalam pendekatan ini, merupakan kemampuan dari pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka ke dalam kebijakan publik, yang dimungkinkan sejalan atau berlainan arah dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Dari versi pluralis, negara dipandang sebagai arena pertarungan sekaligus sebagai wasit.

2. Pendekatan Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai intrumen untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.

b. Asal Usul Negara

Asal usul negara ditelusuri oleh para ahli, seperti Mumford (1973), melalui negara kota (*city state*) Namun penelusuran tersebut berujung pada misteri yang tidak terpecahkan: "Asal mula kota tidak jelas, sebagian besar masa lalunya terkubur atau terhapus sehingga sulit dilihat lagi, dan proyek selanjutnya sulit untuk diukur" Meskipun demikian, paling tidak ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan asal usul negara melalui telusuran negara kota, yaitu antara lain: James M. Henslin, Ahmad Suhelmi (2007), dan lainnya.

Dalam bukunya sosiologi dengan pendekatan membumi, Henslin (2008:87) menguraikan bahwa masyarakat pada mulanya berukuran kecil dan tidak membutuhkan sistem politik besar. Masyarakat seperti itu beroperasi bagaikan suatau keluarga besar. Berkembanglah kota, diperkiraan sekitar 3500 tahun SM.Negara kota kemudian muncul, seperti negara-negara kota di zaman Yunani kuno, dengan kekuasaan yang berkembang keluar laksana sebuah sarang laba-laba Meskipun tiap-tiap kota mengendalikan wilayah disekitarnya, wilayah-wilayah di antara kota-kota tersebut tetap menjadi masalah. Setiap negara kota memiliki kerajaan (monarchy) sendiri, seorang raja atau ratu yang memiliki hak memerintah yang diturunkan dari keluarga.

Negara kota sering bertikai, dan perang merupakan hal yang lazim. Para pemenang memperluas pemerintahannya, dan akhirnya sebuah negara kota tunggal berhasil memegang kekuasaan atas suatu wilayah secara menyeluruh. Pada saat wilayah-wilayah ini berkembang, orang-orang secara bertahap mengidentifikasikan diri mereka dengan wilayah yang lebih luas. Dengan kata lain, mereka melihat penghuni yang tinggalnya jauh sebagai "kita", bukan "mereka". Yang kita kenal sebagai negara (state) yakni kesatuan politik yang memonopoli penggunaan kekerasan dalam suatu wilayah, kini muncul.

Berbeda dengan henslin dan suhelmi, Morton Fried (1967) dalam *The Evolution of political Society,* menentukan perbedaan asal usul negara berdasarkan tipe dari suatu negara. Menurut Fried terdapat dua tipe asal usul negara, yaitu negara pristin (*pristine state*) dan negara sekunder(*secondary state*).Negara pristin merupakan suatu negara yang muncul ketika belum pernah ada negara sebelumnya. Sebaliknya negara sekunder adalah negara yang lahir sebagai akibat adanya satu atau lebih negara lain yang sudah ada sebelumnya.

Negara pristin sepanjang sejarah umat manusia tidak dapat di temukan.Menurut Sanderson,negara pristin hanya muncul di empat daerah di Dunia Lama, yaitu Mesotamia dan mesir sekitar 6000-3750 SM.serta Dinasti shang di Cina dan India pada 4500-3750 SM. Sedangkan di Dunia Barudinyatakan hanya terdapat di dua daerah yang muncul negara pristin, yaitu di daerah Mesoamerika, di mana sebagian besar daerahnya sekarang terletak di Guatemala dan Mesiko serta diperu. Pada daerah Mesoamerika dan peru telah muncul beberapa negara pristin seperti negara Olmec, Maya,Aztec, dengan Ibu kota Tenochtitlan dan Inca.

Stratifikasi sosial, dipahami oleh sanderson, merupakan dasar bagi munculnya negara pristin. Perkembangan masyarakat melalui stratifikasi sosial telah menciptakan perbedaan dan sekaligus penjenjangan anggota masyarakat dalam berbagai kelompok yang berbeda seperti keluarga, bangsawan, prajurit, pedagang, dan budak. Pada puncak piramid stratifikasi sosial bertenger kelompok bangsawan yang menguasai tanah beserta surplus yang menyertainya. Negara,lanjut sarderson (2003:308-3090),pada awalnya dibangun atas landasan agama (teokratis) selanjutnya berevolusi menjadi negara militer dan akhirnya menjadi negara penakluk. Penaklukan yang semakin meningkat atas tanah-tanah dan masyarakat-masyarakat tetangganya telah menimbulkan permintaan akan upeti yang lebih besar, meningkatnya stratifikasi, dan intensifikasi ciri-ciri negara otokratis.

Tidak sama dengan negara pristin, negara sekunder muncul karena adanya kontak dari masyarakat yang bukan negara dengan satu atau beberapa masyarakat yang berbentuk negara.Kontak memunculkan kondisi di mana masyarakat yang bukan negara berubah menjadi masyarakat yang berbentuk negara. Pendirian negara sekunder ditunjukan untuk beberapa hal seperti mempertahankan diri terhadap masyarakat yang telah terorganisasi dalam bentuk negara, mengamankan rute-rute perdagangan yang strategis, dan untuk mempertahankan kekayaan sumber daya alam didaerah perbatasan. Sanderson melihat bahwa negara primitif dipolinesia dan afrika terbentuk karena proses seperti ini. Disamping itu, negara sekunder bisa juga terbentuk bila mana negara lama digantikan oleh negara baru, namun sistem sosiolo kulturalnya masih sama dengan yang lama.

Barusan kita menelusuri beberapa pandangan asal-usul dari suatu negara. Apakah ada teori yang menjelaskan asal-usul negara? Ternyata Sanderson menemukan ada tiga teori dunia lama dan dunia baru, yaitu

teori fungsionalis, teori Marxian, dan teori ekologis. Berikut kita mencoba memahami apa yang dikatakan oleh teori tersebut.

1. Teori Fungsionalis

Evolusi politik jangka panjang, menurut Sanderson (2003:298-315), menciptakan struktur politik yang beradaptasi semakin baik. Bermula dari kumpulan (*band*)yaitu suatu tingkat politik yang paling sederhana, di mana kepemimpinan berada pada pundak kepala dan didasarkan atas pengaruh yang dimiliki secara informal. Kepala tidak memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Kumpulan merupakan ciri pada masyarakat pemburu-pramu.

Evolusi politik selanjutnya adalah suku (*tribes*) yaitu masyarakat di mana satu-satuan yang lebih besar, yang diidentifikasi dalam istilah kebudayaan dan linguistik, terbagi kedalam sejumlah desa kecil yang relatif tidak terintegrasi. Pemimpin, dikenal sebagai kepala suku, memperoleh kepemimpinan melalui perannya sebagai distributor ekonomi dan kekayaan, orang yang terampil berbicara, memiliki kekuatan magis, dan boleh jadi perkasa dalam peperangan. Meskipun pemimpin memiliki prestise yang tinggi, namun ia memiliki kekuasaan sama sekali untuk memerintah orang lain. Suku diasosiasikan pada masyarakat hortikultura sederhana dan sebagian masyarakat pertenak. Baik kumpulan dan suku belum memiliki stratifikasi sosial.

Tahap evolusi politik selanjutnya adalah *chiefdom*, yaitu suatu masyarakat yang di mulai munculnya kekuasaan dan kewenangan. Pada tahapan ini, desa-desa yang sebelumnya terpisah pada masyarakat suku, sekarang satu sama lain terintegrasi dan terkoordinasi secara sentral dan membentuk suatu keseluruhan yang di perintah dari atas kebawah. Para kepala mempunyai kekuasaan mengawasi yang besar atas para

pengikutnya, termasuk kemampuan untuk menggunakan kekerasan. *Chiefdom* di temukan dalam masyarakat hortikultura intensif dan peternakan.

Chiefdom, di pandang memiliki kemampuan memaksa yang terbatas, tidak cukup di dukung oleh mesi administrasi dan birokrasi untuk mengatasi bentuk perlawanan yang paling keras. Ketika stratifikasi sosial semakin mengeras, mesin administrasi dan birokrasi terbentuk,dan arti pentingnya ikatan kekerabatan semakin berkurang maka negara nuncul mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Negara muncul dalam masyarakat agraris. Negara –negara masa dini, kata Sanderson (2003), berfungsi sebagai redistributorekonomi yang penting, sebagai mesin perang yang superior, dan sebagai satuan administrasi yang di abdikan untuk membangun monumen-monumen puplik yang penting.

2. Teori Marxian

Karl Marx memandang negara sebagai "komite eksekutif kelas penguasa". Oleh karena itu, menurut Marx, melalui pandangan lenin seperti di kutip oleh Caporaso dan Levine (2008:173), negara adalah sarana (organ) untuk menjalankan dominasi kelas, yaitu suatu sarana untuk melakukan penindasan terhadap kelas yang satu oleh kelas yang lain. Tujuan negara dalam menciptakan "ketertiban"adalah untuk mengesahkan dan mempertambahkan penindasan ini dengan cara mengurangi bentrokan antarkelas.

Salah seorang eksponen Marxian adalah Morton Fried (1967) yang merupakan pembelaan komtemporer Asal usul negara dari sudut pandang Marx, mengayakan bahwa negara membentuk embrio dalam masyarakat yang berstratifikasi yang alasan ini, harusalah merupakan model organisasi yang sekurang-kurangnya stabil yang kurang ada.

Masyarakat yang berstratifikasi ini terbagi di antara dua kemungkinan: masyarakat berstratifikasi itu membangun di dalam dirinya tekanan-tekanan bagi pembubarannya sendiri dan untuk kembali ke suatu jonis organisasi yang lebih sederhana. Biasanya penopangan itu, meliputi munculnya agen- agen yang fungsinya adalah untuk mempertahankan sistem ekonomi dan politik dan yang posisinya dalam sistem itu tidak mempunyai sangkut paut dengan kekerabatan. Dengan demikian, masyarakat yang mempunyai sistem stratikasi yang intens dan cukup sempurna memang memilki negara, dan dalam masyarakat itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat di antara kelas ekonomi yang berkuasa dan negara.

Untuk memahami pandangan Marxian tentang teori asal usul negara dan baiknya kita coba telusuri kesimpulan sanderson (2003:173-174) tentang hal ini:

- ♦ Terdapat konflik yang terdamaikan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. Konflik ini muncul dalam masyarakat dan terjadi karena posisi-posisi sosial yang sudah ada sebelumnya.
- ♦ Konfik yang tidak dapat di damaikan ini mengamcam tatanan sosial.
- ♦ Tatanan sosial merupakan organisasi sosial yang di rancang untuk memenuhi kepentingan dari kelas yang satu tetapi tidak untuk memenuhi kepentingan darri kelas yang lain
- ♦ Karena terdapat konflik yang tidak terdamaikan dan karena tatanan sosial ini menindas kelas tertentu dalam masyarakat, maka tatanan sosial han ya bisa di pertahankan dengan membela kepentingan kelas tertentu saja.

♦ Maka, negara sebagai sarana untuk mempertahankan tatanan itu adalah sarana penindasan kelas.

3. Teori Ekologis

Evolusi politik yang bermula dari kumpulan (band), kemudian suku (tribes), selanjutnya chiefdom, dan sampai terbentuknya negara merupakan proses yang muncul karena persoalan keterbatasan lingkungan (environmental circum-sciption). Keadaan alam yang berlimpah pada suatu daerah yang ditandai dengan kesuburan kelimpahan produksi pertanian apabila dikelilingi oleh daerah yang gersang atau keadaan alam yang sukar ditaklukan, karena penuh dengan perbukitan atau pegunungan besar terjal maka keadaan lingkungan ini berpotensi terbentuknya negara pristin. Ketika tekanan penduduk terhadap sumber daya alam terjadi karena pertumbuhan penduduk maka stratifikasi sosial berkembang pesat serta perang dan penaklukan politik merupakan suatu mekanisme untuk bertahan hidup masyarakat yang ditaklukan menjadi subordinat dan taat dan patuh terhadap penakluk. Situasi seperti inilah yang memungkinkan lahirnya negara pristin seperti munculnya negara pristin seperti munculnya negara pristin di daerah Timur Tengah atau daerah Amazon.

c. Kegagalan Negara

Negara, seperti telah disebut di atas,memiliki otonomi. Dengan demikian, negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan individu atau kelompok masyarakat serta memiliki caranya sendiri untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, negara di pandang mampu untuk menciptakan regulasi dan kebijakan, termasuk hal yang berhubungan dengan ekonomi, serta merealisasikannya untuk kesejahtraan, keamanan dan kebaikan masyarakat.

Negara dapat melakukan intervensi terhadap kehidupan umat manusia, termasuk intervensi terhadap ekonomi khususnya pasar, bilamana negara memandang perlu hal negara. Ada beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan intervensi seperti pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, di kenal dengan kebijakan fiskal. Pada tataran ini, pemerintah menjadi pelaksana dari intervensi negara sebagai pejabat negara sebagai pejabat negara atau birokrat, pada hakikatnya, adalah aktor individual atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Aktor individual atau kelompok bukanlah malaikat yang sterildari keinginan, kemauan, kehendak dan kepentingan pribadi atau kelompok. persoalan muncul dari ketidaksterilan aktor individual atau kelompok yang mengatas namakan pemerintah. Aktor individual atau kelompok, oleh karena itu, dapat saja berlaku tidak adil, curang, menipu, koruptif, dan sifat negara lainnya dari sisi kemanusiaan atau kebijakan atau kebijakan yang di konstruksikan dengan menyisipkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam regulasi dan kebijakan. Intervensi yang dilakukan atas nama negara, oleh sebab itu, sebenarnya bukan untuk kesejahtraan, keamanan dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan, paling tidak rakyat yang berada di bawah naungan kedaulatan suatu negara. Kalau benar bahwa negara merupakan perilaku yang bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, jelas bawa akan sukar bagi kita untuk mengharapkan bahwa negara bisa di beri tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya tetentang tujuan-tujuan yang lebih luhur dari pada sekadar mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi seperti memunculkan pemikiran tentang kegagalan negara (state failure), yaitu ketidak mampuan negara dalam menggunakan otonomi negara melalui instrumen regulasi dengan kebijakan dan menciptakan kesejahteraan keamanan dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan.

Apabila negara tidak bisa mengatur kehidupan, khususnya aspek ekonomi dari kehidupa, maka tentu perlu di cari pilar lain yang mampu mengaturnya dengan baik, mungkin pasar atau *civil society*.

1) Pengertian Civil Society

Civil society di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia dalam tiga cara, yaitu masyarakat sipil, masyarakat warga / kewargaan dan masyarakat madani. Terjemahjan civil society sebagai masyarakat sipil di rasakan oleh berbagai kalan kurang pas. Karena dalam dunia keseharian dalam akademik indonesia, konsep sipil sering di kaitkan dengan konsep militer. Dengan kata lain, jika ada masyarakat sipil berarti juga ada masyarakat militer. Kandungan pemahaman konsep seperti ini akan merdistosikan inti dan makna hakiki dari konsep civil society

Masyarakat warga / kewargaan merupaka terjemah yang merujuk pada kata *civic*. Terjemahan seperti ini mengingaat dengan pendidikan kewarganegaraan yang pernah di ajarkan pada sebelum tahun 1970-an. Akibatnya terkesan masyarakat warga adalah masyarakat yang menjadi warga negara baik.

Masyarakat madani merupakan suatu terjemahan dari *civil society* yang di usulkan dari Dato Anwar Ibrohim. Pertama kali di perkenalkan oleh beliau pada saat bersangkutan menyampaikan ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah Festifal Istiqlal, 26 Desember 1995(Aswab Mahasim,1995). Kalangan akademisi indonesia juga tidak bersepakat untuk menggunakan konsep masyarakat madani sebagai terjemahan dari konsep *civil society*. Karena masyarakat madani kalau dipahami secara kasar adalah masyarakat kota. Sedangkan

rujukannya adalah Madinah ketika Rosulullah dan khilafah Rasyidin meminpin umat islam dan tundukannya. Persoalan muncul karena konsep *civil society* muncul dari masyarakat barat maka rujukannya juga adalah Barat.Untuk menghindari perdebatan seperti ini maka konsep *civil society* digunakan sebagaimana adanya.

Civil society merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir berkembang pemikiran bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia yaitu state (negara), market (pasar), dan civil society.

Civil society, dikonsepsikan secara teoretis dalam tulisan ini, merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, self-relience (percayadiri), self-supporting (swasembada), voluntary (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar atau undang-undang tidak tegak.

Dalam *civil society*, individu dan /atau kelompok individu memiliki *self-relience* (percaya diri). Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sedangkan *self-supporting* (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan

oleh *civil society* dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya secara *voluntary* (sukarela). Terakhir, ketaatan terhadap nilai dan norma yang berlaku merupakan ciri dari suatu komunitas yang telah menerapkan prinsip *civil society*.

2) Asal Usul Civil society

Adam feruguson, seperti yang dijelaskan oleh Ernest Gellner (1994:68-90), merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan konsep civil society ketika ia menulis An Essay on the History of Civil Society. Revolusi industri dan perkembangan kapitalisme telah menyebabkan terjadinya perbedaan mencolok antara yang publik dan privat. Munculnya ekonomi pasar melunturkan tanggung jawab publik dari warga karena dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai pemuasan kepentingan pribadi. Adanya Civil Society diharapkan akan menghambat negara yang tiran.

Asal usul Civil Society yang dipahami oleh Adam Ferguson tersebut diperkuat oleh para penganut ekonomi klasik. Mereka melihat bahwa Civil Society sebagai suatu bentuk perkembangan dari sistem pemenuhan kebutuhan pribadi. Asal usul Civil Society dari perspektif ekonomi klasik, sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang pertama dimiliki oleh umat manusia adalah sistem subsistensi, yaitu pemenuhan kebutuhan diproduksi,dalam,dari,oleh,dan untuk keluarga atau dalam,dari,oleh, dan untuk sebuah kelompok kerabat (kinship) produksi tersebut di dasarkan pada pola pembagian kerja dalam keluarga. Oleh sebab itu, kegiatan produksi tunduk pada tujuan-tujuan dan hubunganhubungan yang ada dalam keluarga itu, seperti fungsi reproduksi, pendidikan, kewenangan paternal, kebutuhan psikologis,dan sebagainya. Kegiatan ekonomi melekat (embedded) dalam institusi-institusi nonekonomi seperti kegiatan kerajaan, aktivitas keagamaan, ritual adat, dan

sebagainya. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan non-ekonomi. Oleh karena itu, anggota keluarga melakukan kegiatan produksi dikarenakan untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga untuk upacara ritual keagamaan, misalnya, bukan didorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan atau akumulasi kapital.

Ketika bidang ekonomi terlepas dari bidang non-ekonomi dan mulai berdiri sendiri, maka kegiatan individu dalam bidang ekonomi juga terlepas dari ikatannya dengan bidang non-ekonomi. Individu melakukan kegiatan produksi bukan lagi didorong oleh alasan non-ekonomi, melainkan oleh motif meraih keuntungan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, ikatan individu dalam aktivitas ekonomi bersifat kontraktual dan melihat kepentingan dirinya sendiri sebagai fokus. Mereka melihat dirinya sendiri terpisah dari individu lainnya, independen, dan otonom. Pada kondisi inilah dipandang sebagai kemunculan masyarakat baru yang bernama *Civil Society*, yaitu masyarakat di mana sistem kebutuhan pribadi tidak lagi diatur oleh institusi keluarga atau negara, namun diatur dan dipacu oleh kepentingan pribadi, yaitu memperoleh keuntungan pribadi (*profit seeking*), maksimalisasi kegunaan (*utility maximization*), atau istilah lain yang artinya serupa.

3) Bagaimana Fenomena Civil Society di Indonesia

Tidak mudah untuk mendeskripsikan fenomena *civil society* di Indonesia secara komprehensif karena, seperti dikemukakan tersebut, konsep ini mencakup berbagai kegiatan yang luas sifatnya. Namun untuk memahami secara sederhana fenomena ini dapat kita telusuri melalui lembaga swadaya masyarakat. Pada awal era reformasi ranah *civil society* ditandai dengan menjamurnya lembaga swadaya masyarakat (LSM),

bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid terlihat beberapa departemen memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan LSM dalam proses pembangunan, misalnya departemen pemukiman dan prasarana wilayah, yang dipimpin oleh seorang penggiat LSM. Kebijakan tersebut memotivasi banyak orang untuk mendirikan dan menjadi penggiat LSM, mulai dari pusat sampai daerah. Sehingga berdirilah berbagai macam jenis LSM:plat merah, plat kuning, dan plat hitam. LSM plat merah ditujukan pada LSM yang dilahirkan oleh aparat birokrasi pemerintah sebagai salah satu cara untuk berbagai fasilitas dan dukungan keabsahan suatu program atau kegiatan pembangunan. LSM plat kuning merupakan LSM yang didirikan oleh para pembisnis untuk memperoleh proyek atau pekerjaan dari pemerintah yang mengharuskan keikutsertaan LSM. Sedangkan LSM plat hitam dipandang sebagai LSM yang didirikan oleh penggiat LSM karena idealisme yang dimiliki

Setelah presiden abdurrahman Wahid lengser dari kursi kepresidenan, perlahan tetapi pasti kebijakan keikutsertaan LSM dalam proses pembangunan pudar dan pada beberapa bagian hilang. Seiring dengan itu, kuantitas LSM juga mengalami pertumbuhan negatif. Pada saat sekarang, LSM masih terdapat di beberapa kota dan kabupaten, namun dengan kuantitas yang jauh berkurang. Pada umumnya LSM yang bertahan adalah LSM yang memiliki jaringan nasianal dan internasional. Sangat sedikit sekali LSM yang bertahan sampai sekarang memiliki kemampuan untuk mencari sumber pendanaan yang berasal dari sumbersumber lokal. Jika dipandang dari sisi ini maka kemandirian dari LSM memang patut dipertanyakan.

4) Gerakan Sosial: Kekuatan Civil Society

Apa yang dimiliki oleh tiga pilar kekuasaan sehingga mereka bisa menggerakan atau memengaruhi kehidupan kita? Neagara memiliki political power (kekuatan politik) memalui interventasi, pasar memiliki economic power (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyi, sedangkan civil society mempunyai sosial power (kekuatan sosial) melalui sosialmovement (gerakan sosial)

a. Pengertian gerakan sosial

Apa itu gerakan sosial (sosialmovement)? Untuk memahami konsep ini mari kita tintjau teks beberapa sosiologi yang mendiskusikannya:

1. James M. Henselin

Dalam bukunya sosiologi dengan mendekatkan membumi, Henselin (2008) merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang berorganisasi untuk mempromosikan atau menentang perubahan.

2. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Horton dan Hunt (1989) dalam bukunya *sosiologi* memberikan batasan gerakan sosial sebagai suatu usaha kolektif yang ertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan.

3. Kamanto Sumanto

Kamanto Sumanto (2004) dalam bukunya *sosiologi* menjelaskan pengertian gerakan sosial sebagai perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang hanya untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya

Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial merupaka suatu usaha bersama (kolektif) untuk melakukan atau menentang suatu perubahan dalam masyarakat. Dari definisi ini maka gerakan sosial mencakup spektrum yang sangat luas dan melebar seperti

berbagai gerakan/trek aksi anti (roko,narkoba,dan nepotisme (KKN) pornograpi,dan sebagainya), terus bermacam gerakan/aksi pro (hidup sehat,lingkungan bersih,demokrasi,kemerdekaan,penegakan HAM, dan seterusnya), atau beragam gerakan pemberdayaan dan advokasi (petani, buruh, nelayan, pengamen, gender, anak,penyandang cacat/dispabel, masyarakat miskin pedesaan atau perkotaan, dan lainnya).

b. Tipologi Gerakan Sosial

Terdapat banyak ahli yang membahas tentang tipologi gerakan sosial. Berikut didiskusikan beberapa pandangan sosiolog tentang hal ini:

1- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt

Horton dan Hunt (1989: 198-201) menemukan ada enam bentuk dari gerakan sosial, yaitu:

- ❖ Gerakan perpindahan (migratory movement), yaitu arus perpindahan penduduk ke suatu tempat baru. Ketika penganut islam tidak disukai dan dimusuhi oleh penduduk mekkah pada perkembangan awalnya, Rasulullah menganjurkan agar penganut orang muslim yang ada di mekkah hijrah (pindah) ke kota madinah untuk menghindari penganiayaan, diskriminasi dan penekanan yang lebih besar. Hijrah tersebut dapat dipahami sebagai gerakan perpindahan. Atau arus pengungsian besar-besar orang Vietnam Selatan ke Pulau Galang pada masa perang Vietnam juga merupakan bentuk dari gerakan perpindahan.
- Gerakan ekspresif (expressive movement), merupakan gerakan yang mengubah ekspresi, sikap atau reaksi terhadap kenyataan, dan bukannya mengubah kenyataan (masyarakat) itu sendiri. Terdapat berbagai macam gerakan ekspresif seperti musik, puisi, drama, lawakan, lelucon, aliran kepercayaan, keagamaan dan lain sebagainya.

- Misalnya berbagai lelucon tentang politik muncul dalam masyarakat Rusia ketika masa Uni Soviet.
- Gerakan utopia (utopian movement) adalah gerakan untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala terbatas. Model tersebut dapat dicontoh dan dimungkinkan untuk dikonstruksi dalam skala yang lebih besar. Misalnya gerakan Kibut Israel, gerakan Darul Arqam Malaysia, dan lainnya.
- ❖ Gerakan reformasi (reform movement), yaitu gerakan yang berusaha untuk memperbaiki beberapa kepincangan dalam masyarakat. Gerakan ini biasanya muncul dinegara demokratis. Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 merupakan contoh bagaimana gerakan itu terjadi untuk memperbaiki kepincangan yang terjadi dalam kehidupan berekonomi, politik dan sosial budaya. Namun sayangnya, gerakan reformasi tersebut menemukan kegagalan sebelum mengkristal menjadi suatu gerakan yang kuat dan kukuh, meskipun demikian melalui gerakan ini telah terjadi banyak perubahan seperti pemilihan presiden dan kepala daerah langsung.
- ❖ Gerakan revolusioner (revolutioner movement), yaitu gerakan yang dibangun untuk menggantikan sistem yang ada dengan sistem yang baru. Para penganut gerakan ini, menurut Horton dan Hunt, cenderung berseberangan dengan penganut gerakan reformasi, karena mereka berkeyakinan bahwa reformasi yang berarti tidak mungkin terjadi bilamana sistem yang ada tetap bertahan. Mereka berpendapat bahwa perubahan radikal dan mendasar hanya dapat terlaksana apabila sistem sosial yang ada sekarang diganti yang baru serta kelompok elite yang ada disingkirkan dan diputus mata rantai

- sirkulasinya. Selanjutnya, persaingan antarkelompok dalam perebutan kekuasaan terjadi.
- ❖ Gerakan perlawanan (resistence movement), yaitu gerakan yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi suatu perubahan sosial tertentu. Perubahan sosial yang terjadi selama ini tidak saja membahagiakan, tetapi juga membahayakan banyak orang. Perubahan pandangan tentang nilai, norma dan sikap sekelompok orang dalam masyarakat seperti seks bebas, pornografi, feminisme, sekulerisme dan lainnya telah menimbulkan ketidak nyamanan bahkan ketakutan yang dialami oleh kelompok lainnya. Kelompok orang yang disebut terakhir ini melakukan suatu gerakan perlawanan dengan mengatas namakan agama, tradisi, sejarah, moralitas, adat, dan sebagainya sehingga lahirlah misalnya berbagai gerakan anti (pornografi, narkoba dan seks bebas) atau gerakan pemurnian (kembali kepada ajaran agama, tradisi dan moralitas).

2- David F. Aberle

Kebanyakan teks sosiologi cenderung membahas pandangan Aberle bila mendiskusikan tipologi gerakan sosial. Berbeda dengan Horton dan Hunt, Aberle dalam bukunya *The Peyote Religion among the Nevaho* menemukan empat tipe dari gerakan sosial, yaitu:

- ❖ Gerakan sosial altenatif (altenative sosial movement), yaitu gerakan yang bertujuan mengubah perilaku tertentu dala diri individu. Dalam tipe ini mencakup berbagai kegiatan seperti kampanye antinarkoba, anti miras (minuman keras), anti seks bebas,dan sebagainya.
- Gerakan sosial redemotif (redemptive sosial movement), merupakan gerakan yang bertujuan mengubah keseluruhan perilaku individu. Jadi, gerakan ini memilki sasaran yang sama dengan gerakan sosial

altenatif (yaitu individu), namun berbeda dalam cakupan. Gerakan sosail redemptif mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru, yang berbeda sama sekali dengan yang lama. Contoh yang diajukan biasanya gerakan keagamaan seperti gerakan fundamentalis kristen, atau hindu.dalam islam misalnya islam. yahudi pertobatan,yaitu meninggalakan sama sekali suatu perilaku negatif menuju perilaku positif secara keseluruhan; dan konsep hijrah yaitu yaitu gerakan perpindahan (fisik atau rohani/mental) yang lebih baik lagi merupakan konsep yang menunjuk pada "suatu gerakan redemptif" ketika konsep tersebut diaktualisasikan dalam usaha bernama (kolektif) maka ia menjadi gerakan sosial redemptif.

- ❖ Gerakan sosial reformatif (reformative sosial movement), adalah gerakan perubahan atau reformasi pada segi atau bagian tertentu dari masyarakat. Gerakan ini jelas berbeda dengan dua gerakan yang disebut lebih awal yang menekan pada individu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pandangan Horton dan Hunt, terlihat ada persamaanya dengan konsep gerakan reformasi (reform movement).
- ❖ Gerakan sosial transformatif (transformative sosial movement), menunjuk pada gerakan untuk mentransformasikan tatanan sosial itu sendiri. Para anggotanya memilki keinginan hendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan yang lebih baik menurut versi mereka. Jika dibandingkan dengan tipologi Horton dan Hunt maka akan dampak persamaannya dengan konsep gerakan revolusioner.

Tipologi Aperle tersebut dipertajam oleh Henselin (2008) dengan menambah dua tipe lainnya, yaitu gerakan sosial transnasional (transnational sosial movement) dan gerakan sosial metaformatif

(metaformative sosial movement). Gerakan sosial transnasioanal merupakan gerakan yang ingin mengubah kondisi tertentu yang tidak hanya ada dalam lindungan mereka, tetapi juga diseluruh dunia. Gerakan sosial ini sering ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup tertentu misalnya kaum buruh sedunia, kualitas lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan sosial metaformatif menunjukan pada gerakan yang ingin mengubah tatanan sosial itu sendiri, yang tidak hanya pada skala lokal dan nasional, tetapi lebih luas lagi yaitu tatanan sosial global.

Tabel 11.1 Tipologi gerakan sosial Aberle dengan penajaman Henselin.

Sebagian	Menyeluruh
1 Alteratif	2 Redemtif
3 Reformatif	4 Transformatif
5 Transnasional	6 Metaformatif

Besarnya perubahan

Gerakan fundamentalisme keagamaan bisa menjadi suatu gerakan yang bersifat metaformatif bila cakupan telah global. Semua agama memiliki potensi untuk mengontruksi gerakan sosial metaformotif oleh para pemeluknya. Untuk memahami secara sederhana Tabel 11.1 dapat membantu.

c. Cara gerakan sosial

Berbagai gerakan sosial memiliki beragam cara untuk merealisasikan tujuan yang dimilikinya. Berikut kita diskusikan beberapa cara yang dapat digunakan oleh para aktivis pergerakan.

- ♦ Kekerasan meliputi demonstrasi anarkis, pembajakan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, teror fisik, psikis. Dan budaya serta perang.
- ♦ Non-kekerasan meliputi mogok, demonstrasi damai, pemberdayaan, advokasi dan sebagainya.

d. Tahapan gerakan sosial

Berdasarakan studi Henselin (2008: 231-232) dari berbagai literatur ditemukan bahwa terdapat beberapa tahapan dari gerakan sosial:

- 1. Tahap kerusuhan dan agitatif. Bermula dari sekelompok orang yang merasa terganggu oleh kondisi tertentu dan mengubahnya. Muncul pemimpin yang mampu menerjemahkan persaan orang-orang ke dalam bentuk wacana yang menyangkut sejumlah isu yang berhubungan dengan sebab ketergantungan tersebut. Kebanyakan gerakan gagal pada tahap ini, sebab gagal medapatkan cukup dukungan. Setelah gejolak kegiatan yang singkat, gerakan mati secara perlahan.
- 2. Tahap mobilisasi sumber daya. Tahapan pertama gerakan bisa dilalui jika mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian media massa. Dalam beberapa kasus, muncul kepemimpinan setenpat yang mampu memobilisasi sumber daya.
- 3. Tahap pengorganisasian. Tahapan ini ditandai adanya pembagian kerja. Pemimpin memutuskan suatu kebijakan, sedangkan perangkat struktur yang ada melaksanakan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan tetap berjalan. Dalam tahap ini masih banyak ditemui kegairahan kolektif terhadap isu yang menjadi pusat perhatian.
- 4. Tahap institusionalisasi. Pada tahap ini gerakan telah mengembangkan suatu birokrasi. Kontrol berada ditangan para pejabat karier, yang mungkin lebih mementingkan kepentingan atau posisi mereka sendiri

- ketimbang pencapaian tujuan pergerakan itu sendiri. Pada tahap ini kegairahan politik mulai berkurang.
- 5. Tahapan kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali. Manajemen kegiatan sehari- hari mendominasi kepemimpinan. Juga ditandai dengan perubahan sentimen politik, tidak ada lagi kelompok orang yang mempunyai komitmen kuat dan berbagi suatu tujuan bersama. Jika itu ditemukan maka gerakan sosial berpeluang redup dan terus menghilang. Pada saat redup dimungkinkan juga muncul pemimpin yang lebih idealis dan berkomitmen tinggi untuk menyegarkan gerakan.

C. Hubungan Tiga Pilar Kekuasaan

Ketiga komponen ini bisa saling berhubungan satu sama lain berkompetisi atau berkomplik, berkolusi, atau bersinergi dalam menggerakan kehidupan umat manusia.

1. Hubungan antara negara dan pasar

Bagi pendekatan ekonomi klasik, seperti telah dibahas diatas, pasar dibiarkan mengatur dirinya sendiri melalui hukum permintaan dan penawaran. Negara tidak dibenarkan ikut melakukan campur tangan terhadap jalannya suatu pasar. Kalaupun ada gejolak pasar, tidak perlu ada campur tangan negara sebab pasar memiliki mekanismenya sendiri menetralkan gejolak didalam dirinya sehingga mencapai titik keseimbangan (ekuilibrum) baru. Negara diharapkan hadir minimal sebagai wasit yang adil dalam menegakan kedaulatan pasar.

Belajar pada pengalaman negara-negara Eropa Barat,ekonomi pasar bebas (*the free market economy*), termasuk perdagangan bebas,dipandang oleh ekonomi klasik sebagai agen yang dapat melakukan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, membawa kearah demokrasi,

kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Namun beberapa klaim dari tesis populer tersebut tidak dapat diterapkan pada konteks sejarah budaya dan sosial yang lain, misalnya negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Evers (1994:238-239) mengingatkan:

Tesis populer ini, bagaimanapun,bertolak belakang dengan pandangan,yang menyatakan bahwa perdagangan secara potensial bebahaya dan merusak setiap masyarakat jika ia tidak diawasi oleh otoritas politik yang kuat. Banyak contoh yang mendukung hal ini. solidaritas dan jaminan sosial dari masyarakat suku dan petani sering dirusak oleh masuknya ekonomi perdagangan hasil bumi dan menciptakan kesengsaraan dan disintegrasi dalam masyarakat. Impor yang tidak terbatas terhadap barang mematikan industri skala menengah dan kerajinan lokal, dan industrialisasi yang berorientasi ekspor akan menciptakan polusi dan kerusakan terhadap lingkungan.

Dalam kenyataannya, kehidupan sosial,termasuk ekonomi seperti telah didiskusikan sebelumnya, tidak hanya diatur oleh mekanisme pasar tetapi juga oleh pengaturan negara. Pengaturan dapat bermakna intervensi, bila ia dipandang dari sudut pasar. Dari sudut pandang negara, intervensi dilakukan atas nama regulasi. Kadang-kadang "deregulasi" digunakan untuk menjelaskan perubahan atau penyesuaian dalam pengaturan negara terhadap pasar.

Telah terjadi diskusi mendalam dan panjang diantara para ekonom, apakah negara dalam hal ini pemerintah harus mengadakan intervensi dalam memfungsikan pasar atau tidak. Jika ia harus kemudian dibawah kondisi bagaimana, untuk tujuan apa, dan seberapa luas? Intervensi negara dapat menghasilkan suatu distorsi atau suatu koreksi dalam berfungsinya mekanisme pasar. Hasil tersebut tergantung pada sifat pasar,

jenis dan derajat dari intervensi yang dilakukan. Pemerintah tertentu suka melakukan intervensi pada pasar dengan berbagai cara dan dengan beragam alasan. Sementara yang lain, khususnya negara industri maju (kecuali jepang), menghindari intervensi seminimal mungkin.

Konsep intervensi minimal pun juga bersifat relatif. Interpretasi terhadap intervensi minimal negara terhadap pasar tergantung rezim yang berkuasa dalam pemerintahan dalam suatu negara. Amerika Serikat yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara kampiun demokrasi dan ekonomi pasar, ternyata juga menggunakan instrumen intervensi menggerakan ekonomi mereka, tidak membiarkan pasar menyembuhkan dirinya sendiri, seperti selama ini mereka perjuangkan dalam nerbagai kesempatan. Ketika krisis kredit perumahan pada masa akhir jabatan kedua Presiden George W. Bush dan masa awal jabatan Presiden Barack Obama, kedua presiden memiliki pola intervensi yang berbeda terhadap pasar. Presiden Barack Obama crnderung membuat rambu-rambu terhadap pasar, sehingga pasar terutama pasar uang tidak terbebas masa sebelumnya.

2. Hubungan Antara Negara dan Civil Society

Hubungan antara negara dan *civil society*, secara hipotesis teoretis, dikonstruksikan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap yang disebut pertama. Oleh sebab itu, *civil society* diharapkan mampu mengatasi negara sehingga ia tidak memiliki kekuasaan mutlak dengan memperjuangkan hak-hak asasi mereka yang meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan serta memiliki *self-reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), taat akan nilai dan norma yang berlaku,dan bebas dari ketergantungan terhadap negara. Karena itu Tocqueville (2005), berdasarkan pengalamannya di Amerika,

civil society memiliki kekuasaan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara.

Keberadaan *civil society* tidak bisa dilepaskan dari demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk merobohkan demokrasi hampir selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantakan ruang untuk masyarakat sipil. Selanjutnya, mustahil bila membicarakan demokrasi tanpa mengikut sertakan ruang publik. Pelarangan dalam partisipasi menimbulkan kepincangan bentuk demokrasi. Oleh karenanya, menurut Chandhoke (2007), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik, namun secara bersamaan tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Kejatuhan rezim Sukarno dan rezim Suharto menggambarkan bagaimana kekuatan gerakan sosial yang dimiliki oleh *civil society* mampu mengontrol bahkan menjatuhkan suatu rezim penguasa di Indonesia. Gerakan sosial yang dilakukan oleh *civil society* untuk menumbangkan rezim orde lama ternyata belum mampu meletakan pondasi demokrasi dalam negara. *Civil society* yang telah bersemi dalam masa awal, ternyata masa selanjutnya layu sebelum berkembang. Negara mampu mengooptasi dan menghegemonik eksponen dalam *civil society* kedalam rentang kendali kekuasaannya. Pada masa orde baru berkembang berbagai asosiasi profesi, seperti Ikatan Sosiologi Indonesia, dan organisasi yang dikenal dengan LSM plat merah seperti karang taruna. Asosiasi dan organisasi tersebut bergantung pada bantuan finansial dan akomodasi dari negara, sehingga mereka bisa disetir sesuai dengan keinginan penguasa.

Tidak berbeda gerakan sosial penumbangan rezim orde baru juga digerakan oleh *civil society* yang berasal dari berbagai asosiasi dan organisasi di mana eksponen mahasiswa adalah motornya. Namun hasilnya relatif berbeda di mana terjadinya amandemen terhadap konstitusi sehingga demokrasi dan partisipasi publik lebih terbuka dibandingkan dengan era sebelumnya. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung merupakan warna yang baru dalam sistem pemerintahan. Warna tersebut lebih demokratis dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dari fenomena hubungan antara negara dan *civil society* yang terjadi diindonesia tersebut diatas, ternyata hubungan tersebut juga dapat mengambil bentuk lain, yaitu hubungan yang kooperatif dan hegemonik. Negara melalui kekuatan intervensionisnya mempunyai hak semaunya distribusikan sumberdaya finasial dan akomodasi kepada asosiasi dan organisasi yang ada. Hak semaunya dipahami sebagai suatu kemampuan untuk membuat kebijakan tanpa ada pertanggung jawaban publik dan pengontrolan dari pihak lain. Hak semaunta perlahan dihapus melalui perubahan konstitusi dan aturan perundangan yang diciptakan kemudian yang berkait dengan penyelenggaraan yang bersih dan sehat.

3. Hubungan Antara Pasar dan civil society

Dalam pandangan Karl Marx, *civil society* merupakan produk dunia modern di mana kapitalisme telah menciptakan dunia yang subjek individualistis atau mistis terikat denfan yang lain dalam ketergantungan. Dalam sudut pandang ini, pasar dipandang sebagai sisipembangunan masyarakat sipil, sekaligus sebagai instrumen kekerasan dan pemaksaan.

Hubungan antar pasar dan *civil society* bisa bersifat saling memengaruhi. Pasar dan *civil society*, dalam perspektif liberal, memiliki

karakteristik yang sama, yaitu otonom bebas dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan antara *civil society* dan pasar saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain terhadap keberadaan mereka masing-masing. Namun ketika pasar dipandang terlalu serakah dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan umat manusia, *civil society* dapat bersifat oposisi terhadap pasar. Gerakan lingkungan hidup seperti *Green Peace* misalnya, selalu berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang dipandang sebagai perusak lingkungan hidup. Ketika perusahaan minyak Shell dipandang merusak lingkungan hidup dalam mengeksplorasi minyak, maka *Green Peace* melakukan aksi damai sampai kekerasan terhadap pengabaian lingkungan hidup oleh Shell.

Hubungan antara civil society dan pasar besar juga dilihat dalam perspektif sosiologi ekonomi. Menurut perspektif ini civil society memiliki apa yang dinamakan sebagai civil moral. Dalam mekanisme ini, peranan civil society. Mekanisme ini sering diabaikan oleh ekonom dan teoretisi tentang negara lainnya (Suparb, 1990). Struktur sosial budaya masyarakat memainkan peranan tidak kalah pentingnya dalam pembenyukan keberhasilan atau kegagalan suatu prmbangunan. Orang dalam bertindak selalu meorientasikan tindakannya terhadap tingkah laku orang lain, melalui makna yang dikonstuksi secara sosial. Orang menginterpretasikan (verstehen) adat, kebiasaan, norma, dan kepentingan yang mereka miliki dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung. Dalam The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism, Weber menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat,tindakan ekonomi adalah suatu produk personal,etika,dan pertimbangan sosial. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi melekat dalam banyak aspek kehidupan sosial: budaya, kepercayaan dan seterusnya. Dalam studi Scott tentang The Moral Economy of The Peasant menunjukan bahwa terdapat etika tertentu yang harus diperhatikan oleh penguasa dan pengusaha dalam menghadapi petani yang sedang mengalami krisis subsistensi, misalnya. Sedangkan Evers dan kawan -kawan dalam The Moral Economy of Trade menemukan bahwa kapital sosial (sosial capital), seperti menjadi orang soleh, akan menghindari seorang pedagang dari rumor sosialatau pengucilan sosial dari masyarakat.

4. Sinergisitas Tiga Pilar Kekuasaan

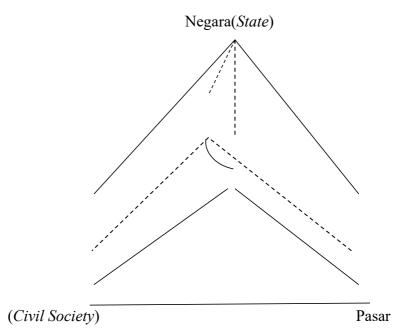
Bagaimanakah sinersigitas hubungan antara negara, pasar, dan civil society sehingga kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bisa dicapai secara optimal? Agar kesejahteraan,demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan bisa dicapai secara optimal, maka prinsip sinergisitas yang setiappilarmemberikan kontribusi optimal bagi dibangun adalah pencapaian semua tujuan kemanusiaan di atas, baik secara individual maupun sebagai kolektivitas. Konttibusi optimal suatu pilar kekuasaan tidak menghambat pilar lain untuk menyumbangkan secara optimal apa yang seharusnya ia bisa berikan. Olehkarena itu, setiap pilar kekuasaan tidak boleh memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas. Sebab bila ada suatu pilar kekuasaan yang memiliki kekuasaan mutlak dan kebebasan tanpa batas, maka ia akan menutup pilar yang lain untuk mencapai nilai optimum dari suatu pencapaian.

Selanjutnya, setiap pilar harus memiliki kesadaran bahwa aktor yang berada di dalamnya, di samping sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial (kolektivitas), memiliki kemampuan untuk merealisasikan pencapaian optimal, atau sebaliknya menemukan titik nadir dari

kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan. Kesadaran tersebut akan menemukan titik ekuilibrium antara kesadaran individual dan kesadaran kolektivitas dalam merai kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.

Apakah pencapaian kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal oleh sinergisitas negara, pasar dan *civil society* mengikuti jalan yang seragam atau berbeda-beda? Konteks ruang dan waktu dari sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* berbedabeda, oleh sebab itu jalan yang ditempuh juga berbeda. Namun dalam menempuh suatu perjalanan,sekali lagi, perlu ada kesadaran dari ketiga pilar, yaitu negara, pasar dan *civil society* untuk bersinergi dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal.

Perjalanan yang ditempuh oleh jerman, misalnya dalam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal dilandasi prinsip sinergisitas, seperti yang dikrmukakan di atas. Mekanisme pasar sangat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi, namun juga terdapat mekanisme sosial budaya (civil society) dan intervensi negara dalam kadar tertentu yang relatif rendah. Kembali pada ilustrasi masyarakat jerman, ekonomi secara



Gambar 11.2 Segitiga sinergi Peran Antara negara, Pasar dan *Civul Society* serta arah perubahan dalam kehidupan umat manusia.

Dominan dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Namun negara bertindak sebagai "wasit yang adil" ketika terjadi monopoli atau terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh pengusaha. Pemerintah jerman berperan aktif sebagai penengah antara serikat buruh yang menghendaki peningkatan kesejahteraan dan pengusaha yang ingin mempertahankan atau menaikkan keuntungan perusahaan. Jadi, melalui ekonomi pasar sosialnya (soziale marktwirstschaft), jerman mengombinasikan secara harmonis antara ekonomi pasar dan tugas negara sebagai wasit dalam persaingan dan sebagai penjaga kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Disamping itu, peran civil society juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di jerman.

Sinergisitas antara negara, pasar, dan *civil society* alam meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan

lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal melalui jalan ketiga (*the third way*) dengan karakteristik pilar kekuasaan sebagai berikut:

a. Negara

Negara memiliki ciri sebagai berikut: negara demokratis baru (negara tanpa musuh), devolusi, kemokratisasi berlapis (lokal, nasional, dan kosmopolitan), depolusi kekuasaan, pembaruan ruang publik yang transparan, administrasi yang efisien, mekanisme demokrasi langsung, dan pemerintah sebagai pengelola risiko.

b. Pasar

Pasar yang menempuh jalan ketiga memperlihatkan orientasi pada ekonomi campuran baru (*new mixed economy*), yaitu suatu sistem ekonomi yang berbasis kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan *civil society*. Semua institusi kesejahteraan harus di modernisasikan secara menyeluruh.

c. Civil Society

Pengembangan *civil society* yang aktif merupakan bagian yang mendasar dari politik jalan ketiga, yang memiliki ciri antara lain: kemitraan dengan pemerintah, pembaruan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal, keterlibatan sektor ketiga, perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan berbasis lokal, dan keluarga demokratis.

Nama perjalanan yang di tempuh dalam sinar gisitas antara negara, pasar, dan *civil society* tidak begitu penting. Apakah ia dinamakan jalan ketiga, ekonomi pasar sosial baru, (*new soziale marktwirtschaft*), ekonomi islam, atau ekonomi syariah tidaklah perlu diperdebatkan, yang terpenting adalah bagaimana adanya kesadaran negara, pasar dan *civil society* dalam

meraih kesejahteraan, demokrasi, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan secara optimal melalui sinargisitas atau kemitraan.

BAB 12. KETIMPANGAN SOSIAL DAN EKONOMI (SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITY)

A. Ketimpangan sosial

Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, yang memiliki status yang sama. Tak bisa dimungkiri, ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini mencakup kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha dan kerja, serta kebutuhan sekunder, seperti sarana untuk mengembangkan usaha dan karir. Perlu kita ketahui, ketimpangan sosial merupakan masalah sosial yang bersifat global (dapat terjadi di negara maju maupun berkembang). Ketimpangan sosial terjadi karena beberapa faktor dan mengakibatkan berbagai macam dampak, terutama di bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Terdapat lima macam bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya sebagai berikut :

1. Ketimpangan antara desa dan kota

Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif (pilihan) seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawah lah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual.

Sementara itu, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Para petani dan pedagang hanya memperoleh keuntungan yang kecil dari hasil panen/barang dagangannya. Keuntungan yang kecil ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibatnya, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota.

Selain itu, tidak adanya alternatif pekerjaan di desa juga menyebabkan banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di kota, agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia

Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesenjangan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing.

Karena tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok akan kalah saing dengan masyarakat yang tinggal di kota. Peluang mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka juga akan semakin kecil.

3. Ketimpangan ekonomi antargolongan di masyarakat

Masih ingat dengan gambar di bagian pembuka artikel ini? *Nah*, situasi yang ada di gambar tersebut merupakan contoh dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya

pendapatan perkapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. *Nah*, seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, pendidikan mempengaruhi kualitas diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya, mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak.

Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapat pekerjaan. Hal ini diperparah dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi mereka. Namun, banyaknya pesaing dari kota dan keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya, mereka tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran) dan bernasib lebih buruk dari sebelumnya.

4. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta

Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda (bangunan, alat/mesin produksi, uang tunai, dsb) atau hak kuasa (hak paten, merek dagang, goodwill, dsb). Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Padahal, sebagian

besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tentunya, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan, tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal.

5. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan

Pernahkah kita pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas. Misalnya, daerah yang sulit mendapat sinyal telepon/internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada. Sementara kita yang tinggal di daerah yang sudah mudah mendapatkan akses-akses tersebut, pasti akan merasa kesusahan karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa. Biasanya, daerah-daerah yang letaknya sangat terpelosok lah yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan.

Selain itu, pernahkah kita memperhatikan juga, umumnya di daerah perkotaan pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebaliknya, di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun masih sangat jarang ditemui. Perbedaan-perbedaan ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata.

Sebenarnya, pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan kondisi geografis serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi wilayahnya juga berbeda-beda.

B. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial

Ketimpangan sosial merupakan suatu ketidakseimbangan dari kondisi masyarakat yang terjadi karena perbedaan-perbedaan di dalam lingkungan masyarakat dari mulai budaya, status sosial, hingga kondisi ekonomi setiap masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, meliputi:

- a. Faktor struktural
- b. Faktor kultural
- c. Faktor pendidikan
- d. Faktor ekonomi
- e. Faktor kesehatan
- f. Faktor geografis

C. Bentuk dari ketimpangan sosial

- ♦Ketimpangan dari golongan sosial dan ekonomi.
- ♦Ketimpangan pembangunan daerah.
- ♦Ketimpangan ekonomi.
- ♦Ketimpangan perkotaan dan pedesaan.
- ♦Ketimpangan antar wilayah

D. Dampak dari adanya ketimpangan sosial

- **♦**Kriminalitas
- ♦Kemiskinan
- ♦ Penurunan kualitas moral

- ♦Adanya monopoli ekonomi
- ♦ Terjadinya pencemaran lingkungan

E. Langkah-langkah mengatasi ketimpangan sosial

- ♦ Meningkatkan kulitas masyarakat di bidang pendidikan.
- ♦ Mengendalikan jumlah pertumbuhan masyarakat.
- ♦ Menciptkan lapangan pekerjaan.
- ♦ Menurunkan ketimpanagn pada kekayaan seseorang.
- ♦ Melakukan program bantuan yang tepat sasaran dan merata.

F. Ketimpangan sosial dan Ekonomi

Di sisi lain ketimpangan sosial ekonomi merupakan kondisi adanya ketakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Walau manusia sering dianggap sebagai makhluk sosial, ada kecenderungan untuk saling mengalahkan.

Ketimpangan sosial dapat terjadi karena faktor ekonomi. Hal ini karena perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat akan berdampak pada kualitas kehidupan yang berbeda dan menciptakan golongan miskin serta kaya.

Ketimpangan sosial dan faktor ekonomi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena faktor ekonomi. Hal ini karena perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat akan berdampak pada kualitas kehidupan yang berbeda dan menciptakan golongan miskin serta kaya.

Faktor ekonomi dengan demikian dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik sosial. Jika ketimpangan sosial yang terjadi dibiarkan berlangsung lama, hal ini mampu memantik terjadinya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Hal ini pernah terjadi pada krisis moneter pada tahun 1998 ketika terjadi kerusuhan dan perusakan di berbagai tempat.

Secara umum, ketimpangan sosial tidak selalu menimbulkan dampak negatif, melainkan juga dampak positif. Ketimpangan sosial dapat mendorong pemerintah daerah untuk selalu melakukan perubahan yang dapat meningkatkan pertumbuhan wilayahnya. Selain itu, ketimpangan sosial juga dapat memotivasi masyarakat untuk bisa hidup lebih baik.

PENUTUP

Sosiologi ekonomi adalah bidang studi penting sebagai salah satu alat di dalam memahami realitas dan fenomena perekonomian. Dalam

sosiologi ekonomi tidak hanya memahami tentang bagaimana ekonomi saja, tetapi juga mengajak para ahli di bidang : antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah juga ilmu terapan ekonomi untuk menyadari bahwa persoalan ekonomi tidak hanya diselesaikan oleh ilmu ekonomi saja, tetapi harus juga ada sinergitas antar disiplin keilmuan yang semakin intens guna menghasilkan cara pandang dan kebijakan holistik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2003. Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa. Yogyakarta: Kepel Press.

- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3E.
- Bourdieu, Pierre. 1977. Outline Of Theory Of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1986, "The Forms of Capital", terj. oleh Richard Nice, dalam J.G. Richardson (Ed.), Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
- Caporaso & Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Coleman, James.S, 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of SociologyDamsar. (2011). Pengantar SosiologI Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Damsar. Pengantar Sosiologi Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1
- Damsar, dan Indrayani, 2015, "Pengantar Sosiologi Ekonomi", Prenadamedia Group, Rawamangun, Jakarta
- Damsar., dan Indrayani. (2016). Pengantar Sosiologi Pedesaan. Jakarta: Kencana.
- Dasgupta, P., I. Serageldin (1999), Social Capital A Multifaceted Perspective, Washington DC: World Bank. Page 2. 136. Davis, K., J.W. Newstorm
- Durkheim, Emile. (1893). Division of Labor in Society. (Reprinted in 1997). NY: Free Press.
- Evers, Hans Dieter and Heiko Schrader. (1994). The Moral Economy of Trade, Etnicity and Developing Markets. London and New York: Routladge.
- Featherstone, M. Hepworth, and B.S. Turner (eds.). 1991. The body: social process and cultural theory. London: Sage.
- Fried, Morton H. 1967. The evolution of political society an essay in political anthropology. Random House studies in anthropology, AS 7.
- Gellner. Ernest. (1983) .Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell.
- Granovetter. 1992. Economics institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis. Acta Sociologica,
- Geertz, Clifford. Kebudayaan dan Agama, alih bahasa oleh F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Goodman, Douglas J & Goerge Ritzer. 2004. Teori Sosiologi Modren. Jakarta: Kencana

- Henslin, J. M. 2007. Essential of Sociology: A Down-to-Earth Approach (Sosiologi dengan Pendekatan Membumi). Jakarta: Erlangga.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam,. (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- James W. Vander Zanden. (1990). The Social Experience: An Introduction To Sociology, New York: McGraw-Hill Publishing.
- Jenkins, R. (2004). Social Identity. (edisi kedua). London: Routledge.
- Johnson. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jilid 1. PT Gramedia: Jakarta.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. "Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik". Jurnal Bisnis dan Akuntansi.5(2):214-226. (Thompson,et al., 1991 dalam Jurnali dan Supomo, 2002).
- Krasner, Stephen, D. (1978). Defending The National Interest: Raw Materials Investments And U.S. Foreigen Policy United States of America: Princeton University Press.
- Lawang, Robert. MZ. 2004. Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik. Jakarta: FISIP UI Press.
- Levitt, Kari Polanyi, ed., The Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Books, 1990.
- Lin, Nan. 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press
- Lury, Celia. 1998. Budaya Konsumen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Marx, Karl.. Economic and Philosophic Manuscript of 1844. terj. Martin Milligan. 1959. Moscow: Progress Publishers.
- Marx, K. (1970). A contribution to the critique of political economy. Moscow: Progress Publishers.
- Marx, Karl. 1867. Das Kapital Volume 1. UK: Penguin Classics; Reprint edition (May 5, 1992).
- Nordlinger, Eric A. On the autonomy of the democratic state. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981
- Popkin, Samuel L. 1986, Petani RasionaL Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Portes, Alejandro, 2000, The Two Meanings of Social Capital. Sociological Forum, Vol. 15, No. 1. Journal of Latin American Studies

- Pratikno. 2001. Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai- Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial. Tim Penulis Fisipol UGM. Yogyakarta
- Priyasudiarja, Yusup. (2000). Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme; Max Weber. Surabaya: Pustaka Promethea.. terjemahan dari buku: Max Weber: The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. Charles Scribner's Sons. New York: 1958.
- Putnam R,1993, The Prosperous Community; SOSIAL Capital and Public Life.
- Richardo, david.1951 On The Principles Of Political Economic And Taxaton, yang diterbitkan sebagai buku 1 dari Work And Coresspondense Of David Richardson, editir pieron staffa maurie dobb.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rutherford, J. F, dan Ahlgren, A. 1990. Science For All Americans. New York: Oxford.
- Sahlins, Marshal. What Kinship Is And It is Not. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
- Sanderson, SK. 2003. Makro Sosiologi : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Scoot, James C. 1976. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3S.
- Skocpol, Theda (1979): States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, Rusia and China, Cambridge University Press.
- Slater, Don. 1997. Consumer culture and modernity. UK: Polity Press.
- Soekanto, Soerjono. 1989. "Georg Simmel: Beberapa Teori Sosiologo". Jakarta: CV. Rajawali.
- Sumanto Kamanto, Pengantar Sosiologi, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 2004).
- Thomas J. Sullivan dan Kenrick S. Thompson. 1984. Sosiology: Consepts, Issues and Applications. New York: McMillan Publishing Company
- Veblen. (1994). The theory of the leisure class: an economic study of intitutions. Mineola: Dover Publications.
- Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. California: University of California Press, 1978.
- Zusmelia.2007. Ketahanan (Persistence) Pasar Nagari di Minangkabau dalam Ekonomi Dunia Kasus Pasar Kayu Manis (Cassiavera) di

- Minangkabau Provinsi Sumatera Barat.Bogor:Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Institusi Pertanian Bogor.
- Wikipedia, "Sosiologi", https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi, 25 Juni 2021, 02:25
- Wikipedia, "Ekonomi", https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi, 16 Oktober 2021, 20:05



CATATAN:



Wandy Zulkarnaen, SE, SSy, MM, CHRA

HOLOGI Konomi

Sosiologi ekonomi adalah bidang studi penting sebagai salah satu alat di dalam memahami realitas fenomena dan perekonomian. Dalam sosiologi ekonomi tidak hanya memahami tentang bagaimana ekonomi saja, tetapi juga mengajak para ahli di bidang : antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah juga ilmu terapan ekonomi untuk menyadari bahwa persoalan ekonomi tidak hanya diselesaikan oleh ilmu ekonomi saja, tetapi harus juga ada sinergitas antar disiplin keilmuan yang semakin intens guna menghasilkan cara pandang dan kebijakan holistik dan komprehensif.

Penerbit Gunung Djati Publishing